

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH



Disusun Oleh:

**AL KAUTSAR M
NIM: 190602334**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Al Kautsar M

NIM : 190602334

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2026

Yang Menyatakan



Al Kautsar M

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah

Disusun Oleh:

Al Kautsar M

NIM: 190602334

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Khaiful Amri, S.E., M.Si

NIPPPK. 197507062023211009

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag

NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,
AR - RANIRY

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si

NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah

Al Kautsar M
NIM: 190602334

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

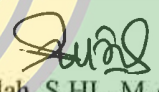
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Juli 2026 M
6 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
NIP. 197507062023211009

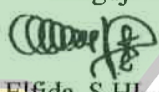
Sekretaris


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

Penguji I


Dr. Jalaluddin, M.A
NIP. 196512302023211002

Penguji II


Cut Elfida, S.HI., M.A
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Lengkap : Al Kautsar M
NIM : 190602334
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : alkautsarkautsar23@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

K

☐

Skr

☐

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah” beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di **AR : Banda Aceh RY**

Pada tanggal : Agustus 2026

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Al Kautsar M
NIM. 190602334

Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
NIP. 197507062023211009

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIP. 198806082023212040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kemiskinan dan pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi tantangan bersama untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”

Al Kautsar M

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94] : 56)

“Barang siapa menempuh jalan ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju kebaikan”

(HR. Muslim)

”Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil’alamin dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, keluarga, sahabat, dosen pembimbing, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta doa hingga terselesaikannya karya ini.”

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah**". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., M.E., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku Pembimbing I, dan Jalilah, S.HI., M.Ag, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan arahan, serta meluangkan waktu dan pikiran untuk penulis.
5. Tim penguji, Dr. Jalaluddin, M.A dan Cul Elfida, S.HI., M.A, yang telah memberikan masukan berharga pada sidang skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu

Pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syariah pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini pada khususnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2026

Penulis

Al Kautsar M



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Al Kautsar M
Nim : 190602334
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /
Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar dalam Menanggulangi
Pengangguran dan Kemiskinan
Tinjauan Maqasid Syariah.
Pembimbing I : Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar. Meskipun berbagai program pemerintah telah dilaksanakan, persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai syariah, diperlukan strategi pemerintah daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan sesuai perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan berbasis ekonomi syariah, mengidentifikasi hambatan struktural dan institusional yang dihadapi pemerintah daerah, serta menganalisis strategi tersebut dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan prinsip ekonomi syariah. Strategi tersebut diwujudkan melalui perencanaan yang terarah, kepemimpinan yang partisipatif,

serta pelaksanaan program seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, bantuan sosial, dan optimalisasi zakat produktif. Dalam perspektif maqasid syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa, harta, dan akal. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan institusional, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta sistem evaluasi yang belum berorientasi pada dampak. Meskipun demikian, instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Pengangguran, Kemiskinan, Maqasid Syariah.



DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Maqasid Syariah	14
2.1.1 Pengertian Maqasid Syariah	14
2.1.2 Dasar Hukum Maqasid Syariah	16
2.1.3 Sejarah Perkembangan Maqasid Syariah	17
2.1.4 Tingkatan Maqasid Syariah	18
2.1.5 Al-Dharuriyyat al-Khams (Lima Tujuan Pokok Syariah)	19
2.1.6 Maqasid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah	22
2.2 Pengangguran	23
2.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran	24
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran	25
2.2.3 Indikator Pengangguran	27

2.3 Kemiskinan.....	30
2.3.1 Jenis-Jenis Kemiskinan	32
2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	33
2.3.3 Indikator Kemiskinan	36
2.4 Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.....	39
2.5 Penelitian Terkait.....	44
2.6 Kerangka Berfikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	53
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.4 Teknik Analisis Data.....	55
3.5 Teknik Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar.....	61
4.2 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan.....	62
4.2.1 Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah	63
4.2.2 Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.....	67
4.2.3 Fokus atau Tujuan Strategi Pemerintah Daerah.....	72
4.2.4 Upaya Pencapaian Strategi Pemerintah Daerah	75
4.3 Hambatan Struktural Dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah Untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.....	82
4.3.1 Hambatan Struktural	83
4.3.2 Hambatan Institusional.....	89
4.4 Tinjauan Maqasid Syariah	96

4.4.1 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari Maqasid Syariah.....	96
4.4.2 Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah Untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Maqasid Syariah	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1 Kesimpulan.....	138
5.2 Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	142



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
Aceh Besar5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Berfikir

Gambar 3. 1 Gambar Diagram Pengumpulan Data56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	149
LAMPIRAN 2 Dokumentasi Penelitian.....	328



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan bernegara. Dalam konteks Indonesia, permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius, baik di tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Aceh masih menghadapi persoalan kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun berbagai program pembangunan dan otonomi khusus telah dijalankan, persentase penduduk miskin di Aceh secara konsisten berada di atas angka kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), tingkat kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 14,45%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 9–10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan, khususnya di wilayah perdesaan.

Selain kemiskinan, persoalan pengangguran juga menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh tergolong fluktuatif dan cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatra. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor

primer, terbatasnya lapangan kerja formal, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa TPT Aceh berada di kisaran 6–7%, mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Aceh memerlukan perhatian serius melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kabupaten Aceh Besar yang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh hingga beberapa tahun terakhir masih menjadi persoalan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar (2025) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di kabupaten ini tetap berada di kisaran dua digit, yaitu sekitar 13,21 % dari total penduduk pada tahun 2024 meskipun mengalami sedikit tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada bagian signifikan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dasar.

Badan Pusat Statistik Aceh (2025) menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar memiliki garis kemiskinan sebesar Rp 598.160 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan seluruh 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, garis kemiskinan Aceh Besar

menempati urutan ke-10 tertinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan hidup minimum di Aceh Besar berada pada kategori menengah ke atas. Garis kemiskinan Aceh Besar lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah seperti Aceh Utara (Rp 483.719), Aceh Tenggara (Rp 502.074), dan Bireuen (Rp 503.866), namun masih berada di bawah wilayah dengan biaya hidup relatif lebih tinggi seperti Aceh Barat (Rp 652.009), Nagan Raya (Rp 642.820), dan terutama Kota Banda Aceh yang memiliki garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp 872.944. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Aceh Besar menghadapi tekanan biaya hidup yang cukup signifikan, meskipun tidak setinggi daerah perkotaan. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dan berfungsi sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Aceh Besar dipengaruhi oleh dinamika ekonomi perkotaan, terutama dalam hal harga barang dan jasa, namun masih memiliki karakteristik perdesaan yang menahan peningkatan biaya hidup secara ekstrem.

Aspek ketenagakerjaan di Aceh Besar juga menunjukkan tantangan tersendiri meskipun terdapat kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari publikasi statistik daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Besar tercatat sekitar 8,17 %, yang meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya tetap tergolong tinggi dan mencerminkan masih banyak angkatan kerja yang belum terserap ke pasar kerja. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang

layak dan meningkatkan kesejahteraannya, terutama di sektor informal yang masih mendominasi struktur pekerjaan

Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh Besar tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti ketimpangan ekonomi, meningkatnya angka kriminalitas, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan tidak dapat dilihat sebagai masalah tunggal, melainkan sebagai akar dari berbagai persoalan yang saling terkait. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar memiliki angka kemiskinan yang signifikan dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Situasi ini memerlukan intervensi yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerintah daerah yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai ekonomi syariah guna menciptakan pemerataan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan. Adapun tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	384.545	62,03	15,55
2017	398.752	62,72	15,41
2018	422.051	60,08	14,47
2019	447.563	58,9	13,92
2020	477.938	59,7	13,84
2021	489.498	60,26	14,05
2022	519.320	58,18	13,38
2023	564.431	58,94	13,38

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024).

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar adalah 564.431 rupiah per kapita per bulan, dibandingkan dengan Garis Kemiskinan tahun 2022, Garis Kemiskinan tahun 2023 naik sebesar 8,69 persen. Secara Umum persentase penduduk miskin tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya sama yaitu sebesar 13,38 persen. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 58,94 ribu penduduk dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 58,18 ribu penduduk maka jumlah penduduk miskin tahun 2023 mengalami kenaikan.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar terus berupaya merumuskan berbagai kebijakan strategis guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui program pemberdayaan

masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis karena memiliki kewenangan otonomi dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai karakteristik wilayahnya. Di Kabupaten Aceh Besar, permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi isu penting dalam agenda pembangunan daerah. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, seperti pelatihan kerja, bantuan usaha mikro, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun tantangan dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan masih dihadapi.

Sebagai daerah yang berada di Provinsi Aceh dan memiliki kekhususan dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam, pendekatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar idealnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan distributif, larangan riba, optimalisasi zakat, infak, sedekah, serta pengembangan sektor riil sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan (Yuwono et al 2025). Dalam perspektif ekonomi syariah, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang memerlukan intervensi kebijakan berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan (Yulianto, et al 2025).

Menurut Sudaryanto dan Rusastra (2006) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang inovatif dan inklusif. Strategi ini harus memperhatikan karakteristik lokal, potensi sumber daya, serta kearifan lokal masyarakat. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program yang dijalankan.

Rahmawati dan Hidayat (2021) menjelaskan bahwa kemiskinan di daerah tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang terintegrasi lintas sektor lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan pendekatan sektoral yang parsial. Temuan ini relevan dengan kondisi Kabupaten Aceh Besar yang menghadapi kemiskinan sebagai masalah multidimensional.

Selanjutnya, Fauzan et al. (2022) dalam penelitiannya tentang peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan menemukan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu penyebab utama kurang optimalnya capaian

program pengentasan kemiskinan, sebagaimana juga terjadi di beberapa daerah di Aceh.

Dalam konteks ekonomi syariah, penelitian Maulana dan Yusuf (2022) menyimpulkan bahwa penerapan instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama apabila dikelola secara produktif dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini juga menyoroti masih rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan kelembagaan sebagai hambatan utama dalam optimalisasi ekonomi syariah di tingkat daerah.

Amsari et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi sebagai inti dari kebijakan publik dalam perspektif ekonomi syariah. Temuan ini sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Aceh Besar yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor agraris dan usaha skala kecil.

Selain itu, penelitian Sari dan Nasution (2023) mengkaji konsep masalah dalam kebijakan publik dan menyimpulkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan umum, perlindungan kelompok rentan, serta pemerataan akses ekonomi terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep masalah dapat menjadi kerangka normatif yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah” menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris serta rekomendasi strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan ditinjau dari maqasid syariah?
2. Apa hambatan struktural dan institusional yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari maqasid syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan ditinjau dari maqasid syariah.
2. Untuk mengetahui hambatan struktural dan institusional yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari maqasid syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengacu pada tujuan serta dampak positif yang dihasilkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, dengan menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur

terkait kebijakan publik berbasis syariah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan strategis yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dengan pendekatan ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

c. Bagi Pelaku Ekonomi

Memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah, UMKM, dan sektor swasta lainnya dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku ekonomi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori.

Pada bab ini berisi tentang teori pengangguran (definisi, jenis-jenis, faktor-faktor dan indikator), teori kemiskinan (pengertian, jenis-jenis, faktor-faktor dan indikator), teori perspektif ekonomi syariah terhadap peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, penelitian terkait, dan kerangka berfikir .

Bab III : Metode Penelitian.

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dan hasil penanggulangan oleh pemerintah daerah Kabupaten

Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Bab V : Penutup.

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran peneliti berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Maqasid Syariah

2.1.1 Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologis, kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berasal dari bahasa Arab *qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan* yang berarti tujuan, maksud, sasaran, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, *syariah* berarti jalan yang harus ditempuh atau aturan yang ditetapkan Allah Swt. bagi manusia. Dengan demikian, maqasid syariah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah Swt. melalui penetapan hukum-hukum syariat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahat adalah memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima pokok tersebut adalah maslahat, sedangkan segala sesuatu yang mengabaikannya merupakan mafsadat." (Al-Ghazali, 1993). Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku manusia secara formal, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Ibnu Asyur mendefinisikan maqasid syariah sebagai: "Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukumnya." (Ibn 'Ashur, 2006). Definisi ini menegaskan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada kemanfaatan umat manusia. Dalam kajian kontemporer, Jasser Auda menjelaskan bahwa maqasid syariah merupakan pendekatan sistem yang menempatkan syariat sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan kesejahteraan. "Maqasid al-Shariah are the goals and objectives behind Islamic rulings, aiming at the realization of welfare and prevention of harm." (Auda, 2008).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, keadilan, dan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, maqasid syariah menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.

2.1.2 Dasar Hukum Maqasid Syariah

Konsep maqasid syariah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi umat manusia. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107).

Ayat lain menyebutkan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185).

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bahwa setiap ketentuan syariat bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Maqasid syariah menegaskan bahwa hukum Islam hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam idealnya mengacu pada

upaya pemeliharaan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Dengan memahami tujuan-tujuan syariat tersebut, penerapan hukum Islam diharapkan dapat memberikan solusi yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang berkembang di tengah masyarakat.

2.1.3 Sejarah Perkembangan Maqasid Syariah

Konsep maqasid syariah berkembang secara bertahap melalui pemikiran para ulama ushul fikih.

1. Imam Al-Juwaini (478 H) merupakan ulama yang mulai merumuskan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam.
2. Imam Al-Ghazali (505 H) menyempurnakan konsep tersebut dengan merumuskan lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
3. Imam Asy-Syatibi (790 H) melalui kitab *Al-Muwafaqat* mengembangkan maqasid syariah secara sistematis dan menjadikannya sebagai teori hukum Islam yang komprehensif.
4. Ibnu Asyur (1879–1973) memperluas cakupan maqasid syariah dalam menjawab persoalan modern serta menjadikannya sebagai dasar ijtihad kontemporer.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa maqasid syariah bersifat dinamis dan relevan untuk menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan maqasid memungkinkan hukum Islam untuk tetap adaptif terhadap

perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan tujuan utamanya. Dalam konteks kehidupan modern, maqasid syariah dapat dijadikan sebagai kerangka normatif dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqasid syariah menjadi sangat penting dalam upaya menghadirkan solusi yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan kontemporer.

2.1.4 Tingkatan Maqasid Syariah

Asy-Syatibi (2004) membagi maqasid syariah menjadi tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu:

1. *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Dharuriyyat adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.

2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat merupakan kebutuhan yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

3. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, etika, dan keindahan hidup.

Pembagian tersebut bertujuan untuk menentukan skala prioritas dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks ekonomi,

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesempatan kerja menjadi bagian dari upaya menjaga aspek *dharuriyyat*. Selanjutnya, kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas dan kemudahan akses ekonomi dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan *hajiyyat*, sedangkan peningkatan kualitas hidup dan etika ekonomi termasuk dalam ranah *tahsiniyyat*. Oleh karena itu, klasifikasi maqasid syariah dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Al-Dharuriyyat al-Khams (Lima Tujuan Pokok Syariah)

Lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*) meliputi:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Hifz al-din bertujuan menjaga keberlangsungan agama melalui pelaksanaan ibadah, dakwah, pendidikan agama, dan perlindungan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan. Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56).

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Tujuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Allah Swt. berfirman:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." (Q.S. Al-Maidah [5]: 32). *Hifz al-nafs* tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh.

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Islam memandang akal sebagai anugerah yang harus dijaga melalui pendidikan dan larangan terhadap segala sesuatu yang merusaknya. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."(Q.S. Ar-Rum [30]: 24).

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pemeliharaan keturunan dilakukan melalui institusi pernikahan, pendidikan keluarga, dan perlindungan hak anak. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina." (Q.S. Al-Isra' [17]: 32).

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Syariat memberikan perlindungan terhadap kepemilikan harta serta mendorong aktivitas ekonomi yang adil dan produktif. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Dalam perspektif ekonomi syariah, perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui larangan riba, gharar, penipuan, serta optimalisasi zakat dan instrumen distribusi kekayaan lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil, transparan, dan mampu melindungi hak-hak setiap individu dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, distribusi kekayaan yang

merata melalui instrumen sosial Islam diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi prinsip *ḥifz al-māl* tidak hanya berfokus pada perlindungan hak kepemilikan, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

2.1.6 Maqasid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Maqasid syariah memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi syariah karena tujuan utama aktivitas ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan (*falah*) dan keadilan sosial. Maqasid syariah harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan manusia (*human development*), bukan sekadar menjaga lima kebutuhan pokok secara tekstual. Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai parameter dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maqasid syariah dapat diwujudkan melalui:

1. Penyediaan lapangan kerja yang layak;
2. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil berbasis syariah;
3. Optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif;
4. Pemerataan distribusi pendapatan;
5. Perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.

Dengan demikian, strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan perlu berorientasi pada

pencapaian kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh sesuai prinsip-prinsip maqasid syariah.

2.2 Pengangguran

Menurut Sambaulu, et al, (2022) menyebutkan bahwa “Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya.” Menurut Sayifullah dan Gandasari, (2016) menyebutkan bahwa “Pengangguran adalah keadaan di mana sebagian tenaga kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan meskipun mereka ingin bekerja pada tingkat upah yang berlaku

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang siap bekerja dan mencari pekerjaan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, perubahan teknologi, atau perlambatan ekonomi. Pengangguran juga bisa terjadi karena kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Dampaknya meliputi penurunan pendapatan masyarakat, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah..

2.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, baik secara terbuka maupun terselubung. Mulyadi, (2017). menjelaskan beberapa jenis pengangguran yang umum, antara lain:

1. Pengangguran berdasarkan penyebabnya
 - a. Pengangguran Struktural; Terjadi akibat perubahan dalam struktur ekonomi atau industri yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
 - b. Pengangguran Siklikal (Konjungtural); Disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau siklus bisnis, seperti resesi yang mengurangi permintaan tenaga kerja.
 - c. Pengangguran Friksional; Terjadi ketika seseorang sedang dalam masa transisi mencari pekerjaan baru atau pertama kali memasuki pasar kerja
 - d. Pengangguran Musiman; Terjadi karena pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu.
 - e. Pengangguran Teknologi; Disebabkan oleh kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin atau sistem otomatis.
 - f. Pengangguran Voluntary (Sukarela) Terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak bekerja meskipun ada pekerjaan yang tersedia

2. Pengangguran berdasarkan sifatnya

- a. Pengangguran Terbuka; Pengangguran yang terjadi ketika seseorang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
- b. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*); Terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sehingga ada tenaga kerja yang tidak bekerja secara produktif
- c. Setengah Menganggur (*Underemployment*); Terjadi ketika seseorang bekerja kurang dari jumlah jam kerja penuh atau memiliki pekerjaan di bawah keahliannya

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi tenaga kerja maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya beban sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tepat dari pemerintah dan berbagai pihak untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sugianto dan Yul (2020) menjelaskan beberapa faktor utama yang menyebabkan pengangguran, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

- a. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat; Ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau terjadi resesi,

dunia usaha mengalami penurunan permintaan dan mengurangi tenaga kerja.

- b. Perubahan Struktur Ekonomi; Pergeseran dari sektor pertanian ke industri atau ke jasa dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketersediaan pekerjaan.
 - c. Tingkat Upah yang Tidak Fleksibel; Jika upah minimum terlalu tinggi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja yang mereka rekrut.
2. Faktor Teknologi
- a. Automatisasi dan Digitalisasi; Kemajuan teknologi menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin atau kecerdasan buatan.
 - b. Kurangnya Keterampilan yang Sesuai; Perubahan teknologi membutuhkan keterampilan baru yang tidak dimiliki oleh sebagian tenaga kerja, sehingga mereka menjadi pengangguran.
3. Faktor Sosial dan Demografi
- a. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi; Angkatan kerja yang bertambah lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja menyebabkan peningkatan pengangguran.
 - b. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan; Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

- a. Regulasi Ketenagakerjaan yang Kaku; Kebijakan ketenagakerjaan yang terlalu ketat dapat membuat perusahaan enggan merekrut pekerja baru.
- b. Kurangnya Insentif bagi Pengusaha; Jika iklim investasi tidak kondusif, maka penciptaan lapangan kerja akan melambat.

Pengangguran tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, solusi yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dengan strategi yang terintegrasi, diharapkan tingkat pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan. Upaya ini juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

2.2.3 Indikator Pengangguran

Indikator pengangguran merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengangguran dalam suatu wilayah atau negara. Melalui indikator ini, kondisi pasar tenaga kerja dapat dianalisis sehingga memberikan informasi mengenai jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan, meskipun termasuk dalam angkatan kerja. Data mengenai indikator pengangguran sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan

ketenagakerjaan, evaluasi program penciptaan lapangan kerja, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur pengangguran, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

2. Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur menunjukkan skala absolut permasalahan pengangguran dalam suatu wilayah. Jumlah penganggur memberikan gambaran beban sosial ekonomi yang harus ditanggung oleh suatu wilayah akibat terbatasnya kesempatan kerja. Indikator ini penting dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan daerah.

3. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Setengah pengangguran terjadi ketika seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal dan masih bersedia menerima pekerjaan tambahan. Setengah pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta rendahnya kualitas pekerjaan. Fenomena ini umum terjadi di daerah dengan dominasi sektor informal dan agraris, seperti Aceh Besar.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan akses kerja atau discouragement effect.

5. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengangguran dapat dianalisis berdasarkan latar belakang pendidikan untuk melihat ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja. Pengangguran terdidik mencerminkan adanya mismatch antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Indikator ini penting dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas SDM.

6. Pengangguran Usia Muda (*Youth Unemployment*)

Pengangguran usia muda menunjukkan persentase penganggur pada kelompok usia produktif awal. Pengangguran usia muda merupakan indikator penting karena berdampak jangka panjang terhadap produktivitas dan stabilitas sosial. Tingginya pengangguran pemuda meningkatkan risiko kemiskinan dan masalah sosial.

Dalam ekonomi syariah, pengangguran dipandang sebagai kondisi tidak termanfaatkannya potensi kerja manusia secara

optimal. Islam memandang pengangguran sebagai pemborosan sumber daya manusia yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan kewajiban bekerja. Pengangguran bertentangan dengan tujuan *maqashid al-shariah* dalam menjaga harta dan keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara produktif dan mandiri sebagai bentuk ibadah demi kesejahteraan hidup bersama. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

2.3 Kemiskinan

Adam Smith dalam Rosana (2019) menyebutkan bahwa “Kemiskinan timbul ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya”. Kemiskinan dipandang sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam menghasilkan atau memperoleh pendapatan yang cukup. Selanjutnya Husni (2020) berpendapat bahwa “Kemiskinan adalah hasil dari sistem kapitalisme, yang menyebabkan ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja”. Pekerja di bawah kapitalisme tidak memiliki kontrol atas alat produksi, sehingga pekerja terus dieksploitasi dan terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan merupakan hasil dari sistem yang tidak adil dan tidak merata dalam distribusi sumber daya. Menurut Fitriani, et al, (2020) menjelaskan bahwa “Kemiskinan sebagai ketidakmampuan atau *poverty as capability deprivation*”. Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari

kemampuan seseorang untuk memilih dan melakukan kegiatan yang dianggap penting dalam hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Menurut Rosana, (2019) mengemukakan bahwa “Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat tertentu”. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, tetapi lebih pada ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diterima secara umum oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga mencakup keterbatasan dalam kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, sistem sosial yang tidak adil, dan kondisi lingkungan yang buruk. Kemiskinan merupakan fenomena yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari ketidakmampuan ekonomi, ketidakadilan sosial, hingga ketidakmampuan individu untuk mengakses peluang yang ada. Setiap teori memberikan wawasan yang berbeda mengenai penyebab dan solusi kemiskinan, dan semuanya mengindikasikan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan kultural.

2.3.1 Jenis-Jenis Kemiskinan

Hen (2021) menjelaskan kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai perspektif sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut; Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, dan papan. Ini mengacu pada kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan.
2. Kemiskinan Relatif; Kemiskinan relatif terjadi ketika seseorang atau kelompok berada dalam kondisi kekurangan jika dibandingkan dengan standar hidup masyarakat sekitarnya. Ini sering kali digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang diterima secara umum dalam masyarakat.
3. Kemiskinan Struktural; Kemiskinan struktural disebabkan oleh ketidakadilan dalam struktur sosial dan ekonomi yang ada, di mana sistem tersebut tidak memberikan kesempatan yang merata bagi semua individu untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial, atau ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4. Kemiskinan Kultural (Budaya Kemiskinan); Kemiskinan kultural mengacu pada kondisi di mana kemiskinan disebabkan atau diperburuk oleh norma, nilai, dan

kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat miskin. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali mengembangkan pola perilaku yang dapat memperburuk kondisi mereka, yang diteruskan antar generasi.

5. Kemiskinan Eksternal; Kemiskinan eksternal disebabkan oleh faktor-faktor luar yang mempengaruhi individu atau kelompok, seperti bencana alam, konflik sosial, atau perubahan iklim yang menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh sumber daya yang cukup dan memperburuk ketidakstabilan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat luas.

6. Kemiskinan Multidimensional; Kemiskinan multidimensional memperhitungkan berbagai dimensi kehidupan seseorang, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas dasar lainnya, bukan hanya sekedar penghasilan. Ini menggambarkan kemiskinan sebagai kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan.

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun kebijakan pemerintah. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Faktor-

faktor ini dapat berasal dari sisi individu, sosial, ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang berdampak sistemik dan berkelanjutan. Menurut Zuhdiyaty dan Kaluge (2017) menjelaskan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang lemah sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan. Ketika perekonomian suatu negara mengalami resesi atau stagnasi, lapangan pekerjaan terbatas, dan pendapatan masyarakat menurun. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak serta rendahnya tingkat upah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sering kali berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterampilan yang terbatas dan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat.

3. Faktor Kesehatan

Kesehatan yang buruk juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penyakit, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, atau tingkat gizi yang rendah mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan

pendapatan. Dalam banyak kasus, keluarga miskin lebih rentan terhadap penyakit karena keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan beban biaya hidup dan risiko kemiskinan jangka panjang.

4. Faktor Sosial dan Kultural

Norma sosial, budaya, dan struktur sosial masyarakat juga berperan penting dalam mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan kultural dapat terjadi ketika masyarakat miskin memiliki pola pikir atau kebiasaan yang tidak mendukung perbaikan ekonomi. Selain itu, diskriminasi sosial, seperti gender atau ras, juga dapat membatasi peluang ekonomi bagi individu atau kelompok tertentu.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal sangat memengaruhi tingkat kemiskinan. Kondisi lingkungan yang buruk, seperti bencana alam, perubahan iklim, atau kerusakan lingkungan, dapat mengurangi pendapatan dan menghancurkan sumber daya alam yang digunakan untuk mata pencaharian. Petani yang terkena dampak bencana alam atau perubahan iklim misalnya, sering kali jatuh ke dalam kemiskinan karena kehilangan aset dan pendapatan mereka.

6. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat memperburuk kemiskinan. Kurangnya investasi di sektor

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta kebijakan ketenagakerjaan yang tidak memadai, dapat memperburuk ketidaksetaraan dan memperbesar jurang kemiskinan. Selain itu, kebijakan yang tidak efektif dalam mendistribusikan sumber daya secara adil juga berkontribusi terhadap kemiskinan.

Kemiskinan adalah hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, baik internal maupun eksternal. Faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan, dan kebijakan pemerintah semuanya berperan dalam menciptakan atau memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai sektor.

2.3.3 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Indikator ini berperan penting dalam mengidentifikasi kelompok penduduk yang hidup di bawah standar hidup layak, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran.

1. Garis Kemiskinan (Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran)

Garis kemiskinan merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemiskinan secara ekonomi, yaitu berdasarkan kemampuan individu atau rumah tangga

dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menetapkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang terdiri dari kebutuhan makanan dan nonmakanan.

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah. Persentase penduduk miskin menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan secara relatif terhadap jumlah penduduk suatu wilayah. Indikator ini penting untuk melihat tingkat kemiskinan secara proporsional, bukan hanya dari jumlah absolut.

3. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin menunjukkan skala masalah kemiskinan secara absolut dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk miskin memberikan gambaran besarnya beban sosial dan ekonomi yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Meskipun persentase rendah, jumlah penduduk miskin yang besar tetap menunjukkan urgensi kebijakan pengentasan kemiskinan.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator penting kemiskinan karena berhubungan langsung dengan produktivitas dan kesempatan kerja. Kemiskinan sangat berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang membatasi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

5. Tingkat Pengangguran

Pengangguran menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan memperoleh pendapatan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan, terutama di negara berkembang yang bergantung pada sektor informal. Tingginya pengangguran memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga.

6. Akses terhadap Kesehatan dan Layanan Dasar

Kemiskinan juga bersifat multidimensional dan mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Pendekatan ini menegaskan bahwa kemiskinan mencerminkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dalam ekonomi syariah, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang menjaga maqashid al-shariah. Kemiskinan dalam Islam dipahami sebagai

kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang menjamin terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menekankan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

2.4 Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan

Perspektif ekonomi syariah menempatkan kemiskinan dan pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga masalah moral dan sosial yang memengaruhi kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Sistem ekonomi syariah menekankan tujuan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan ummat (falah), serta penurunan ketimpangan sebagai bagian dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurut Jumiaty (2023), pendekatan ekonomi syariah sangat relevan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini.

Peran strategis pemerintah dalam ekonomi syariah adalah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengarahkan sistem ekonomi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan lapangan kerja dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sari dan Rianto. (2024) menekankan bahwa “kebijakan pemerintah yang berbasis ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan

ekonomi”. Hal ini relevan dalam konteks Aceh Besar sebagai wilayah dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup signifikan.

Instrumen sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan. Wahhab et al. (2023) menyatakan bahwa “redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat dan wakaf yang dikelola pemerintah secara profesional terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di berbagai daerah”. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator sekaligus regulator agar distribusi ini berjalan adil.

Dalam penanggulangan pengangguran, kebijakan pemerintah yang memadukan instrumen syariah dengan pengembangan sektor riil mampu meningkatkan akses kerja, khususnya bagi sektor informal. Asyrorroji (2025) menegaskan bahwa “program pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip syariah memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan”. Integrasi antara kebijakan fiskal dan penguatan ekonomi syariah menjadi kunci efektivitas intervensi. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam menurunkan tingkat pengangguran, terutama pasca pandemi COVID-19. Menurut Wahhab et al. (2023), “pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi ekonomi yang adil, memberi peluang kerja layak, dan

meningkatkan keterampilan tenaga kerja”. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip *maslahah*, yaitu upaya memaksimalkan kemanfaatan dan meminimalkan kemudaratannya bagi masyarakat.

Konsep *maslahah* menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama kebijakan publik. Jumiaty (2023) menyebutkan, “*maslahah* menjadi kerangka normatif bagi pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap kelompok rentan”. Dengan pendekatan ini, kebijakan pemerintah tidak hanya menurunkan kemiskinan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial. Keberhasilan program pemerintah juga ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah. Integrasi antara kebijakan fiskal, program ekonomi syariah, dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan pendekatan komprehensif untuk pembangunan inklusif”. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting agar intervensi tepat sasaran.

Secara keseluruhan, perspektif ekonomi syariah memandang pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sari dan Rianto (2024) menekankan bahwa “intervensi pemerintah yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah mampu memperkuat struktur sosial, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan”. Pendekatan ini menjadikan

peran pemerintah sebagai pusat pengelolaan kemaslahatan masyarakat, sesuai prinsip *masalah*.

Strategi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan merupakan proses kebijakan yang komprehensif, melibatkan aspek perencanaan, kepemimpinan, penetapan tujuan yang jelas, serta upaya pencapaian yang terukur. Dalam konteks ekonomi syariah, strategi tersebut tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan (*falah*) masyarakat. Prinsip-prinsip syariah seperti distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab kolektif menjadi landasan dalam perumusan strategi ini.

1. Perencanaan

Perencanaan strategi adalah titik awal kebijakan yang meliputi identifikasi masalah, penetapan prioritas, dan penyusunan program yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah diharapkan menciptakan rencana yang terintegrasi antara kebijakan ekonomi daerah dengan instrumen-instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan instrumen fiskal pro-rakyat. Menurut Premi (2024), menjelaskan bahwa integrasi lebih mendalam antara prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan publik dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk kemiskinan dan pengangguran.”

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan pemerintahan daerah berperan dalam menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung strategi yang telah direncanakan. Kepemimpinan yang visioner mampu menjaga konsistensi strategi, mendorong kolaborasi antar lintas sektor (pemerintah, masyarakat, dan lembaga syariah), serta memastikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam setiap indikator kebijakan. Perencanaan yang baik pun perlu dilanjutkan dengan leadership yang kuat agar kebijakan dapat berjalan efektif (Susanti, 2025).

3. Tujuan

Tujuan strategi diatur untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam kerangka syariah, tujuan tidak hanya bersifat kuantitatif (misalnya menurunkan angka kemiskinan), tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan inklusi. Penelitian menunjukkan program pemerintah yang berpijak pada prinsip Islam, seperti pemberdayaan melalui training dan fasilitasi usaha, mampu memberikan manfaat pada masyarakat meskipun belum optimal (Hakim & Firmani, 2025).

4. Upaya Pencapaian

Upaya pencapaian strategi mencakup pelaksanaan program nyata seperti pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial produktif, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Langkah tersebut dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Kajian menunjukkan bahwa meskipun langkah pemerintah sudah berjalan, integrasi pelaksanaan berbasis syariah perlu diperkuat agar hasilnya lebih optimal dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran (Hakim & Firmani, 2025)

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait adalah penelitian yang memiliki hubungan atau relevansi dengan suatu topik penelitian tertentu. Adapaun guna penelitian terkait ini untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan serta menunjukkan teori atau konsep yang sudah ada dan relevan dengan penelitian baru. Penelitian yang terkait untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Dzulqurnain & Sari (2020) dengan judul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam memerangi kemiskinan, perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat

menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosialnya.. Disini inilah peran Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, melalui Permendagri No 53 Tahun 2020, menetapkan tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten dan Kota, yang didalamnya terdapat strategi dan program. Disini peran TKPK diharapkan meningkatkan persebaran serta pendayagunaan dana zakat yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Marliyah (2023) dengan judul Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya percobaan yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam menganggulangi tingkatan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Asahan dari berbagai program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya. Dalam proses penyelenggaraan strategi menanggulangi taraf kemiskinan dan pengangguran, ada beberapa jenis faktor yang berpengaruh mencakup faktor

pendukung dan penghambat. Serta pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan pendekatan Internal dan Eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Awwalunnisa (2021) dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah terdapat instrument yang dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat dan pengembangan modal melalui Lembaga keuangan syariah baik melalui bank syariah ataupun Lembaga keuangan syariah lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan baik secara regional maupun nasional. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Salah satu alasan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin ini karena terjadinya bencana global berupa Pandemic Covid-19 yang mengharuskan seluruh manusia di dunia melakukan adaptasi terhadap keadaan baru. Walaupun secara nasional jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, namun secara regional di Provinsi NTB menunjukkan jumlah penduduk miskin yang menurun pada tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur & Shodiqin (2022) dengan judul Peran Nilai-Nilai Maqhasid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid 19. Hasil

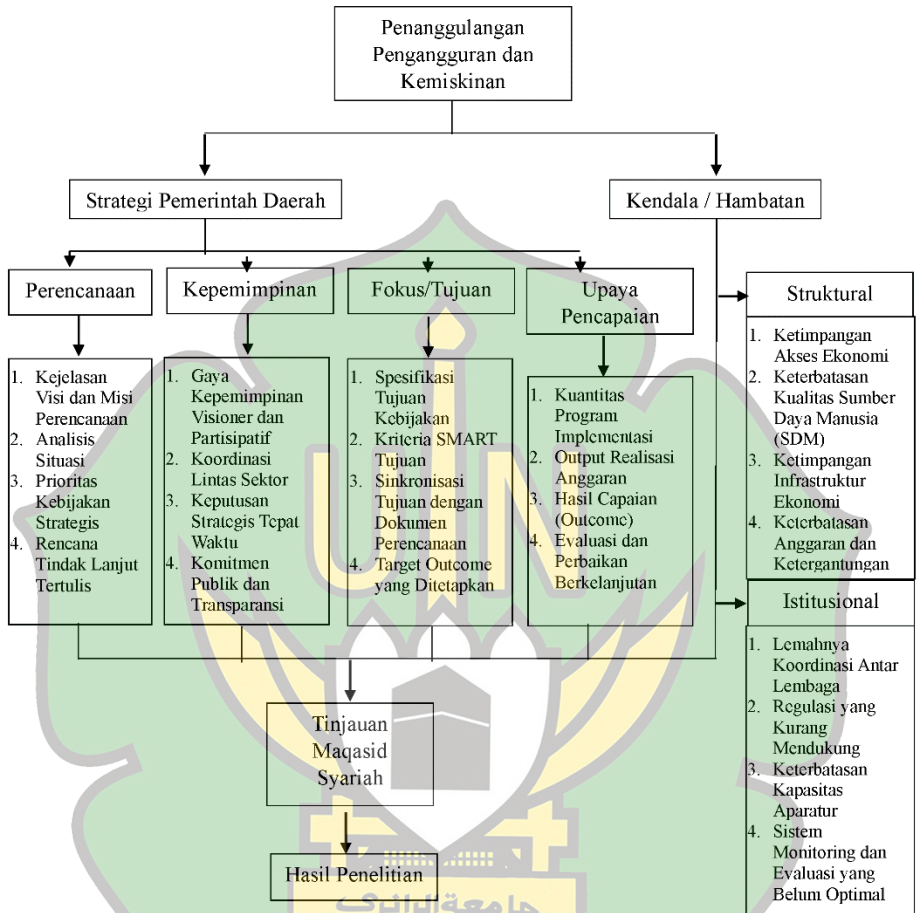
penelitian menunjukkan (1) program penanggulangan kemiskinan terbagi dalam 4 model tahapan pengentasan kemiskinan yaitu model pengembangan bantuan sosial, model pengembangan pemberdayaan masyarakat, dan model pemberdayaan usaha mikro (2) program penanggulangan kemiskinan dengan penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah sesuai dengan prinsip maqashid Syariah digambarkan dalam 5 konsep dasar yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogasnumurti, et al (2023) dengan judul Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ekonomi syariah ada alat yang dapat menangani masalah kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat dan pengembangan modal melalui lembaga keuangan syariah bank maupun nonbank. Sumatera Selatan memiliki 97,17% masyarakat yang menganut agama muslim, seharusnya bisa memberikan dampak positif untuk mengentaskan kemiskinan secara lokal maupun nasional. Hal terbesar yang menyebabkan kemiskinan meningkat di Sumatera Selatan adalah terjadinya bencana menyeluruh di berbagai negara yaitu COVID 19 yang merubah keadaan baru dimana masyarakat harus bisa menyesuaikan. Pendistribusian

zakat dan pengembangan usaha melalui BMT merupakan salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kemiskinan tersebut.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu alur atau pola pemikiran yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menyusun penelitian dan menggambarkan bagaimana teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Melalui kerangka berpikir, peneliti dapat menentukan arah analisis sehingga proses penelitian menjadi lebih terstruktur dan terarah. Selain itu, kerangka berpikir membantu dalam merumuskan hipotesis atau dugaan sementara yang akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Dengan adanya kerangka berpikir yang jelas, hubungan antarvariabel dapat dipahami secara logis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai secara efektif.



A Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Berfikir

Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan merupakan tujuan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

Strategi pemerintah daerah dalam konteks ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, kepemimpinan, fokus atau tujuan, serta upaya pencapaian. Perencanaan menjadi tahap awal yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan, sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah konkret yang harus diambil. Kepemimpinan berperan sebagai motor penggerak dalam memastikan strategi tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Fokus atau tujuan dari strategi ini harus jelas dan terukur, agar upaya yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, upaya pencapaian mencakup berbagai program dan tindakan konkret yang dilaksanakan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti zakat dan wakaf. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, tidak dapat dihindari adanya

kendala atau hambatan yang muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi agar dapat mengatasi tantangan tersebut secara efektif.

Semua komponen tersebut selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan melalui perspektif ekonomi syariah, yang menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat (maslahah). Pendekatan ini memberikan kerangka normative dan praktis bagi pemerintah dalam menjalankan peranannya sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Akhirnya, dari perspektif ekonomi syariah tersebut, akan diperoleh hasil penelitian yang menggambarkan efektivitas strategi pemerintah daerah serta rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang, sehingga upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian maka dibutuhkan pendekatan dan jenis penelitian agar pengolahan data yang diteliti dapat lebih mudah dan terarah. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah dipahami. Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa, “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap/eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode yang mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan yang ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa, “Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian”. Subjek penelitian ini adalah nara sumber (informan penelitian) sebanyak 14 orang yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat yang mengalami pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dengan kriteria sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar (1 orang)
2. Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar (1 orang)
3. Staff Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (1 orang)
4. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar (1 orang)
5. Akademisi Ekonomi Syariah (1 orang)
6. Masyarakat Kabupaten Aceh Besar (9 orang).

Selanjutnya, Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa, “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal”. Objek penelitian ini adalah kajian strategi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan perspektif ekonomi syariah.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini. Moleong (2018) menyebutkan bahwa "Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu melalui angket (kuesioner) sebagai penelitian dan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari obyek penelitian". Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data utama yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber tanpa ada perantara yang secara khusus yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun karakteristik sumber data yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang peneliti peroleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini seperti dokumen, foto- foto, dan arsip lainnya. Data ini dianalisis untuk memberikan konteks dan memperkuat temuan dari data primer.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa, “Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.

2. Dokumentasi

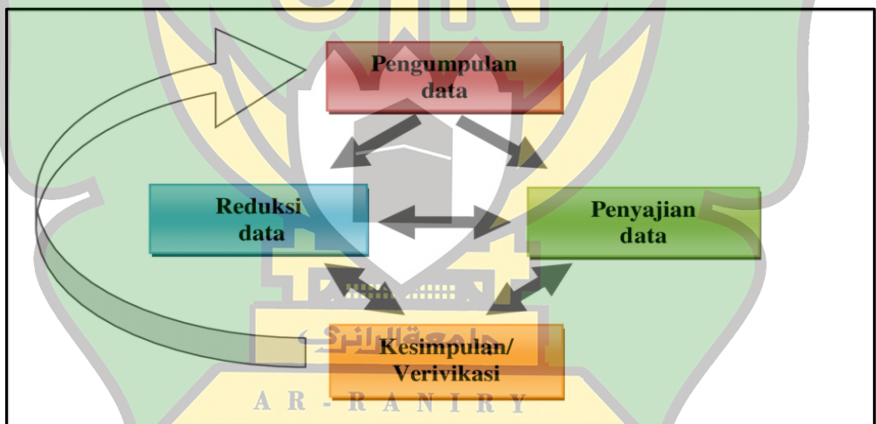
Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa, “Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat”. Dokumentasi digunakan untuk memantapkan dan menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau

menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan mudah untuk dipahami.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data data terkumpul.



Gambar 3. 1 Gambar Diagram Pengumpulan Data

Sumber: Miles et al (2014)

Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut bagan alur dalam analisis data penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat terhadap fenomena yang diteliti. Setiap tahap analisis, mulai dari reduksi data hingga penarikan kesimpulan, dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas.

Adapun komponen-komponen analisis data model interaktif Miles, et al (2014), dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih dan memfokuskan data pengumpulan data. Kesimpulan-kesimpulan Penarikan /verifikasi pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan

dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal

3.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan peneliti yaitu triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan (Sugiyono, 2019). Teknik pemeriksaan keabsahaan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan dan metode triangulasi.

1. Perpanjangan Keikutsertaan; Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Dengan peneliti ikut tinggal dilapangan penelitian, maka peneliti dapat menguji ketidakbenaran informasi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden serta dapat membangun kepercayaan subyek.
2. Ketekunan Pengamatan; Ketekunan pengamatan memiliki maksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari yang kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci. Maka dari itu peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang di telaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
3. Triangulasi; Menurut Moleong (2018) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa ada 3 kategori, yaitu:
 - a. Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda

dalam penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data serta memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

- b. Triangulasi dengan metode, yaitu melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan penyidik, yaitu dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan teori sebagai penjelasan banding (*rival explanations*). Selain itu juga dengan menggunakan triangulasi dengan sumber pembandingan terhadap sumber yang diperoleh dari hasil penelitian dengan sumber yang lain. Sehingga dalam proses triangulasi ini peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki posisi strategis baik dari segi geografis, sosial, ekonomi maupun budaya. Kabupaten ini mengelilingi Kota Banda Aceh dan memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, serta sektor pariwisata berbasis syariah. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal, Kabupaten Aceh Besar memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai instrumen pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya terlihat dalam aspek hukum dan sosial masyarakat, tetapi juga mulai diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, pengembangan koperasi syariah, optimalisasi zakat, infak dan sedekah, serta pengembangan sektor ekonomi produktif.

Namun demikian, Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi permasalahan sosial ekonomi berupa tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan masyarakat, ketimpangan pembangunan, serta belum optimalnya

pengelolaan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut perlu dianalisis berdasarkan perspektif maqasid syariah guna melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yaitu “Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Syariat Islam,” menjadi landasan utama dalam arah pembangunan daerah. Visi tersebut dijabarkan melalui enam misi yang mencakup penguatan syariat Islam, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi berbasis mukim dan gampong, serta pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, terisolir, dan tertinggal. Keseluruhan misi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang religius, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan.

Strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dilakukan

melalui berbagai program pembangunan ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan nilai-nilai syariah. Strategi tersebut dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu perencanaan, kepemimpinan, tujuan, dan upaya pencapaian. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2.1 Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyusun berbagai program melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta program kerja perangkat daerah. Perencanaan strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan berbasis ekonomi syariah dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu kejelasan visi dan misi perencanaan, analisis situasi, prioritas kebijakan strategis, serta rencana tindak lanjut program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: *"Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pendekatan ekonomi*

syariah." (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki arah kebijakan yang jelas dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Program yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam menyusun strategi, pemerintah daerah juga melakukan analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya keterampilan kerja sebagian masyarakat, sementara kebutuhan pasar kerja terus berkembang. Oleh karena itu, pelatihan kerja menjadi salah satu program yang diprioritaskan."* (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar). Sementara itu, masyarakat Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Sebagian masyarakat masih bergantung pada pekerjaan musiman, sehingga ketika hasil pertanian menurun, pendapatan keluarga juga ikut berkurang."* (IW06, Masyarakat Kabupaten Aceh Besar). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memahami kondisi riil masyarakat sebelum menetapkan kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis situasi, pemerintah daerah menetapkan beberapa prioritas kebijakan, seperti peningkatan keterampilan kerja, pemberdayaan usaha masyarakat, penguatan

ekonomi berbasis syariah, serta optimalisasi instrumen zakat produktif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, yang menyatakan bahwa: *"Program zakat produktif terus dikembangkan untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi."* (IW04, Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, Akademisi Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa: *"Optimalisasi instrumen ekonomi syariah, seperti zakat produktif dan pemberdayaan usaha berbasis syariah, dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran apabila dikelola secara profesional."* (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah)

Dari sisi pelaksanaan program, Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan data yang telah diverifikasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran."* (IW02, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar). Namun demikian, beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Program pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan masih ada masyarakat yang belum memperoleh akses bantuan."* (IW07, Masyarakat Kabupaten Aceh Besar). Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki perencanaan yang cukup baik, implementasi program masih

menghadapi tantangan dalam aspek pemerataan manfaat dan distribusi bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyusun perencanaan Strategi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai kebutuhan.
2. Penyusunan kebijakan berdasarkan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan.
4. Pemberdayaan usaha masyarakat.
5. Optimalisasi zakat produktif.
6. Penguatan usaha berbasis ekonomi syariah.
7. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran berdasarkan data terverifikasi.
8. Peningkatan pemerataan pelaksanaan program.

Maka, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyusun perencanaan strategis yang cukup terarah dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Perencanaan tersebut ditunjukkan melalui adanya visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, analisis terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, penetapan prioritas program, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang telah direncanakan.

4.2.2 Kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong terciptanya koordinasi antarinstansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini, kepemimpinan pemerintah daerah dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu gaya kepemimpinan visioner dan partisipatif, koordinasi lintas sektor, keputusan strategis yang tepat waktu, serta komitmen publik dan transparansi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan gaya kepemimpinan yang visioner melalui kebijakan pembangunan ekonomi berbasis syariah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: *"Pemerintah daerah berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat."* (IW01, Aparatur

pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Sementara itu, beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa pemerintah cukup terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi dan bantuan usaha. Masyarakat juga menilai bahwa pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan gaya kepemimpinan yang visioner dan partisipatif dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Baitul Mal, serta lembaga lain yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, kami bekerja sama dengan berbagai pihak agar bantuan dan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif."* (IW02, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyaluran zakat produktif agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran"*

dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat." (IW04, Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar). Namun demikian, Akademisi Ekonomi Syariah berpendapat bahwa koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat agar program ekonomi syariah dapat berjalan lebih terintegrasi dan tidak bersifat parsial. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa koordinasi lintas sektor telah dilakukan oleh pemerintah daerah, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek integrasi program antar lembaga. Keputusan strategis yang tepat waktu juga menjadi aspek penting dalam menghadapi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang terus berkembang. Pemerintah daerah dituntut mampu merespons kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: *"Ketika terjadi peningkatan jumlah pencari kerja, pemerintah berupaya melaksanakan pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja maupun berwirausaha."* (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar). Sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan bahwa bantuan usaha dan pelatihan yang diberikan pemerintah cukup membantu dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Akan tetapi, beberapa masyarakat lainnya berpendapat bahwa terdapat program yang

pelaksanaannya masih terlambat sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengambil keputusan strategis dalam merespons berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam kecepatan implementasi program di lapangan. Komitmen publik dan transparansi merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya menunjukkan komitmennya melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, serta penyampaian informasi terkait program yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: *"Pemerintah daerah terus berupaya menjalankan program secara terbuka dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa program bantuan usaha dan pelatihan kerja telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, beberapa masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan transparansi, khususnya terkait pendataan dan penetapan penerima bantuan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah

memperlihatkan komitmen dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.

Berdasarkan sintesis hasil wawancara, strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam aspek kepemimpinan meliputi:

1. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program.
2. Membangun komunikasi dan menerima aspirasi masyarakat.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.
4. Mengoptimalkan koordinasi penyaluran zakat produktif.
5. Merespons peningkatan pengangguran melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan.
6. Memberikan bantuan usaha dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan.
7. Menjalankan program secara terbuka dan tepat sasaran.
8. Meningkatkan transparansi dalam pendataan dan penetapan penerima bantuan.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan telah menunjukkan karakteristik yang visioner dan partisipatif. Pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mengambil keputusan strategis dalam merespons kebutuhan

masyarakat, serta menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar lembaga, percepatan implementasi program, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas masih diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

4.2.3 Fokus atau Tujuan Strategi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, zakat produktif, bantuan sosial, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Pemerintah daerah setiap tahun melaksanakan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya bagi pemuda dan pencari kerja."* (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar). Program pelatihan kerja tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran.

Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Selain bantuan konsumtif, kami juga menjalankan program zakat produktif untuk membantu masyarakat miskin membuka usaha kecil sehingga dapat meningkatkan*

pendapatan keluarga." (IW04, Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi syariah telah diintegrasikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pemanfaatan zakat produktif sejalan dengan tujuan *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* karena bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri..

Masyarakat Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Setelah mendapatkan bantuan modal dan pelatihan usaha, penghasilan keluarga kami mulai meningkat."* (IW08, Masyarakat Kabupaten Aceh Besar). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, Masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan bahwa: *"Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan bantuan usaha sehingga program pemerintah perlu diperluas lagi."* (IW09, Masyarakat Kabupaten Aceh Besar). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan cakupan program agar lebih banyak masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja dan bantuan usaha.

Terkait evaluasi program, Akademisi Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa: *"Evaluasi program seharusnya tidak hanya*

melihat penyerapan anggaran, tetapi juga dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran." (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah). Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem evaluasi berbasis dampak (*outcome*) agar kebijakan yang dijalankan dapat dinilai dari perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan reduksi data hasil wawancara, strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada aspek fokus atau tujuan strategi meliputi:

1. Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja.
2. Mengembangkan usaha produktif melalui optimalisasi zakat produktif.
3. Memberikan bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan usaha.
5. Memperluas jangkauan program kesempatan kerja dan bantuan usaha.
6. Memperkuat evaluasi program yang berorientasi pada dampak (*outcome*).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui pelatihan kerja, bantuan usaha, dan optimalisasi zakat produktif menunjukkan adanya komitmen dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, perlu

adanya perluasan jangkauan program serta penguatan evaluasi berbasis dampak agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

4.2.4 Upaya Pencapaian Strategi Pemerintah Daerah

Upaya pencapaian merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis syariah. Dalam penelitian ini, upaya pencapaian strategi pemerintah daerah dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kuantitas program implementasi, output realisasi anggaran, hasil capaian (*outcome*), serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan berbagai program dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program-program tersebut meliputi pelatihan kerja, bantuan modal usaha, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, zakat produktif, serta pengembangan sektor ekonomi produktif. Program implementasi tersebut dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Pemerintah daerah setiap tahun melaksanakan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat,*

khususnya bagi pemuda dan pencari kerja." (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Selain bantuan yang bersifat konsumtif, kami juga menjalankan program zakat produktif untuk membantu masyarakat miskin membuka usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga."* (IW04, Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar). Beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan bahwa mereka pernah mengikuti pelatihan keterampilan atau memperoleh bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun melalui program pemberdayaan ekonomi lainnya. Temuan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program sebagai bentuk upaya nyata dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

Realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk mendukung program pelatihan kerja, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sektor ekonomi produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: *"Pemerintah daerah terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat meskipun masih terdapat keterbatasan*

dana." (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Namun demikian, beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar menilai bahwa program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Menurut mereka, jumlah bantuan dan cakupan penerima manfaat masih terbatas jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah diarahkan untuk mendukung program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. *Outcome* yang diharapkan pemerintah daerah meliputi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya keterampilan masyarakat, bertambahnya masyarakat yang mampu menjalankan usaha secara mandiri, serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Program pelatihan kerja dan bantuan usaha telah membantu sebagian masyarakat memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha mandiri."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan bahwa bantuan modal usaha dan

pelatihan yang mereka terima telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan kerja mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut membantu mereka memperoleh keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berwirausaha. Namun demikian, beberapa masyarakat lainnya berpendapat bahwa dampak program belum dirasakan secara merata. Menurut mereka, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan dukungan usaha sehingga pelaksanaan program perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian *outcome* program masih memerlukan penguatan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Evaluasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui tingkat keberhasilan program serta berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui monitoring kegiatan, laporan pelaksanaan program, serta peninjauan langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: "Setiap

program yang dijalankan dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat." (IW02, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki program pelatihan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja."* (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar). Namun demikian, Akademisi Ekonomi Syariah berpendapat bahwa evaluasi program tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek administratif atau realisasi kegiatan, tetapi juga perlu mengukur dampak nyata program terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar mengharapkan agar pemerintah lebih sering melakukan pemantauan langsung ke lapangan sehingga berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan. Akan tetapi, kualitas monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengukuran dampak program terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang lebih komprehensif, pelaksanaan strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis hasil wawancara, strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada aspek upaya pencapaian strategi meliputi:

1. Melaksanakan program pelatihan kerja.
2. Mengembangkan program zakat produktif.
3. Memberikan bantuan usaha dan pelatihan kepada masyarakat.
4. Mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat.
5. Mendorong masyarakat memperoleh pekerjaan atau berwirausaha.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal dan pelatihan.
7. Melaksanakan evaluasi program secara berkala.
8. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program.
9. Memperkuat monitoring lapangan dan evaluasi berbasis dampak.

Upaya pencapaian strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan telah diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis syariah. Program-program tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pemerataan

manfaat program, optimalisasi alokasi anggaran, serta penguatan sistem evaluasi agar tujuan pembangunan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemberdayaan ekonomi melalui optimalisasi zakat produktif dan bantuan usaha merupakan strategi yang paling banyak berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Strategi ini secara langsung membantu masyarakat miskin memperoleh modal untuk membuka atau mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Temuan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang memperoleh bantuan modal dan pelatihan usaha mengalami peningkatan pendapatan keluarga, sementara program zakat produktif diarahkan untuk mengubah bantuan konsumtif menjadi dukungan usaha yang berkelanjutan. Meskipun pelatihan kerja juga berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dampak pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dan bantuan usaha terlihat lebih langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

4.3 Hambatan Struktural Dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah Untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

Hambatan struktural dan institusional menjadi penting dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi optimalisasi peran ekonomi syariah dalam upaya menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Meskipun ekonomi syariah memiliki potensi yang besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis syariah, pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, serta dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan regulasi dan kebijakan pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah, belum optimalnya dukungan anggaran, serta rendahnya sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga ekonomi syariah. Kondisi ini perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas peran ekonomi syariah dalam mewujudkan Hambatan struktural merupakan kendala yang berasal dari kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah yang memengaruhi efektivitas strategi pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam

penelitian ini, hambatan struktural dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), ketimpangan infrastruktur ekonomi, serta keterbatasan anggaran dan ketergantungan fiskal.

4.3.1 Hambatan Struktural

Hambatan struktural merupakan kendala yang berasal dari kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah yang memengaruhi efektivitas strategi pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini, hambatan struktural dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), ketimpangan infrastruktur ekonomi, serta keterbatasan anggaran dan ketergantungan fiskal.

Salah satu hambatan struktural yang dihadapi pemerintah daerah adalah masih terjadinya ketimpangan akses ekonomi di tengah masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap modal usaha, lapangan kerja, pelatihan, maupun fasilitas ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses modal usaha dan peluang kerja dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah yang

lebih mudah dijangkau. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa masih banyak warga yang memiliki keinginan untuk membuka usaha, tetapi terkendala oleh keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan bantuan usaha. Sementara itu, Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Pemerintah terus berupaya memperluas akses ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan usaha, namun belum semua masyarakat dapat dijangkau."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan akses ekonomi masih menjadi hambatan dalam upaya pemerintah daerah menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Masih banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan."* (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, Akademisi Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa: *"Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan"*

ekonomi daerah. Oleh karena itu, program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat perlu terus diperluas agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik." (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah)

Beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang pernah mengikuti pelatihan kerja juga menyampaikan bahwa pelatihan tersebut sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan mereka. Namun demikian, jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas SDM masih menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan struktural lainnya adalah ketimpangan infrastruktur ekonomi, seperti keterbatasan akses jalan, fasilitas pasar, sarana produksi, serta jaringan distribusi ekonomi. Keterbatasan infrastruktur tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat belum berkembang secara optimal, terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa masih terdapat wilayah desa yang memiliki akses jalan dan fasilitas ekonomi yang terbatas sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil usaha mereka. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa kurangnya sarana transportasi dan fasilitas

pemasaran menjadi kendala dalam pengembangan usaha masyarakat.

Sementara itu, Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa: *"Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur ekonomi masyarakat, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur ekonomi masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan struktural lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal sehingga beberapa program pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat karena kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi cukup besar."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, aparat pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga memberikan tanggapan bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah pada dasarnya telah memberikan manfaat, namun jumlah bantuan dan cakupan penerima manfaat masih terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, Akademisi Ekonomi Syariah berpendapat bahwa: *"Optimalisasi instrumen ekonomi syariah seperti zakat produktif, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi umat dapat menjadi alternatif solusi dalam membantu mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah daerah."* (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah).

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang menyampaikan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin apabila dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan ketergantungan fiskal masih menjadi hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui instrumen ekonomi syariah, agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis hasil wawancara, hambatan struktural yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi:

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap modal usaha dan peluang kerja.
2. Belum meratanya jangkauan program pemberdayaan ekonomi.
3. Rendahnya keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar kerja.
4. Terbatasnya cakupan program pelatihan kerja.
5. Terbatasnya infrastruktur ekonomi di beberapa wilayah.
6. Keterbatasan anggaran daerah untuk program pemberdayaan.
7. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
8. Terbatasnya jumlah bantuan dan cakupan penerima manfaat.
9. Belum optimalnya pemanfaatan instrumen ekonomi syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Maka, dapat disimpulkan bahwa hambatan struktural yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur ekonomi, serta keterbatasan anggaran dan ketergantungan fiskal. Hambatan-hambatan tersebut saling

berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga ekonomi syariah, akademisi, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar secara berkelanjutan.

4.3.2 Hambatan Institusional

Hambatan institusional merupakan kendala yang berkaitan dengan sistem kelembagaan, tata kelola pemerintahan, regulasi, dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini, hambatan institusional dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga, regulasi yang kurang mendukung, keterbatasan kapasitas aparatur, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal.

Koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Program yang dijalankan oleh masing-masing instansi terkadang belum terintegrasi secara maksimal sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih program maupun ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: "*Koordinasi antarinstansi*

sebenarnya sudah dilakukan, tetapi masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data dan pelaksanaan program di lapangan." (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar).

Selain itu, Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar menyampaikan bahwa: *"Setiap instansi memiliki program masing-masing sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar program tidak berjalan sendiri-sendiri."* (IW02, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar). Sejalan dengan hal tersebut, Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan Baitul Mal perlu terus diperkuat, terutama dalam penyelarasan data penerima manfaat agar program bantuan sosial dan zakat produktif dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Akademisi Ekonomi Syariah berpendapat bahwa: *"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ekonomi syariah masih perlu diperkuat agar strategi ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengangguran."* (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah). Beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan harapan agar kerja sama antar lembaga dapat ditingkatkan sehingga bantuan dan program pemberdayaan masyarakat dapat diterima secara lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi salah satu hambatan institusional dalam pelaksanaan

strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

Hambatan institusional lainnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program pemerintah daerah masih menghadapi kendala administratif dan kebijakan yang menyebabkan implementasi program belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Beberapa program membutuhkan regulasi yang lebih kuat agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan lebih optimal."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar).

Selain itu, Akademisi Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa: *"Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi terkait pengembangan ekonomi syariah agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki dukungan kebijakan yang lebih kuat."* (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah). Sementara itu, Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terdapat beberapa kendala administratif yang memerlukan dukungan regulasi yang lebih adaptif agar penyaluran bantuan produktif dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang kurang mendukung masih menjadi salah satu hambatan institusional dalam optimalisasi

strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Tidak semua aparatur memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa: *"Peningkatan kapasitas aparatur masih diperlukan, terutama dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah."* (IW01, Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar). Selain itu, Akademisi Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa: *"Pemahaman aparatur mengenai konsep dan implementasi ekonomi syariah masih perlu diperkuat agar program yang dijalankan dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah."* (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah)

Beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga memberikan tanggapan bahwa aparatur pemerintah diharapkan lebih aktif dalam melakukan pendampingan, sosialisasi, dan penyampaian informasi terkait berbagai program pemberdayaan yang tersedia bagi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur masih menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah, khususnya dalam

upaya mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan keberhasilan program pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya sistem monitoring dan evaluasi program masih belum berjalan secara optimal. Evaluasi program sering kali lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan dengan pengukuran dampak program terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa: *"Monitoring program telah dilakukan secara berkala, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam pengukuran dampak jangka panjang program terhadap masyarakat."* (IW03, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar).

Selain itu, Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa evaluasi program terus dilakukan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya. Sementara itu, Akademisi Ekonomi Syariah berpendapat bahwa: *"Evaluasi program seharusnya lebih menekankan pada outcome dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan hanya pada realisasi kegiatan atau penyerapan anggaran."* (IW05, Akademisi Ekonomi Syariah).

Beberapa masyarakat Kabupaten Aceh Besar juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih sering turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat serta melakukan pendampingan setelah program dilaksanakan agar manfaat program dapat berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi program pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar pelaksanaan strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis hasil wawancara, hambatan institusional yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi:

1. Koordinasi antarinstansi belum optimal.
2. Integrasi program antarinstansi masih lemah.
3. Sinkronisasi data penerima manfaat belum maksimal.
4. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi syariah masih terbatas.
5. Regulasi pendukung ekonomi syariah belum memadai.
6. Masih terdapat kendala administratif dalam pelaksanaan program.
7. Kapasitas aparatur dalam pengelolaan program ekonomi syariah masih terbatas.
8. Pemahaman aparatur mengenai ekonomi syariah belum optimal.

9. Pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang.
10. Monitoring belum mampu mengukur dampak jangka panjang program.
11. Evaluasi program belum sepenuhnya berorientasi pada outcome.
12. Monitoring lapangan dan pendampingan pascaprogram belum optimal.

Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan institusional yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, keterbatasan kapasitas aparatur, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kapasitas institusi pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih berorientasi pada dampak agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dapat tercapai secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang paling dominan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar adalah keterbatasan anggaran daerah dan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Keterbatasan fiskal menyebabkan jumlah, cakupan, dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hambatan ini diperkuat oleh ketimpangan akses masyarakat terhadap modal usaha dan peluang kerja, terutama di wilayah pedesaan, sehingga manfaat program belum merata. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi zakat produktif, infak, sedekah, dan instrumen ekonomi syariah lainnya dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

4.4 Tinjauan Maqasid Syariah

4.4.1 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari Maqasid Syariah

1. Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyusun perencanaan strategis yang cukup terarah dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Perencanaan tersebut ditunjukkan melalui adanya visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, analisis terhadap

kondisi sosial ekonomi masyarakat, penetapan prioritas program, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang telah direncanakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh Bryson (2018), bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan arah organisasi, menetapkan prioritas, serta mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan jangka panjang. Dalam sektor publik, perencanaan strategis menjadi instrumen penting untuk menjawab berbagai persoalan sosial melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis lingkungan strategis, serta perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Keberadaan RPJMD dan RKPD yang memuat program pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip perencanaan strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan analisis situasi sebelum menetapkan kebijakan. Rendahnya keterampilan tenaga kerja, tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor pekerjaan musiman, serta terbatasnya akses ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan program pelatihan kerja dan pemberdayaan usaha masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh

David et al (2017), bahwa keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis tersebut memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif maqasid syariah, perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Menurut Al-Syatibi (1997), tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Program pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah berkaitan erat dengan *hifz al-aql* karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kapasitas masyarakat tersebut memungkinkan individu memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pengembangan UMKM juga berkaitan dengan *hifz al-mal* karena bertujuan menjaga dan mengembangkan harta secara produktif serta mencegah masyarakat dari kondisi kemiskinan yang berkepanjangan.

Pemanfaatan zakat produktif sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah juga mencerminkan implementasi maqasid syariah. Penyaluran zakat yang bersifat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahiq, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi sehingga mustahiq berpotensi berubah menjadi muzakki. Hal tersebut sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan hidup yang layak serta menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia..."* (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mengelola sumber daya ekonomi secara seimbang antara orientasi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sosial.

Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."* (QS. An-Nahl [16]: 90). Prinsip keadilan dalam ayat tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Program penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dalam konteks Aceh, integrasi nilai-nilai syariah dalam perencanaan pembangunan memiliki legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah melalui zakat produktif, pemberdayaan UMKM syariah, dan program penguatan ekonomi umat merupakan bentuk implementasi kekhususan Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi program belum sepenuhnya merata. Masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh akses terhadap bantuan maupun program pemberdayaan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif dalam Islam belum terwujud secara optimal. Padahal, Rasulullah saw. bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar

memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan yang mengalami kemiskinan dan pengangguran.

Maka dapat dipahami bahwa perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip manajemen strategis dan maqasid syariah. Perencanaan yang dilakukan telah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, serta optimalisasi instrumen ekonomi syariah. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemerataan akses dan distribusi manfaat program agar tujuan pembangunan yang berkeadilan sebagaimana dikehendaki dalam maqasid syariah dapat tercapai secara optimal.

2. Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan telah menunjukkan karakteristik yang visioner dan partisipatif. Pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mengambil keputusan strategis dalam merespons kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar lembaga, percepatan implementasi program, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas masih diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih

efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994), yang menyatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menginspirasi pengikutnya melalui visi yang jelas, mendorong perubahan positif, serta memotivasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama, yaitu *idealized influence* (pengaruh ideal), *inspirational motivation* (motivasi inspiratif), *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual), dan *individualized consideration* (perhatian individual). Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencerminkan dimensi *inspirational motivation* melalui komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi syariah. Pemerintah berupaya mengembangkan berbagai program yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sesaat, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi. Pelaksanaan pelatihan kerja dan pemberdayaan usaha menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan menunjukkan adanya penerapan kepemimpinan partisipatif. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka

sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yang menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dilandasi oleh partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, serta penegakan hukum.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Allah Swt. berfirman: *"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..."* (QS. Āli 'Imrān [3]: 159). Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah menjadi instrumen penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif maqasid syariah, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Al-Syatibi (1997) menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemegang otoritas harus berorientasi pada perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Program pelatihan kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dengan tujuan *hifz al-aql* karena bertujuan meningkatkan kualitas

intelektual, keterampilan, dan kompetensi masyarakat agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan potensi akal manusia.

Program bantuan usaha dan zakat produktif berkaitan erat dengan *hifz al-mal* karena bertujuan melindungi serta mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan konsumtif, tetapi juga didorong untuk memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga terhindar dari kemiskinan. Berbagai program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga mencerminkan implementasi *hifz al-nafs*. Kemiskinan yang tidak tertangani dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat serta menurunkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan bagian dari perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Prinsip kepemimpinan sebagai amanah ditegaskan dalam firman Allah Swt.: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..."* (QS. An-Nisā' [4]: 58). Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah secara adil, profesional, dan

bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan daerah, amanah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program yang tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rasulullah saw. juga bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara amanah, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih memerlukan penguatan. Sinkronisasi program antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Baitul Mal, dan lembaga terkait lainnya belum berjalan secara optimal. Akibatnya, terdapat potensi tumpang tindih program maupun keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merumuskan visi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor.

Dalam perspektif teori kepemimpinan kolaboratif, Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun kerja sama antar aktor yang terlibat dalam

penyelesaian masalah publik. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

Beberapa masyarakat menilai bahwa pelaksanaan program tertentu masih berlangsung lambat dan belum sepenuhnya transparan, khususnya terkait pendataan penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Allah Swt. berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah..."* (QS. Al-Mā'idah [5]: 8). Ayat tersebut mengandung pesan bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pendistribusian bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Transparansi dalam proses pendataan dan penetapan penerima manfaat merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan tersebut.

Dalam konteks Aceh, penerapan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai syariah memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, kepemimpinan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari

keberhasilan administratif, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menunjukkan karakteristik kepemimpinan transformasional yang visioner dan partisipatif. Berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan optimalisasi ekonomi syariah merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif maqasid syariah, kebijakan tersebut telah mengarah pada upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Namun demikian, penguatan koordinasi antar lembaga, percepatan implementasi program, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas masih diperlukan agar prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan publik dapat terwujud secara lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar.

3. Fokus atau Tujuan Strategi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui pelatihan kerja, bantuan usaha, dan optimalisasi zakat produktif menunjukkan adanya komitmen dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, perlu adanya perluasan jangkauan program serta penguatan evaluasi berbasis dampak agar

manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori tujuan organisasi yang dikemukakan oleh Drucker (2007), bahwa tujuan yang jelas merupakan dasar dalam penyusunan strategi, pelaksanaan program, serta evaluasi keberhasilan organisasi. Drucker menegaskan bahwa tujuan organisasi harus bersifat spesifik, realistis, dan dapat diukur sehingga menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks pemerintah daerah, tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan menjadi arah utama dalam penyusunan program pembangunan ekonomi masyarakat.

Menurut Drucker (2007) tujuan diperlukan dalam setiap bidang di mana kinerja dan hasil secara langsung memengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, tujuan pembangunan daerah yang jelas memungkinkan terjadinya sinkronisasi program antar perangkat daerah sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan kerja, pemberian bantuan usaha, dan penguatan ekonomi syariah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat dipahami sebagai implementasi tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) yang

dikemukakan oleh Chambers (1995). Chambers menjelaskan bahwa pembangunan yang efektif bukan sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kemampuan, akses, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Menurut Chambers (1995) masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga kemampuan dan kesempatan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri.

Program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki daya saing dalam pasar kerja. Sementara itu, bantuan modal usaha dan zakat produktif bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan konsumtif. Dengan demikian, strategi pemerintah daerah telah mencerminkan pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, tujuan strategi pemerintah daerah tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kemiskinan dan pengangguran dapat mengancam terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan

pendapatan masyarakat merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Allah Swt. berfirman: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* (Q.S. an-Nisā' [4]: 5). Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta memiliki fungsi sosial sebagai sarana menopang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan bentuk implementasi dari tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Dalam kaitannya dengan hifz al-mal, Islam mendorong umat untuk bekerja dan berusaha secara produktif. Rasulullah Saw. bersabda: *"Sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di atas punggungnya untuk dijual sehingga Allah menjaga kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain."* (H.R. al-Bukhari, No. 1471). Hadis tersebut mengandung nilai penting mengenai kemandirian ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Oleh karena itu, program pelatihan kerja dan pemberdayaan usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga

memiliki dimensi ibadah karena mendorong masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui usaha yang halal dan produktif.

Pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar juga sejalan dengan tujuan maqasid syariah. Menurut Al-Syatibi (1997), seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syatibi menyatakan: "Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat." (al-Syatibi, 1997). Zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga membantu mereka membangun usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* secara bersamaan.

Dalam konteks Aceh, optimalisasi instrumen ekonomi syariah memperoleh legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat merupakan bentuk kelembagaan khas Aceh yang dapat berkontribusi dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Dari perspektif keadilan distributif dalam Islam, tujuan pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja dan bantuan usaha juga selaras dengan firman Allah Swt.: *"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7). Ayat tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang memberikan akses modal usaha kepada kelompok masyarakat miskin merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat program pemerintah belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja maupun bantuan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan strategis yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Dalam perspektif maqasid syariah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan yang merata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memperkuat sinergi dengan Baitul Mal dan berbagai lembaga ekonomi syariah lainnya.

Dengan demikian, fokus atau tujuan strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan optimalisasi instrumen ekonomi syariah. Dari perspektif teori tujuan organisasi dan pemberdayaan masyarakat, strategi tersebut telah menunjukkan orientasi yang tepat dalam pembangunan daerah. Sementara itu, dalam perspektif maqasid syariah, berbagai program yang dilaksanakan mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) melalui penciptaan kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan keadilan sosial. Namun demikian, peningkatan pemerataan manfaat program tetap diperlukan agar tujuan pembangunan yang berlandaskan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Upaya Pencapaian Strategi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, Upaya pencapaian strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan telah diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis syariah. Program-program tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pemerataan manfaat program, optimalisasi alokasi anggaran, serta penguatan sistem evaluasi agar

tujuan pembangunan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau komitmen pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Edward III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang berada di antara penetapan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, aspek komunikasi terlihat dari adanya sosialisasi program pelatihan kerja, bantuan usaha, dan program zakat produktif kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah berupaya menyampaikan berbagai informasi terkait program yang tersedia agar masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme dan persyaratan program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi di tengah masyarakat.

Aspek sumber daya juga menjadi faktor penting dalam implementasi strategi pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran daerah masih menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk berbagai program, jumlah penerima manfaat belum sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III bahwa ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana pendukung sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu, disposisi atau komitmen pelaksana tercermin dari upaya pemerintah daerah yang secara konsisten menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Aparatur pemerintah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelatihan, menyalurkan bantuan usaha, dan melaksanakan monitoring terhadap program yang telah dijalankan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan lembaga ekonomi syariah. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih program. Apabila struktur birokrasi terlalu kompleks tanpa koordinasi yang efektif, maka implementasi kebijakan dapat

mengalami hambatan. Oleh karena itu, penguatan integrasi antar lembaga menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Pelatihan kerja membantu masyarakat memperoleh keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki pasar kerja maupun membangun usaha mandiri. Bantuan modal usaha dan zakat produktif juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah telah menghasilkan outcome berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bertambahnya peluang usaha masyarakat, serta meningkatnya kemampuan ekonomi sebagian rumah tangga miskin. Dengan demikian, implementasi program tidak hanya menghasilkan output berupa terlaksananya kegiatan, tetapi juga memberikan perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Chambers (1995), bahwa keberhasilan pembangunan harus dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menentukan masa depannya secara mandiri.

Program bantuan usaha, zakat produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap harta. Islam mendorong umatnya untuk memperoleh penghasilan melalui usaha yang halal dan produktif agar tercipta kemandirian ekonomi. Allah Swt. berfirman: *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya."* (Q.S. al-Mulk [67]: 15). Ayat tersebut mengandung perintah untuk berusaha dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk berwirausaha melalui bantuan modal dan zakat produktif merupakan implementasi nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi.

Al-Syatibi (1997) menjelaskan bahwa pemeliharaan harta bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui aktivitas ekonomi yang sah dan bermanfaat. Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya merealisasikan *hifz al-mal*. Kemiskinan sering kali menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, bantuan sosial dan program peningkatan pendapatan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa masyarakat.

Allah Swt. berfirman: *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S. an-Nisā' [4]: 29). Meskipun ayat tersebut secara tekstual melarang

tindakan membahayakan diri sendiri, para ulama maqāsid memahami bahwa menjaga kehidupan manusia juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat dapat hidup secara layak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan merupakan bagian dari upaya mewujudkan *hifz al-nafs*. Pelatihan kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga mengembangkan kapasitas intelektual dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap akal.

Allah Swt. berfirman: "*Katakanlah: apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?*" (Q.S. az-Zumar [39]: 9). Ayat tersebut menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *hifz al-aql*, karena mendorong masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Ibn Asyur (2006), maqasid syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada pengembangan potensi manusia agar mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Dengan demikian, investasi pemerintah dalam bidang pelatihan dan pengembangan keterampilan merupakan bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan yang lebih luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program telah dilakukan secara berkala melalui monitoring kegiatan, penyusunan laporan, serta peninjauan lapangan. Akan tetapi, evaluasi masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan realisasi anggaran dibandingkan dengan pengukuran dampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam perspektif good governance, evaluasi berbasis outcome menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dinilai berdasarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif maqasid syariah, evaluasi program merupakan bentuk amanah dan mas'uliyah (tanggung jawab) pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Rasulullah Saw. bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada outcome perlu diperkuat agar tujuan pembangunan yang berlandaskan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks Aceh, evaluasi berbasis maqasid syariah dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana program pemerintah mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari indikator ekonomi semata, tetapi juga dari tercapainya tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Maka, dapat dipahami bahwa upaya pencapaian strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi syariah yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edward III, pelaksanaan program menunjukkan adanya komitmen pemerintah, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, koordinasi birokrasi, dan pemerataan manfaat program. Sementara itu, dalam perspektif maqasid syariah, berbagai program tersebut mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-aql*) melalui peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan evaluasi berbasis outcome, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi instrumen ekonomi syariah, serta perluasan jangkauan program menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan yang berorientasi pada

kemaslahatan masyarakat Aceh Besar dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan maqasid syariah, strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan pada aspek perencanaan, kepemimpinan, fokus atau tujuan, serta upaya pencapaian pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, terutama *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan mendukung *hifz al-aql*, sedangkan bantuan usaha, pemberdayaan UMKM, dan zakat produktif mendukung *hifz al-mal* sekaligus *hifz al-nafs* melalui peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan berorientasi pada amanah serta keadilan juga memperkuat terwujudnya kemaslahatan publik. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, kapasitas aparatur, pemerataan akses program, serta monitoring dan evaluasi yang belum sepenuhnya berbasis *outcome*. Oleh karena itu, optimalisasi instrumen ekonomi syariah, perluasan jangkauan program, penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, serta evaluasi berbasis maqasid syariah diperlukan agar kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan tidak hanya menghasilkan program secara administratif, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan,

kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dapat ditinjau dari perspektif maqasid syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan terhadap kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kemandirian ekonomi. Implementasi tersebut tercermin dalam beberapa aspek maqasid syariah sebagai berikut:

1. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

- Penanggulangan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- Bantuan sosial dan peningkatan pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
- Pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

2. Hifz al-Aql (Menjaga Akal)

- Pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
- Pengembangan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia.
- Peningkatan kompetensi agar masyarakat memiliki daya saing dan akses terhadap pekerjaan yang layak.

3. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

- Bantuan modal usaha dan pengembangan UMKM.

- Optimalisasi zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.
 - Pengembangan usaha produktif dan ekonomi berbasis syariah.
 - Perluasan akses masyarakat terhadap sumber pendapatan dan pembiayaan.
4. Kemaslahatan (*Jalb al-Maṣāliḥ*)
- Kebijakan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
 - Integrasi program pemerintah dengan instrumen ekonomi syariah.
 - Penciptaan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Keadilan (*‘Adl*)
- Pemerataan akses terhadap pelatihan, bantuan usaha, dan program pemberdayaan.
 - Penyaluran bantuan berdasarkan kebutuhan dan data penerima manfaat.
 - Pengurangan kesenjangan ekonomi agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.
6. Amanah dan *Mas’uliyah* (Tanggung Jawab)
- Pemerintah bertanggung jawab memastikan program tepat sasaran.
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

- Monitoring dan evaluasi diarahkan tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pada dampak terhadap masyarakat.

4.4.2 Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah Untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Maqasid Syariah

1. Hambatan Struktural

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan struktural yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur ekonomi, serta keterbatasan anggaran dan ketergantungan fiskal. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga ekonomi syariah, akademisi, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Aceh Besar memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap modal usaha, pelatihan kerja, kesempatan kerja, maupun program pemberdayaan ekonomi.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah yang relatif sulit dijangkau cenderung menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat di wilayah yang lebih maju. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2020), yang menyatakan bahwa kemiskinan sering kali disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi dan terbatasnya akses kelompok miskin terhadap kesempatan produktif. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat rendahnya pendapatan, tetapi juga disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap peluang, aset, dan sumber daya produktif.

Dalam konteks Aceh Besar, keterbatasan akses terhadap modal usaha menyebabkan sebagian masyarakat sulit mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Akibatnya, masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan dan pengangguran. Dari perspektif maqasid syariah, ketimpangan akses ekonomi dapat menghambat terwujudnya *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Islam mengajarkan bahwa distribusi kekayaan harus berlangsung secara adil agar tidak terjadi pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Allah Swt. berfirman: *"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7). Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu tujuan syariat adalah menciptakan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab

untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin memperoleh akses yang memadai terhadap sumber-sumber ekonomi. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2011), keadilan distributif dalam Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, dan kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok lemah.

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mengurangi pengangguran. Sebagian masyarakat belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Temuan ini sesuai dengan Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Schultz (1961). Schultz menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Schultz (1961) menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia merupakan penjelasan utama atas meningkatnya pendapatan per kapita. Dengan demikian, rendahnya kualitas SDM akan berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan hifz al-aql (perlindungan terhadap akal). Islam sangat mendorong peningkatan ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia sebagai sarana mencapai kesejahteraan. Allah Swt. berfirman: *"Katakanlah: apakah sama orang-orang yang*

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (Q.S. az-Zumar [39]: 9). Ayat tersebut menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, program pendidikan, pelatihan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan maqasid syariah. Ibn Asyur (2006) menjelaskan bahwa pemeliharaan akal tidak hanya berarti melindungi manusia dari hal-hal yang merusak akal, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas intelektual agar manusia mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur ekonomi, seperti akses jalan, fasilitas pemasaran, sarana produksi, dan jaringan distribusi, masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Temuan ini sesuai dengan teori pembangunan wilayah yang menempatkan infrastruktur sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan menurunkan biaya transaksi ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2020), infrastruktur memiliki peran penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas individu maupun pelaku usaha. Keterbatasan infrastruktur dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan produk dan memperoleh akses terhadap berbagai layanan ekonomi.

Dalam perspektif maqasid syariah, pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bagian dari upaya mewujudkan masalah 'āmmah (kemaslahatan umum). Kaidah fikih menyatakan: *"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."* Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkeadilan.

Hambatan struktural lainnya yang ditemukan dalam penelitian adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam memperluas cakupan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga memengaruhi fleksibilitas daerah dalam menjalankan berbagai program. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai.

Dalam konteks Aceh, kondisi tersebut membuka peluang untuk mengoptimalkan instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan sosial alternatif. Allah Swt. berfirman: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (Q.S. at-Taubah [9]: 103). Ayat tersebut

menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menurut al-Qaradawi (2011), zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial apabila dikelola secara profesional.

Dalam konteks Aceh, keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendukung program pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan struktural harus dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan akses ekonomi masyarakat, penguatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi instrumen ekonomi syariah. Langkah tersebut penting agar prinsip keadilan sosial ('adl) dan kemaslahatan (maṣlahah) dalam Islam dapat diwujudkan secara nyata dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Aceh, integrasi kebijakan pembangunan dengan nilai-nilai maqasid syariah dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Dengan demikian, strategi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akan lebih berorientasi pada penciptaan keadilan sosial dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

2. Hambatan Institusional

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan institusional yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, keterbatasan kapasitas aparatur, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kapasitas institusi pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih berorientasi pada dampak agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dapat tercapai secara lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, seperti pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Baitul Mal, dan lembaga terkait lainnya belum berjalan secara optimal. Sinkronisasi data penerima manfaat, integrasi program, serta pembagian peran antar institusi masih menghadapi berbagai kendala. Akibatnya, pelaksanaan program sering kali bersifat parsial dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Temuan tersebut sejalan dengan teori *Collaborative*

Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyatakan bahwa penyelesaian persoalan publik memerlukan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan pengaturan pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor secara langsung dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Kabupaten Aceh Besar, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, Baitul Mal, lembaga pendidikan, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi ekonomi syariah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dari perspektif *maqasid syariah*, kolaborasi kelembagaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum. Islam mendorong kerja sama dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt.: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." (QS. *al-Mā'idah* [5]: 2). Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antarpihak merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang mendukung optimalisasi ekonomi syariah masih memerlukan

penguatan. Beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum memiliki dasar hukum teknis yang memadai sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran regulasi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan publik. Dalam teori kelembagaan (*institutional theory*), North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan aturan main" (*rules of the game*) yang membentuk interaksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.

Dalam konteks Aceh, penguatan regulasi memiliki dasar yang kuat karena Aceh memperoleh kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun qanun yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk optimalisasi zakat produktif, wakaf produktif, dan penguatan UMKM syariah. Dari perspektif *maqasid syariah*, regulasi merupakan instrumen untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah terjadinya kemudharatan. Kaidah fikih menyebutkan bahwa Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap regulasi yang dibuat pemerintah harus berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola

program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Pemahaman mengenai konsep ekonomi syariah, teknik pendampingan usaha, serta pengukuran dampak program masih perlu ditingkatkan. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori Capacity Building dari Grindle (1997), yang menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu, organisasi, dan sistem dalam melaksanakan fungsinya secara efektif. Grindle (1997) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan yang mendesak agar berbagai program ekonomi syariah dapat dijalankan secara profesional.

Dalam Islam, kompetensi merupakan syarat penting dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* (QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26). Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab harus memiliki dua karakter utama, yaitu al-quwwah (kompetensi) dan al-amanah (integritas).

Dalam perspektif *maqasid syariah*, peningkatan kapasitas aparatur berkaitan dengan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) melalui penguatan pengetahuan dan kompetensi, serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) melalui pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan bertanggung jawab. Temuan penelitian menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi program masih lebih banyak berorientasi pada aspek administratif, seperti realisasi

anggaran dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, pengukuran terhadap dampak program dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan pendekatan Results-Based Management (RBM) yang menekankan pada pencapaian hasil (*results*) dan dampak (*impact*), bukan hanya keluaran (*output*).

Menurut UNDP (2009), melalui evaluasi berbasis dampak, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw. bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).* Hadis tersebut menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Allah Swt. berfirman: *"...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..." (QS. an-Nisā' [4]: 58).* Prinsip amanah dan keadilan tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Secara keseluruhan, hambatan institusional yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa

optimalisasi peran ekonomi syariah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antar lembaga, dukungan regulasi, kapasitas aparatur, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada dampak.

Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, penguatan kelembagaan tersebut menjadi sangat penting agar instrumen ekonomi syariah, seperti zakat produktif, infak, sedekah, dan wakaf produktif, dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang berkeadilan dan sejalan dengan *maqasid syariah* dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan tinjauan *maqasid syariah*, hambatan struktural dan institusional dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah di Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya berkaitan dengan belum optimalnya upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keadilan sosial (*‘adl*). Hambatan struktural berupa ketimpangan akses ekonomi, rendahnya kualitas SDM, keterbatasan infrastruktur, serta keterbatasan anggaran terutama berdampak pada *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Sementara itu, hambatan institusional berupa

lemahnya koordinasi, keterbatasan regulasi, kapasitas aparatur, serta monitoring dan evaluasi yang belum berbasis dampak menunjukkan perlunya penguatan amanah, akuntabilitas, kompetensi, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan akses ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, pemerataan infrastruktur, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, penguatan koordinasi kelembagaan, serta evaluasi berbasis *outcome* menjadi langkah penting agar kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan dapat lebih sesuai dengan tujuan maqasid syariah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

1. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
- Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.
- Pengurangan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.

2. Hifz al-Aql (Menjaga Akal)

- Peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja.
- Penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur.
- Peningkatan kompetensi untuk menghadapi kebutuhan pasar kerja.

3. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

- Pemerataan akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi.
- Pengembangan usaha produktif dan UMKM.
- Optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.
- Pengelolaan anggaran dan sumber daya publik secara efektif.

4. Keadilan (*'Adl*)

- Pemerataan akses program pemberdayaan ekonomi.
- Pengurangan ketimpangan ekonomi dan wilayah.
- Distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata.

5. Kemaslahatan (*Maṣlahah*)

- Penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung masyarakat.
- Sinergi pemerintah, Baitul Mal, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Pengembangan ekonomi syariah untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Amanah dan Akuntabilitas (*Mas'uliyah*)

- Penguatan koordinasi dan tata kelola kelembagaan.
- Transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran.
- Monitoring dan evaluasi yang mengukur dampak nyata program terhadap pengangguran dan kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Pada Kabupaten Aceh Besar), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dilaksanakan melalui perencanaan dalam RPJMD, RKPD, dan program perangkat daerah yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pemberdayaan usaha, penguatan ekonomi syariah, serta optimalisasi zakat produktif. Strategi tersebut didukung kepemimpinan yang visioner dan partisipatif melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pelatihan, bantuan modal, bantuan sosial, dan zakat produktif. Dalam perspektif maqasid syariah, strategi ini sejalan dengan hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-aql dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya lebih merata.

2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengoptimalkan ekonomi syariah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan meliputi hambatan struktural, seperti ketimpangan akses ekonomi, rendahnya kualitas SDM, keterbatasan infrastruktur, serta keterbatasan anggaran, dan hambatan institusional berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, regulasi dan kapasitas aparatur yang belum optimal, serta monitoring dan evaluasi yang masih berorientasi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, kapasitas SDM, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Di sisi lain, zakat produktif, infak, sedekah, wakaf produktif, dan pengembangan usaha berbasis syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan daerah dapat mendorong kesejahteraan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui perluasan jangkauan pelatihan kerja, peningkatan bantuan usaha produktif, serta penguatan pendampingan kepada masyarakat penerima

manfaat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pemerataan akses program agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau.

2. Bagi lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif secara profesional, transparan, dan berkelanjutan melalui penguatan pendampingan usaha, peningkatan kualitas data mustahiq, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang lebih inovatif. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui integrasi data penerima manfaat, penyelarasan program antarinstansi, serta pengembangan regulasi yang mendukung optimalisasi ekonomi syariah di Kabupaten Aceh Besar. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi syariah juga perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

4. Bagi pemerintah daerah dalam aspek monitoring dan evaluasi, perlu dikembangkan sistem evaluasi berbasis outcome yang tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan, tetapi juga mengukur dampak nyata program terhadap penurunan angka pengangguran, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat program.
5. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar, diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga ekonomi syariah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, serta pemanfaatan berbagai fasilitas pemberdayaan yang tersedia guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2011). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asyrorroji, J (2025). Income's Moderating Role in Indonesian Poverty Dynamics: Population, Human Development and Unemployment in an Islamic Economics Perspective. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 11(2), 69-87.
- Asy-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29-47.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2024). Aceh Besar Dalam Angka 2024 (Publikasi statistik daerah, indikator ketenagakerjaan).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2025). Profil Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar. Tersedia secara daring: <https://acehbesarkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/2437ab698cab28ff2034af6f/profil-kemiskinan-kabupaten-aceh-besar.html>

Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: BPS.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Chambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Brighton: Institute of Development Studies.

David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2017). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. 16th Edition. Boston: Pearson.

Drucker, P. F. (2007). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper Business.

Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233-250.

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

- Fauzan, R., Pratama, A., & Lestari, D. (2022). Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 145–158.
- Fitriani, Y., Usman, U., Rahim, A., & Nurmallasari, N. (2020). Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 175-184.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.
- Hakim, N., & Firmani, P. S. (2025). Kepedulian Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *PROSPEK*, 4(1), 127-133.
- Hen, M. A. (2021). Fenomena Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Upaya Pengentasannya Dari Perspektif Sila Kedua Pancasila (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57-74.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Ibn Asyur, Muhammad Al-Tahur (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Jumiati, S.E (2023). The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs). *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Maulana, R., & Yusuf, M. (2022). Optimalisasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 55–68.
- Miles, M, A, M., Huberman, and J. Saldana. (2014). *Qualitative data analysis A methods sourcebook Ed.3*. America: Sage publications
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosda Karya.
- Mulyadi, M. (2017). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221-236.
- Nasution, R., & Marliyah, M. (2023). Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 810-823.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nur, S. K., & Shodiqin, D. H. (2022). Peran Nilai-Nilai Maqhasid Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid 19. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 105-115.
- Premi, A. (2024). Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia; Telaah dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* Учредители: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas' udiyah Sukabumi, 3(2), 115-134.

- Rahmawati, N., & Hidayat, R. (2021). Kemiskinan multidimensional dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 101–114.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19-34.
- Sambaulu, R. A., Rotinsulu, T. O., & Lopian, A. L. C. P. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 37-48.
- Sari, D. P., & Nasution, A. H. (2023). Konsep masalah dalam kebijakan publik perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(1), 23–38.
- Sari, D., Aulia, N., & Rianto, M. (2024). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 1(3), 259-266.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).
- Schultz, T. W. (1961). "Investment in Human Capital." *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Sudaryanto, T., & Rusastra, I. W. (2006). Kebijakan strategis usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(4), 115-122.

- Sugianto, S., & Yul, Y. T. P. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Ikraith-Ekonomika*, 3(2), 54-63.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Susanti, E. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 11(1), 1-9.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. 13th Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2009). *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*. New York: UNDP.
- Wahhab, H.A.A., Dea Dahlia, & Muhammad Nur Rianto Al Arif. (2023). Indonesian Government Policies in Overcoming Post-COVID-19 Unemployment from an Islamic Economic Perspective. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Yogasnumurti, R. R., Hafizh, M., Zain, T. S., & Yuvita, H. (2023). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 83-94.
- Yulianto, A., Kamaluddin, S. S., Kamalia Sani, S. E. I., Anna Zakiyah Hastriana, M. E. I., Rahmatillah, M. N., Adawiyah, R. A., ... & Siti Nur Indah Rofiqoh, M. M. (2025). *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika.

Yusuf al-Qaradawi. (2011). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yuwono, C., Kuswianto, D., Ariyanti, O., Sujud, F. A., & Nurromdhona, D. S. (2025). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir: Studi Kasus pada 33 Provinsi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31.



Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Tinjauan Maqasid Syariah

Fokus I : Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. Perencanaan

Kejelasan Visi dan Misi Perencanaan
(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana visi dan misi pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat?
2. Sejauh mana visi dan misi tersebut diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan?
3. Bagaimana proses penyusunan visi dan misi dilakukan agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat?

Analisis Situasi

(Prinsip: Keadilan & Transparansi)

1. Bagaimana pemerintah daerah melakukan analisis kondisi pengangguran dan kemiskinan agar kebijakan yang dirumuskan tepat dan adil?
2. Data apa yang digunakan dalam analisis tersebut, dan apakah data tersebut terbuka serta dapat diverifikasi?
3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan teridentifikasi secara objektif dan tidak diskriminatif?

Prioritas Kebijakan Strategis

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana pemerintah menentukan prioritas program agar distribusi kebijakan berjalan adil dan tidak berpihak pada kelompok tertentu?
2. Apakah prioritas kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat?
3. Bagaimana proses penetapan prioritas dilakukan secara transparan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait?

Rencana Tindak Lanjut Tertulis

(Prinsip: Transparansi & Akuntabilitas)

1. Apakah strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran dituangkan dalam dokumen resmi yang dapat diakses publik?
2. Apakah dokumen tersebut memuat indikator keberhasilan yang jelas sebagai bentuk akuntabilitas program?
3. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab?

B. Kepemimpinan

Gaya Kepemimpinan Visioner dan Partisipatif

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala daerah dalam mengarahkan strategi pengentasan pengangguran dan kemiskinan agar mencerminkan prinsip keadilan sosial?
2. Sejauh mana pemimpin daerah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan sebagai bentuk partisipasi yang adil?
3. Bagaimana kepemimpinan tersebut memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas?

Koordinasi Lintas Sektor

(Prinsip: Keadilan & Akuntabilitas)

1. Bagaimana koordinasi antara dinas atau lembaga terkait dilakukan untuk memastikan program berjalan secara adil dan tidak tumpang tindih?
2. Sejauh mana kerja sama dengan lembaga ekonomi syariah (seperti Baitul Mal atau koperasi syariah) mendukung kemaslahatan masyarakat?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban antar lembaga dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran?

Keputusan Strategis Tepat Waktu

(Prinsip: Kemaslahatan & Akuntabilitas)

1. Bagaimana pimpinan daerah memastikan bahwa keputusan strategis diambil secara cepat dan tepat demi kemaslahatan masyarakat?
2. Apa pertimbangan utama dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas keputusan yang telah diambil?

Komitmen Publik dan Transparansi

(Prinsip: Transparansi & Akuntabilitas)

1. Bagaimana pimpinan daerah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran?
2. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran dan capaian program sebagai bentuk transparansi?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pimpinan kepada publik atas hasil atau kegagalan program yang dijalankan?

C. Fokus/Tujuan

Spesifikasi Tujuan Kebijakan

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana tujuan kebijakan pemerintah daerah dirumuskan agar mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat?
2. Sejauh mana tujuan tersebut diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan?
3. Bagaimana tujuan kebijakan disusun agar jelas dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan serta masyarakat luas?

Kriteria SMART Tujuan

(Prinsip: Akuntabilitas & Transparansi)

1. Apakah tujuan kebijakan ditetapkan dengan kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sehingga dapat dipertanggungjawabkan?
2. Bagaimana mekanisme publikasi tujuan agar masyarakat dapat memahami sasaran program secara transparan?
3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan dapat diukur pencapaiannya secara akuntabel?

Sinkronisasi Tujuan dengan Dokumen Perencanaan

(Prinsip: Transparansi & Akuntabilitas)

1. Bagaimana tujuan kebijakan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD atau Renstra?
2. Apakah sinkronisasi tersebut dicatat dalam dokumen resmi yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi?
3. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah terhadap pencapaian tujuan yang telah disinkronkan?

Target Outcome yang Ditetapkan
(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana target outcome ditetapkan untuk memastikan manfaatnya adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan?
2. Apakah target outcome dirancang untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat?
3. Bagaimana pencapaian target outcome dimonitor dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada publik?

D. Upaya Pencapaian

Kuantitas Program Implementasi
(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Berapa jumlah program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dan bagaimana distribusinya agar adil bagi seluruh masyarakat?
2. Apakah program yang dijalankan dirancang untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan?
3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua program yang dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan pemerataan manfaatnya?

Output Realisasi Anggaran
(Prinsip: Transparansi & Akuntabilitas)

1. Bagaimana realisasi anggaran program pengentasan pengangguran dan kemiskinan dilaporkan secara terbuka kepada publik?
2. Apakah penggunaan anggaran mengikuti rencana tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel?
3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip keadilan?

Hasil Capaian (Outcome)

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Sejauh mana program yang dilaksanakan berhasil menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara adil di seluruh kelompok masyarakat?
2. Apakah capaian program memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan?
3. Bagaimana pemerintah mengevaluasi apakah outcome program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan prinsip ekonomi syariah?

Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

(Prinsip: Transparansi & Akuntabilitas)

1. Bagaimana mekanisme evaluasi program dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas?
2. Apakah hasil evaluasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait?
3. Bagaimana perbaikan program dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat di masa mendatang?

Fokus II : Hambatan Struktural Dan Institusional Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah Untuk Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Dari Maqasid Syariah.

A. Struktural

Ketimpangan Akses Ekonomi

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana pemerintah daerah menilai ketimpangan akses masyarakat terhadap modal usaha, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya?

2. Apakah ketimpangan tersebut memengaruhi distribusi manfaat ekonomi syariah, misalnya pembiayaan syariah atau zakat produktif?
3. Bagaimana pemerintah berupaya agar akses ekonomi lebih adil dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan?

Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana pemerintah menilai kualitas SDM di Aceh Besar terkait keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung ekonomi syariah?
2. Apakah rendahnya kualitas SDM memengaruhi keadilan dalam kesempatan kerja dan partisipasi ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM agar memberi kemaslahatan yang merata bagi masyarakat?

Ketimpangan Infrastruktur Ekonomi

(Prinsip: Keadilan & Transparansi)

1. Bagaimana pemerintah menilai ketersediaan dan pemerataan infrastruktur ekonomi seperti pasar, pelatihan kerja, dan akses transportasi?
2. Apakah infrastruktur yang tidak merata menghambat distribusi manfaat ekonomi syariah secara adil?
3. Bagaimana pemerintah menyampaikan informasi terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur secara transparan kepada masyarakat?

Keterbatasan Anggaran dan Ketergantungan Fiskal

(Prinsip: Akuntabilitas & Transparansi)

1. Bagaimana keterbatasan anggaran daerah memengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis ekonomi syariah?
2. Bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran agar tetap akuntabel meski anggaran terbatas?

3. Bagaimana mekanisme transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk dana transfer pusat, untuk memastikan program berjalan efektif?

B. Institusional

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

1. Bagaimana pemerintah menilai koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis ekonomi syariah?
2. Apakah lemahnya koordinasi menghambat pemerataan manfaat program sehingga prinsip keadilan sulit tercapai?
3. Bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kerja sama antar lembaga agar program memberikan kemaslahatan yang optimal bagi masyarakat?

Regulasi yang Kurang Mendukung

(Prinsip: Keadilan & Transparansi)

1. Bagaimana regulasi daerah saat ini mendukung atau membatasi implementasi ekonomi syariah dalam program pengentasan pengangguran dan kemiskinan?
2. Apakah kurangnya regulasi yang jelas menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan program bagi kelompok masyarakat tertentu?
3. Bagaimana pemerintah memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku sebagai bentuk transparansi?

Keterbatasan Kapasitas Aparatur

(Prinsip: Keadilan & Kemaslahatan)

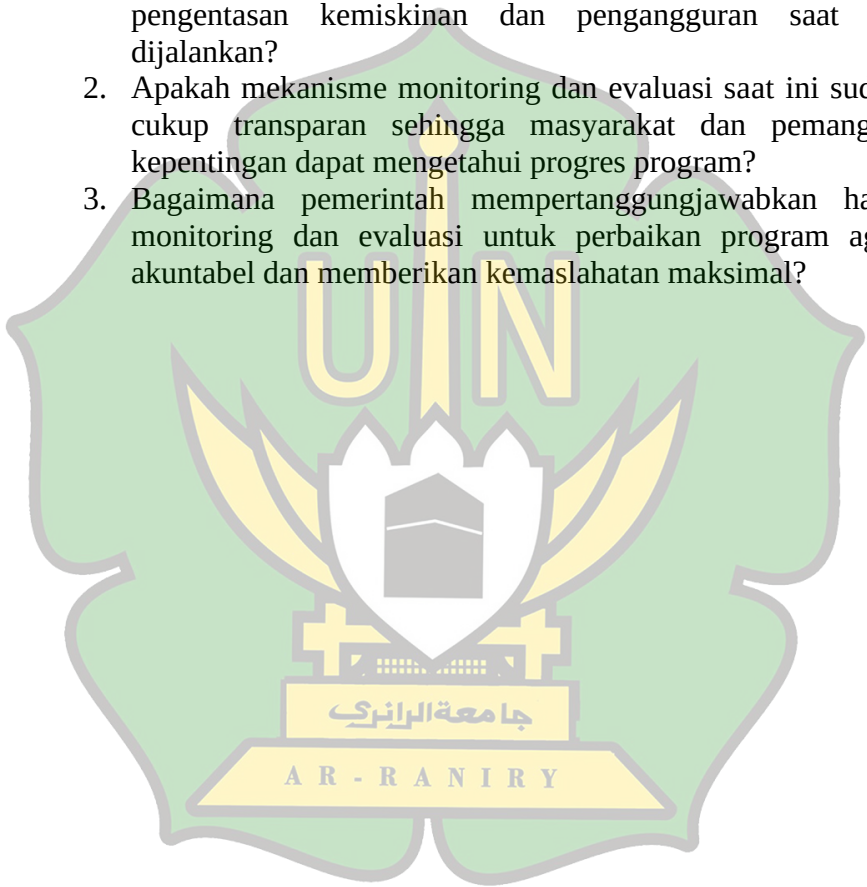
1. Bagaimana kapasitas aparatur pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program ekonomi syariah?
2. Apakah keterbatasan kapasitas SDM menghambat pelayanan adil bagi seluruh masyarakat dan penerapan prinsip kemaslahatan?

3. Bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitas aparatur agar program lebih efektif dan memberi manfaat merata?

Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Belum Optimal

(Prinsip: Transparansi & Akuntabilitas)

1. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran saat ini dijalankan?
2. Apakah mekanisme monitoring dan evaluasi saat ini sudah cukup transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui progres program?
3. Bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program agar akuntabel dan memberikan kemaslahatan maksimal?



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW01 (Aparatur pemerintahan Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Bagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat?

Informan : Terima kasih. Pada dasarnya visi pembangunan Kabupaten Aceh Besar selalu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Dalam proses penyusunan RPJMD, kami berupaya memastikan bahwa setiap sasaran pembangunan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin, penganggur, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.

Peneliti : Bagaimana proses penyusunan visi dan misi dilakukan agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat?

Informan : Proses penyusunan visi dan misi tidak dilakukan secara tertutup. Kami memulai dari pengumpulan data pembangunan, evaluasi RPJMD sebelumnya, kajian akademik, kemudian dilanjutkan melalui forum Musrenbang yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam forum tersebut hadir unsur DPRK, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi

perempuan, organisasi pemuda, pelaku usaha, hingga pemerintah gampong.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah melakukan analisis kondisi pengangguran dan kemiskinan agar kebijakan yang dirumuskan tepat dan adil?

Informan : Sebelum menetapkan suatu kebijakan, kami selalu melakukan analisis berbasis data. Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik, perangkat daerah teknis, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, serta hasil verifikasi lapangan. Kami juga menggunakan hasil evaluasi program tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui apakah suatu intervensi telah efektif atau masih memerlukan perbaikan.

Peneliti : Data apa yang digunakan dalam analisis tersebut, dan apakah data tersebut terbuka serta dapat diverifikasi?

Informan : Data utama yang kami gunakan meliputi data Badan Pusat Statistik, data Regsosek apabila tersedia untuk keperluan perencanaan, data perangkat daerah, serta data administratif dari pemerintah gampong. Seluruh data tersebut dibandingkan dan diverifikasi agar memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat

Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan teridentifikasi secara objektif dan tidak diskriminatif?

Informan : Identifikasi kelompok rentan dilakukan melalui proses verifikasi berlapis. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber data, tetapi juga melibatkan pemerintah kecamatan, aparatur gampong, pendamping sosial, dan perangkat daerah terkait agar data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. Kelompok seperti keluarga miskin, penganggur usia produktif, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan kepala keluarga, dan

masyarakat di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan.

Peneliti : Apakah prioritas kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat?

Informan : Ya, seluruh program pembangunan pada prinsipnya tidak hanya dirancang untuk memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Kami menyadari bahwa pemberian bantuan sosial memang penting untuk mengurangi beban masyarakat miskin, namun apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka masyarakat akan terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Peneliti : Apakah strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran dituangkan dalam dokumen resmi yang dapat diakses publik?

Informan : Ya, seluruh strategi pembangunan daerah, termasuk strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan resmi pemerintah daerah. Dokumen tersebut meliputi RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD, hingga dokumen penganggaran yang menjadi dasar pelaksanaan program setiap tahunnya. Keberadaan dokumen tersebut sangat penting karena menjadi pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab?

Informan : Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pembangunan daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui

rapat koordinasi, evaluasi kinerja perangkat daerah, monitoring lapangan, serta penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap triwulan maupun tahunan. Selain evaluasi internal, pemerintah juga menerima pengawasan dari DPRK, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta berbagai bentuk pengawasan masyarakat.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana gaya kepemimpinan kepala daerah dalam mengarahkan strategi pengentasan pengangguran dan kemiskinan agar mencerminkan prinsip keadilan sosial?

Informan : Kepemimpinan kepala daerah selama ini lebih mengedepankan pendekatan yang visioner sekaligus kolaboratif. Artinya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam setiap penyusunan kebijakan, Bupati selalu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

Peneliti : Bagaimana koordinasi antara dinas atau lembaga terkait dilakukan untuk memastikan program berjalan secara adil dan tidak timpang tindih?

Informan : Sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi perencanaan pembangunan, Bappeda berperan memastikan seluruh perangkat daerah memiliki arah kebijakan yang selaras. Koordinasi dilakukan sejak tahap penyusunan rencana kerja, pembahasan program, penganggaran, hingga evaluasi pelaksanaan

kegiatan. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyampaikan rencana program beserta indikator kinerjanya.

Peneliti : Sejauh mana kerja sama dengan lembaga ekonomi syariah, seperti Baitul Mal atau koperasi syariah, mendukung kemaslahatan masyarakat?

Informan : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memandang bahwa lembaga ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dengan Baitul Mal, koperasi syariah, lembaga keuangan syariah, serta berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat terus diperkuat. Baitul Mal, misalnya, memiliki kontribusi dalam penyaluran zakat produktif kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Peneliti : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban antar lembaga dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pelaksanaan program dilaporkan secara berkala melalui laporan kinerja, laporan realisasi anggaran, serta forum evaluasi pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah daerah. Selain pertanggungjawaban administratif, setiap perangkat daerah juga harus menjelaskan capaian program, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut apabila target belum tercapai.

Peneliti : Apa pertimbangan utama dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat?

Informan : Pertimbangan utama adalah kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta manfaat yang akan dihasilkan dari kebijakan tersebut. Pemerintah selalu berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil

memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Peneliti : Bagaimana mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas keputusan yang telah diambil?

Informan : Evaluasi dilakukan melalui pemantauan indikator kinerja, evaluasi pelaksanaan program, kunjungan lapangan, serta pembahasan bersama perangkat daerah terkait. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar apakah suatu kebijakan perlu dilanjutkan, diperluas, disempurnakan, atau bahkan dihentikan.

Peneliti : Bagaimana pimpinan daerah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Pemerintah daerah berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai arah pembangunan, dokumen perencanaan, capaian kinerja, serta pelaksanaan program dipublikasikan melalui berbagai media resmi pemerintah daerah sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

Peneliti : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pimpinan kepada publik atas hasil atau kegagalan program yang dijalankan?

Informan : Setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah menyusun berbagai laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian pembangunan, realisasi anggaran, indikator kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah maupun DPRK dalam menentukan arah kebijakan berikutnya.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Informan : Pemerintah daerah berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Bagaimana tujuan kebijakan pemerintah daerah dirumuskan agar mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat?

Informan : Perumusan tujuan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui proses yang sistematis dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan nasional, Pemerintah Aceh, serta kondisi objektif Kabupaten Aceh Besar. Sebelum tujuan pembangunan ditetapkan, kami terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap berbagai persoalan strategis daerah, termasuk tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan.

Peneliti : Sejauh mana tujuan tersebut diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan?

Informan : Seluruh tujuan pembangunan daerah pada dasarnya diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kami menyadari bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, hingga stabilitas sosial. Karena itu, berbagai program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.

Peneliti : Bagaimana mekanisme publikasi tujuan agar masyarakat dapat memahami sasaran program secara transparan?

Informan : Pemerintah daerah berupaya menyampaikan arah pembangunan melalui berbagai media komunikasi, baik melalui dokumen perencanaan, forum Musrenbang, rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, maupun media informasi resmi pemerintah daerah. Selain itu, perangkat daerah juga menyampaikan program prioritas kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi maupun forum konsultasi publik.

Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan dapat diukur pencapaiannya secara akuntabel?

Informan : Setiap target pembangunan selalu melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Kami menganalisis kondisi awal daerah, kemampuan pendanaan, kapasitas pelaksanaan program, serta berbagai risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian target.

Peneliti : Bagaimana tujuan kebijakan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD atau Renstra?

Informan : Sinkronisasi merupakan salah satu fungsi utama Bappeda. Setiap tujuan pembangunan harus memiliki keterkaitan yang jelas mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga Renstra masing-masing perangkat daerah.

Peneliti : Apakah sinkronisasi tersebut dicatat dalam dokumen resmi yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi?

Informan : Ya. Seluruh hasil sinkronisasi dituangkan ke dalam dokumen resmi pemerintah daerah. Dokumen tersebut

menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi dasar penyusunan anggaran setiap tahun. Keberadaan dokumen resmi sangat penting karena memberikan kepastian mengenai arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Peneliti : Bagaimana target outcome ditetapkan untuk memastikan manfaatnya adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan?

Informan : Target outcome disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap wilayah di Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah tidak hanya melihat capaian pembangunan secara agregat, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat bagi masyarakat di berbagai kecamatan.

Peneliti : Apakah target outcome dirancang untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat?

Informan : Ya, seluruh target outcome diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Kami tidak hanya mengejar keberhasilan program dalam satu tahun anggaran, tetapi bagaimana program tersebut mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara terus-menerus.

Peneliti : Bagaimana pencapaian target outcome dimonitor dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada publik?

Informan : Pencapaian target outcome dimonitor melalui evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait. Setiap indikator dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara terbuka dan

bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan?

Informan : Pemerintah daerah terus berupaya menjalankan program secara terbuka dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah ketepatan data penerima manfaat. Data menjadi dasar dalam menentukan kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan intervensi pemerintah. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif maqasid syariah, bantuan kepada masyarakat harus benar-benar diarahkan kepada mereka yang membutuhkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Berapa jumlah program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dan bagaimana distribusinya agar adil bagi seluruh masyarakat?

Informan : Program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan secara lintas sektor oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, tidak hanya terdapat satu program khusus, melainkan berbagai kegiatan yang saling mendukung, seperti pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan tenaga kerja, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pembangunan infrastruktur dasar, hingga

penguatan ekonomi syariah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan bahwa semua program yang dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan pemerataan manfaatnya?

Informan : Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam sehingga prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan secara adil, transparan, bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Peneliti : Bagaimana realisasi anggaran program pengentasan pengangguran dan kemiskinan dilaporkan secara terbuka kepada publik?

Informan : Setiap pelaksanaan program yang didanai melalui APBK wajib dilaporkan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perangkat daerah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala, kemudian dilakukan evaluasi oleh pemerintah daerah.

Peneliti : Apakah penggunaan anggaran mengikuti rencana tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel?

Informan : Ya. Setiap penggunaan anggaran harus mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan harus sesuai dengan RPJMD, RKPD, Renja OPD, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing perangkat daerah.

Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip keadilan?

- Informan : Efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, setiap usulan kegiatan terlebih dahulu dianalisis dari sisi urgensi, manfaat, kelompok sasaran, serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah mengevaluasi apakah outcome program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan prinsip ekonomi syariah?
- Informan : Evaluasi outcome dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator pembangunan, monitoring lapangan, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta analisis terhadap dampak program bagi masyarakat. Selain indikator kuantitatif, kami juga memperhatikan aspek kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan program.
- Peneliti : Bagaimana mekanisme evaluasi program dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas?
- Informan : Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring triwulanan, evaluasi semester, evaluasi tahunan, serta forum koordinasi lintas perangkat daerah. Seluruh OPD diwajibkan menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, tingkat serapan anggaran, capaian indikator kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan
- Peneliti : Bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat, mengingat kebutuhan masyarakat yang cukup besar?
- Informan : Pemerintah daerah terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat meskipun masih terdapat keterbatasan dana. Dalam penyusunan anggaran, pemerintah harus melakukan

penentuan prioritas karena kebutuhan pembangunan cukup banyak, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.

Peneliti : Sejauh mana program pelatihan kerja dan bantuan usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah memberikan hasil nyata bagi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri?

Informan : Program pelatihan kerja dan bantuan usaha telah membantu sebagian masyarakat memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha mandiri. Pelatihan kerja pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mereka mempunyai kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari Maqasid Syariah

A. STRUKTURAL

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah menilai ketimpangan akses masyarakat terhadap modal usaha, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya?

Informan : Ketimpangan akses ekonomi masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil evaluasi dan berbagai forum perencanaan yang kami lakukan, terdapat perbedaan tingkat akses masyarakat terhadap modal usaha, kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi, maupun jaringan pemasaran.

Peneliti : Bagaimana pemerintah berupaya agar akses ekonomi lebih adil dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan?

- Informan : Strategi yang kami lakukan adalah memperluas kesempatan ekonomi melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya menyediakan bantuan usaha, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, peningkatan akses pemasaran, digitalisasi UMKM, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- Peneliti : Apakah rendahnya kualitas SDM memengaruhi keadilan dalam kesempatan kerja dan partisipasi ekonomi masyarakat?
- Informan : Ya, kualitas SDM memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesempatan kerja. Masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki keterampilan terbatas sering kali mengalami kesulitan bersaing di pasar kerja maupun mengakses berbagai peluang ekonomi.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah menilai ketersediaan dan pemerataan infrastruktur ekonomi seperti pasar, pelatihan kerja, dan akses transportasi?
- Informan : Infrastruktur ekonomi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami menyadari bahwa masih terdapat perbedaan tingkat ketersediaan infrastruktur antarwilayah sehingga pemerintah terus melakukan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan akses jalan, fasilitas pasar, kawasan produksi pertanian, irigasi, pusat pelatihan kerja, serta berbagai sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- Peneliti : Apakah infrastruktur yang tidak merata menghambat distribusi manfaat ekonomi syariah secara adil?

Informan : Ya, infrastruktur yang belum merata dapat memengaruhi efektivitas berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pengembangan ekonomi syariah. Misalnya, keterbatasan akses transportasi dapat menghambat pemasaran produk masyarakat maupun pelaksanaan pendampingan usaha.

Peneliti : Bagaimana keterbatasan anggaran daerah memengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis ekonomi syariah?

Informan : Keterbatasan kapasitas fiskal merupakan salah satu tantangan yang hampir dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Besar. Kebutuhan pembangunan setiap tahun cenderung meningkat, sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas tertentu.

Peneliti : Bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran agar tetap akuntabel meski anggaran terbatas?

Informan : Prinsip akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, terlepas dari besar atau kecilnya anggaran yang tersedia. Seluruh program harus direncanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disahkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun indikator kinerja, target capaian, serta laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala.

Peneliti : Bagaimana mekanisme transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk dana transfer pusat, untuk memastikan program berjalan efektif?

Informan : Dalam pengelolaan anggaran, pemerintah menerapkan prinsip transparansi melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbuka sesuai

ketentuan yang berlaku. Seluruh sumber pendanaan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun dana transfer pemerintah pusat, dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bersama.

Peneliti : Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan usaha, dan apakah seluruh masyarakat sudah dapat dijangkau?

Informan : Pemerintah terus berupaya memperluas akses ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan usaha, namun belum semua masyarakat dapat dijangkau. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar yang cukup luas, perbedaan karakteristik masyarakat, serta keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap informasi, modal, pasar, dan layanan ekonomi.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah berupaya meningkatkan infrastruktur ekonomi masyarakat untuk mendukung kegiatan usaha, pekerjaan, dan pemerataan akses ekonomi?

Informan : Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur ekonomi masyarakat, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Jalan, pasar, sarana transportasi, jaringan komunikasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan mengakses pasar. Wilayah yang mempunyai infrastruktur yang baik tentu memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah yang aksesnya masih terbatas.

- Peneliti : Sejauh mana keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan?
- Informan : Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat karena kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi cukup besar. Pemerintah daerah menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, sampai dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

B. INSTITUSIONAL

- Peneliti : Bagaimana pemerintah menilai koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis ekonomi syariah?
- Informan : Koordinasi antarperangkat daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD saja karena memiliki dimensi ekonomi, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.
- Peneliti : Apakah lemahnya koordinasi menghambat pemerataan manfaat program sehingga prinsip keadilan sulit tercapai?
- Informan : Ya, koordinasi yang kurang optimal berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti tumpang tindih kegiatan, ketidaksesuaian sasaran penerima manfaat, bahkan adanya wilayah yang belum memperoleh intervensi pembangunan secara memadai. Hal tersebut tentu dapat mengurangi efektivitas program dan menghambat tercapainya pemerataan pembangunan.

Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku sebagai bentuk transparansi?

Informan : Pemerintah daerah berupaya menyebarluaskan informasi mengenai berbagai kebijakan melalui media resmi pemerintah, kegiatan sosialisasi, forum Musrenbang, konsultasi publik, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan gampong. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui mekanisme pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Peneliti : Bagaimana Bapak melihat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran berbasis ekonomi syariah?

Informan : Secara umum, kualitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan, terutama sejak diterapkannya sistem pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Namun demikian, kami juga mengakui bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks sehingga kompetensi aparatur harus terus diperbarui agar mampu mengikuti dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, maupun perkembangan ekonomi syariah.

Peneliti : Apakah keterbatasan kapasitas aparatur memengaruhi keadilan dalam pelaksanaan program kepada masyarakat?

Informan : Ya, kapasitas aparatur sangat memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Apabila aparatur belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap substansi program maupun kondisi masyarakat, maka terdapat risiko program tidak tepat sasaran atau kurang memberikan dampak yang optimal.

Peneliti : Bagaimana upaya pemerintah meningkatkan kapasitas aparaturnya agar mampu memberikan pelayanan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat?

Informan : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara rutin melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas ASN, baik melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, bimbingan teknis, workshop, coaching, maupun kegiatan berbagi pengetahuan antarperangkat daerah. Selain peningkatan kompetensi teknis, kami juga mendorong penguatan integritas, etika pelayanan publik, kemampuan kepemimpinan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Peneliti : Bagaimana kondisi koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam hal sinkronisasi data dan pelaksanaan program di lapangan?

Informan : Koordinasi antarinstansi sebenarnya sudah dilakukan, tetapi masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data dan pelaksanaan program di lapangan. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi serta basis data yang berbeda. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan perbedaan informasi mengenai sasaran program, terutama ketika data belum diperbarui secara bersamaan.

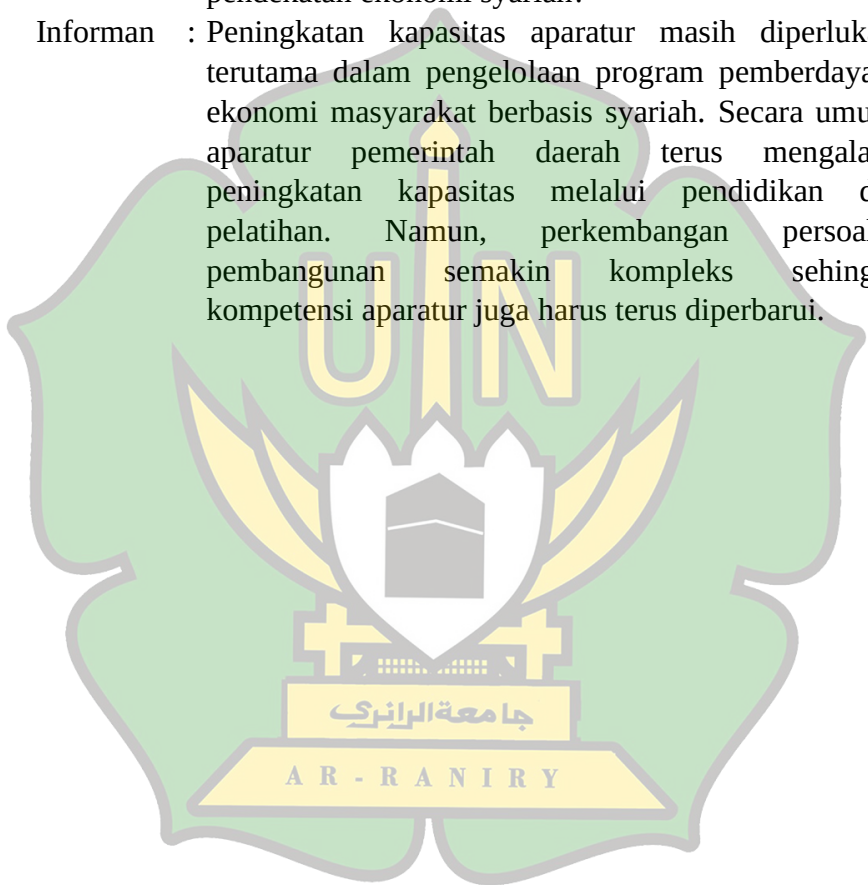
Peneliti : Apakah terdapat program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan penguatan regulasi agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal?

Informan : Beberapa program membutuhkan regulasi yang lebih kuat agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan lebih optimal. Regulasi penting untuk memberikan kepastian kepada

pemerintah sebagai pelaksana maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Peneliti : Bagaimana kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya yang menggunakan pendekatan ekonomi syariah?

Informan : Peningkatan kapasitas aparatur masih diperlukan, terutama dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Secara umum, aparatur pemerintah daerah terus mengalami peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, perkembangan persoalan pembangunan semakin kompleks sehingga kompetensi aparatur juga harus terus diperbarui.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW02 (Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Bagaimana visi dan misi Dinas Sosial dalam mendukung strategi pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama di bidang kesejahteraan sosial, visi kami sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, rehabilitasi sosial, penanganan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Peneliti : Bagaimana visi tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat?

Informan : Prinsip keadilan menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Kami memastikan bahwa program diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat berdasarkan data dan hasil verifikasi di lapangan.

Peneliti : Bagaimana visi tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam jangka panjang?

Informan : Kami berupaya agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju pemberdayaan masyarakat. Setelah kebutuhan

dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah mendorong mereka mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha mikro, maupun program peningkatan kapasitas lainnya yang dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait.

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial mengidentifikasi kondisi masyarakat miskin dan pengangguran sebelum menyusun program?

Informan : Penyusunan program selalu diawali dengan analisis kondisi masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hasil verifikasi dan validasi data oleh pemerintah gampong dan kecamatan, laporan pendamping sosial, serta hasil koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait.

Peneliti : Bagaimana hasil analisis tersebut digunakan dalam menentukan prioritas penerima manfaat?

Informan : Hasil analisis menjadi dasar utama dalam menentukan kelompok sasaran. Kami memperhatikan tingkat kemiskinan, kondisi ekonomi keluarga, kerentanan sosial, kondisi kesehatan, usia, status pekerjaan, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti : Bagaimana proses analisis tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?

Informan : Transparansi dilakukan melalui proses verifikasi berjenjang yang melibatkan pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, serta perangkat daerah terkait. Setiap usulan masyarakat harus melalui proses pengecekan sehingga data yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang baik. Terdapat mekanisme pengaduan masyarakat apabila ditemukan data yang belum sesuai. Hal ini penting agar proses penetapan

penerima manfaat berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial menentukan prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan?

Informan : Prioritas program ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, hasil pemutakhiran DTKS, kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

Peneliti : Bagaimana program tersebut memberikan kemaslahatan jangka panjang?

Informan : Kami terus mendorong transformasi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan sosial. Bantuan sosial memang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, namun dalam jangka panjang masyarakat harus mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan produktif.

Peneliti : Bagaimana proses penetapan prioritas dilakukan secara terbuka?

Informan : Prioritas program dibahas melalui forum perencanaan pemerintah daerah serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Seluruh proses mengacu pada data yang telah diverifikasi sehingga keputusan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu.

Peneliti : Apakah strategi penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam dokumen resmi?

Informan : Ya. Seluruh program Dinas Sosial dituangkan dalam Renstra, Renja, RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut menjadi pedoman seluruh bidang dalam melaksanakan program sehingga setiap kegiatan memiliki tujuan, indikator, sasaran, dan target yang jelas.

Peneliti : Apakah dokumen tersebut memuat indikator keberhasilan program?

Informan : Setiap program memiliki indikator yang dapat diukur, seperti jumlah penerima manfaat, tingkat ketepatan sasaran, peningkatan kesejahteraan sosial, maupun indikator kinerja lainnya yang menjadi dasar evaluasi. Melalui indikator tersebut kami dapat mengetahui sejauh mana program memberikan manfaat kepada masyarakat serta melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.

Peneliti : Bagaimana monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan program?

Informan : Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan pelaksanaan kegiatan, kunjungan lapangan, evaluasi internal, koordinasi dengan pendamping sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong. Kami juga menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi pelayanan.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan?

Informan : Program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan data yang telah diverifikasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Data menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam menentukan penerima manfaat. Pemerintah daerah terus berupaya menggunakan data yang tersedia dan melakukan verifikasi bersama dengan pemerintah kecamatan dan gampong untuk memastikan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, kami menyadari bahwa kondisi masyarakat dapat berubah.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana komitmen Bapak sebagai pimpinan dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Sebagai pimpinan perangkat daerah yang menangani urusan sosial, saya memandang bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah. Komitmen kami diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang berorientasi kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat yang mengalami kondisi darurat akibat bencana maupun faktor sosial lainnya. Dalam setiap penyusunan program, kami selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Peneliti : Bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan?

Informan : Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan sosial, percepatan penanganan masyarakat yang membutuhkan bantuan, pemutakhiran data penerima manfaat, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, dan perangkat daerah lainnya. Kami juga mendorong seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan tidak diskriminatif.

Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan seluruh aparatur memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat?

Informan : Sebagai pimpinan, saya selalu menekankan bahwa pelayanan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh

karena itu, setiap pegawai di lingkungan Dinas Sosial diwajibkan memahami standar pelayanan, kode etik ASN, serta prinsip-prinsip pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Peneliti : Bagaimana bentuk dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Dinas Sosial?

Informan : Dukungan pimpinan diwujudkan melalui penyediaan arah kebijakan yang jelas, penguatan koordinasi antarbidang, penyediaan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta pendampingan terhadap seluruh proses pelaksanaan program.

Peneliti : Bagaimana pimpinan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan?

Informan : Setiap kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, petunjuk teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh penggunaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan selalu dipantau melalui laporan berkala dan evaluasi internal.

Peneliti : Bagaimana pimpinan membangun transparansi dalam pelaksanaan program sosial?

Informan : Kami berupaya membangun transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan penerima manfaat, mekanisme pengusulan bantuan, proses verifikasi data, hingga hasil pelaksanaan program.

Peneliti : Bagaimana komunikasi yang dibangun antara pimpinan dengan pegawai dalam pelaksanaan program?

Informan : Komunikasi kami bangun secara terbuka melalui rapat koordinasi rutin, diskusi teknis, serta komunikasi informal apabila terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian segera. Saya berusaha

menciptakan suasana kerja yang terbuka sehingga setiap pegawai merasa nyaman menyampaikan ide maupun kendala yang dihadapi.

Peneliti : Bagaimana koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah lain dalam penanggulangan kemiskinan?

Informan : Koordinasi dilakukan melalui berbagai forum lintas perangkat daerah yang difasilitasi oleh Bappeda maupun pemerintah daerah. Kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Baitul Mal, serta berbagai instansi lainnya sesuai kebutuhan program.

Peneliti : Bagaimana komunikasi dengan masyarakat dilakukan agar pelayanan lebih transparan?

Informan : Kami memanfaatkan berbagai media komunikasi, mulai dari pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, media informasi pemerintah daerah, hingga forum-forum masyarakat. Selain menyampaikan informasi program, kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun menyampaikan pengaduan.

Peneliti : Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menetapkan prioritas program sosial?

Informan : Pengambilan keputusan selalu didasarkan pada data, hasil evaluasi program sebelumnya, kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi riil masyarakat. Kami tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melalui pembahasan bersama seluruh bidang agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek. Data dari DTKS, hasil verifikasi lapangan, usulan pemerintah gampong, maupun hasil Musrenbang menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas program.

Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan keputusan yang diambil memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat?

Informan : Prinsip utama kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, seluruh keputusan selalu mengacu pada data yang telah diverifikasi serta ketentuan yang berlaku. Kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Peneliti : Bagaimana keputusan tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat?

Informan : Dalam setiap pengambilan keputusan, kami tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial menetapkan sasaran utama dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Dalam menetapkan sasaran program, kami selalu mengacu pada kondisi riil masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hasil verifikasi lapangan, serta berbagai informasi yang diperoleh dari pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, dan perangkat daerah terkait.

Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sasaran tersebut mencerminkan prinsip keadilan?

Informan : Prinsip keadilan kami terapkan melalui proses verifikasi dan validasi data secara berjenjang. Penentuan penerima manfaat tidak dilakukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan subjektif,

tetapi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah diverifikasi sesuai ketentuan.

Peneliti : Bagaimana sasaran program tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan?

Informan : Kami tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek melalui bantuan sosial, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu hidup lebih mandiri. Oleh karena itu, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, maupun pengembangan usaha produktif.

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial menjaga konsistensi tujuan program agar tetap berorientasi pada pengurangan kemiskinan?

Informan : Seluruh program yang kami laksanakan mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, setiap kegiatan memiliki arah yang jelas dan tetap konsisten terhadap tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan.

Peneliti : Bagaimana akuntabilitas dijaga agar tujuan tersebut benar-benar tercapai?

Informan : Setiap program memiliki indikator kinerja yang dapat diukur, baik dari sisi jumlah penerima manfaat, kualitas pelayanan, maupun capaian outcome yang ingin diwujudkan. Seluruh indikator tersebut dipantau melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

Peneliti : Bagaimana masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat program yang dilaksanakan?

Informan : Kami menyampaikan informasi mengenai program melalui pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, media informasi pemerintah

daerah, serta berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain menjelaskan persyaratan program, kami juga memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban penerima manfaat.

Peneliti : Apa hasil utama yang ingin dicapai Dinas Sosial melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan?

Informan : Hasil utama yang ingin kami capai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui berkurangnya jumlah keluarga miskin, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarga.

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial menilai bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat?

Informan : Penilaian dilakukan melalui monitoring lapangan, evaluasi program, laporan pendamping sosial, serta berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Kami juga menerima masukan langsung dari masyarakat mengenai manfaat yang mereka rasakan setelah mengikuti program.

Peneliti : Bagaimana outcome tersebut dikaitkan dengan prinsip maqasid syariah?

Informan : Dalam perspektif maqasid syariah, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, terjaganya martabat manusia, meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri.

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial memastikan program yang dilaksanakan memiliki keberlanjutan?

Informan : Keberlanjutan program menjadi perhatian penting karena persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan

dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lain agar masyarakat yang telah menerima bantuan sosial dapat melanjutkan proses pemberdayaan melalui pelatihan kerja, pengembangan usaha, maupun program ekonomi produktif.

Peneliti : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program?

Informan : Kami mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemerintah gampong, pendamping sosial, kelompok masyarakat, maupun organisasi sosial yang ada di daerah. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial di lingkungannya.

Peneliti : Apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Harapan kami adalah agar seluruh program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan serta semakin terintegrasi dengan berbagai program pembangunan daerah lainnya. Dengan sinergi yang kuat antarperangkat daerah, pemerintah gampong, dunia usaha, lembaga zakat, perguruan tinggi, dan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Berapa banyak program yang telah dilaksanakan Dinas Sosial dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Setiap tahun Dinas Sosial melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, serta penanganan masyarakat yang

mengalami kerentanan sosial. Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial yang didukung oleh APBK, APBA maupun APBN sesuai kewenangan masing-masing.

Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial memastikan seluruh program tersebut dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan?

Informan : Penetapan sasaran program selalu mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi bersama pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, serta perangkat daerah terkait.

Peneliti : Apakah seluruh program telah memberikan manfaat sesuai prinsip maqasid syariah?

Informan : Secara umum kami melihat bahwa berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan rasa aman sosial, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Peneliti : Bagaimana realisasi anggaran program sosial dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat?

Informan : Seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap kegiatan memiliki dokumen perencanaan, indikator kinerja, target pelaksanaan, serta laporan realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan secara berkala. Selain laporan internal pemerintah, pelaksanaan program juga menjadi objek pengawasan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, serta berbagai lembaga pengawas lainnya.

- Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran?
- Informan : Kami memastikan bahwa setiap kegiatan hanya dilaksanakan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan program. Sebelum bantuan disalurkan dilakukan proses verifikasi data, pemeriksaan administrasi, serta koordinasi dengan pemerintah gampong dan pendamping sosial.
- Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan anggaran program sosial?
- Informan : Transparansi dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang terbuka sesuai mekanisme pemerintah daerah, penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat, serta penyediaan mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan bantuan.
- Peneliti : Bagaimana Bapak menilai hasil yang telah dicapai melalui berbagai program Dinas Sosial?
- Informan : Secara umum berbagai program perlindungan sosial telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Program pemberdayaan juga mulai menunjukkan hasil melalui meningkatnya kemampuan sebagian masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif.
- Peneliti : Apakah hasil tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat miskin?
- Informan : Menurut hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, sebagian besar penerima manfaat merasakan bahwa bantuan sosial sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit maupun kelompok rentan.

- Peneliti : Bagaimana hasil tersebut dikaitkan dengan maqasid syariah?
- Informan : Menurut kami, keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuan program tersebut menjaga kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, melindungi kelompok rentan, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program?
- Informan : Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat internal, monitoring lapangan, laporan pendamping sosial, evaluasi kinerja setiap bidang, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami juga memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan pelaksanaan program.
- Peneliti : Bagaimana hasil evaluasi disampaikan secara transparan?
- Informan : Hasil evaluasi menjadi bagian dari laporan kinerja perangkat daerah yang disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Berbagai hasil pelaksanaan program juga dibahas dalam forum koordinasi bersama perangkat daerah lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan secara bersama-sama.
- Peneliti : Bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang?
- Informan : Setiap hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Apabila ditemukan program yang kurang efektif, maka dilakukan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, maupun bentuk intervensinya.
- Peneliti : Bagaimana bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lain dalam melaksanakan program

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat?

Informan : Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, kami bekerja sama dengan berbagai pihak agar bantuan dan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan yang cukup kompleks.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah mengevaluasi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan?

Informan : Setiap program yang dijalankan dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain melihat pelaksanaan kegiatan, pemerintah juga perlu melihat manfaat yang diterima masyarakat. Misalnya dalam program bantuan usaha, evaluasi tidak cukup hanya melihat apakah bantuan sudah diserahkan kepada penerima.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari Maqasid Syariah

A. STRUKTURAL

Peneliti : Bagaimana Bapak melihat kondisi akses ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar saat ini?

Informan : Berdasarkan pelaksanaan program yang kami lakukan, masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Keterbatasan tersebut bukan hanya

berkaitan dengan modal usaha, tetapi juga akses terhadap lapangan pekerjaan, keterampilan, jaringan pemasaran, informasi usaha, hingga akses terhadap lembaga keuangan. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi umumnya menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.

Peneliti : Apakah kondisi tersebut memengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan?

Informan : Tentu berpengaruh. Bantuan sosial dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek, tetapi apabila akses terhadap pekerjaan, modal usaha, maupun peningkatan keterampilan masih terbatas, maka masyarakat akan sulit meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

Peneliti : Bagaimana upaya Dinas Sosial agar akses ekonomi masyarakat menjadi lebih adil sesuai prinsip maqasid syariah?

Informan : Kami terus memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Baitul Mal, serta lembaga keuangan syariah agar masyarakat miskin memiliki kesempatan mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kelompok usaha bersama (KUBE) dan berbagai program pemberdayaan sosial terus kami dorong agar masyarakat memperoleh pendampingan dalam mengembangkan usaha produktif. Apabila dikaitkan dengan maqasid syariah, langkah tersebut merupakan bagian dari menjaga harta (hifz al-mal) serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat (hifz al-nafs) melalui peningkatan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan.

- Peneliti : Bagaimana Bapak menilai kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Sebagian masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan pada aspek pendidikan, keterampilan kerja, kemampuan berwirausaha, serta literasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka sulit bersaing di pasar kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
- Peneliti : Bagaimana keterbatasan kualitas SDM memengaruhi pelaksanaan program sosial?
- Informan : Keterbatasan kompetensi masyarakat menyebabkan sebagian program pemberdayaan membutuhkan waktu pendampingan yang lebih panjang. Tidak semua penerima manfaat dapat langsung mengembangkan usaha atau memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Kami melihat bahwa perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, dan penguatan motivasi membutuhkan proses yang berkelanjutan.
- Peneliti : Apa langkah yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi persoalan tersebut?
- Informan : Kami memperkuat berbagai kegiatan pemberdayaan sosial melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kelompok usaha bersama, peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat, serta kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan perangkat daerah lainnya. Kami juga mendorong agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi memiliki kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.
- Peneliti : Bagaimana kondisi infrastruktur ekonomi memengaruhi pelaksanaan program Dinas Sosial?

- Informan : Ketersediaan infrastruktur ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap efektivitas pelaksanaan program sosial. Wilayah yang memiliki akses jalan, transportasi, pasar, serta fasilitas publik yang baik umumnya lebih mudah berkembang dibandingkan wilayah yang aksesnya masih terbatas.
- Peneliti : Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat?
- Informan : Masyarakat yang telah memperoleh bantuan usaha maupun pelatihan sering kali masih menghadapi kendala dalam memasarkan produk apabila akses transportasi maupun fasilitas ekonomi belum memadai.
- Peneliti : Bagaimana koordinasi dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat mendukung kesejahteraan masyarakat?
- Informan : Kami menyampaikan berbagai hasil evaluasi lapangan kepada Bappeda maupun perangkat daerah terkait sebagai bahan penyusunan prioritas pembangunan daerah.
- Peneliti : Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program Dinas Sosial?
- Informan : Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial setiap tahun terus meningkat, sementara kemampuan anggaran pemerintah memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus menentukan skala prioritas agar masyarakat yang paling membutuhkan tetap memperoleh perlindungan sosial.
- Peneliti : Bagaimana Dinas Sosial menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan tersebut?
- Informan : Setiap penggunaan anggaran harus mengacu pada dokumen perencanaan, ketentuan pengelolaan keuangan daerah, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan

melalui laporan realisasi fisik maupun keuangan yang dievaluasi secara berkala.

Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan anggaran program sosial?

Informan : Kami selalu berupaya memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat melalui pemerintah gampong, kecamatan, pendamping sosial, serta media informasi pemerintah daerah.

B. INSTITUSIONAL

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Menurut saya, koordinasi antarperangkat daerah selama ini telah berjalan dengan cukup baik, terutama melalui forum koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Bappeda. Penanganan kemiskinan merupakan isu lintas sektor sehingga keberhasilannya tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Dinas Sosial berperan pada aspek perlindungan dan pemberdayaan sosial, sementara perangkat daerah lain memiliki kewenangan pada bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pertanian, koperasi dan UMKM, maupun pembangunan infrastruktur.

Peneliti : Apa dampak apabila koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal?

Informan : Apabila koordinasi belum optimal, maka terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih program ataupun sebaliknya masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh intervensi secara menyeluruh. Misalnya, masyarakat telah memperoleh bantuan sosial tetapi belum terhubung dengan program pelatihan kerja atau pemberdayaan ekonomi

sehingga proses peningkatan kesejahteraannya menjadi lebih lambat.

Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk memperkuat koordinasi tersebut?

Informan : Kami terus meningkatkan koordinasi melalui rapat lintas sektor, forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Musrenbang, serta berbagai pertemuan teknis yang melibatkan perangkat daerah terkait. Kami juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, pendamping sosial, Baitul Mal Aceh Besar, serta lembaga sosial lainnya. Ke depan kami berharap integrasi data dan perencanaan program dapat semakin baik sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Dalam perspektif maqasid syariah, koordinasi yang baik merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan yang lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Peneliti : Bagaimana Bapak melihat regulasi yang ada dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan?

Informan : Secara umum, pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Regulasi tersebut memberikan arah yang cukup jelas mengenai mekanisme perlindungan sosial, penyaluran bantuan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Peneliti : Apakah terdapat kendala regulasi yang memengaruhi pelaksanaan program di lapangan?

Informan : Dalam praktiknya, beberapa ketentuan administratif memang membutuhkan proses yang cukup panjang sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intensif antarinstansi. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat juga mengharuskan pemerintah

daerah melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program.

Peneliti : Bagaimana harapan Bapak terhadap pengembangan regulasi ke depan?

Informan : Kami berharap regulasi ke depan semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta memberikan ruang yang lebih luas bagi integrasi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi. Regulasi diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Baitul Mal, lembaga zakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai kapasitas aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan?

Informan : Secara umum, aparatur Dinas Sosial memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi, baik dalam bidang pelayanan sosial, pengelolaan data, pemberdayaan masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Kami juga menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah pelayanan serta beragamnya karakteristik masyarakat yang harus dilayani.

Peneliti : Bagaimana keterbatasan kapasitas aparatur memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat?

Informan : Kapasitas aparatur sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu melakukan verifikasi data secara akurat, memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial secara profesional.

- Peneliti : Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur?
- Informan : Kami secara rutin mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Selain itu, kami juga mendorong budaya belajar di lingkungan organisasi melalui diskusi internal, berbagi pengalaman, dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program.
- Peneliti : Bagaimana Bapak menilai sistem monitoring dan evaluasi terhadap program-program Dinas Sosial?
- Informan : Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelaksanaan program di Dinas Sosial. Selama ini kami melaksanakan monitoring melalui laporan pelaksanaan kegiatan, kunjungan lapangan, evaluasi internal, laporan pendamping sosial, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong.
- Peneliti : Bagaimana transparansi hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat?
- Informan : Hasil evaluasi menjadi bagian dari laporan kinerja pemerintah daerah dan digunakan sebagai dasar penyempurnaan program pada tahun berikutnya. Selain itu, berbagai informasi mengenai pelaksanaan program juga disampaikan melalui forum koordinasi, pemerintah gampong, maupun media informasi pemerintah daerah.
- Peneliti : Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi dapat mendukung prinsip maqasid syariah dalam penanggulangan kemiskinan?
- Informan : Menurut saya, monitoring dan evaluasi harus mampu memastikan bahwa seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi yang baik akan membantu pemerintah mengetahui apakah bantuan telah tepat sasaran, apakah program

pemberdayaan telah meningkatkan kemandirian masyarakat, dan apakah penggunaan anggaran telah memberikan manfaat yang optimal. Dalam perspektif maqasid syariah, evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga amanah publik, melindungi kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mewujudkan kemaslahatan.

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Setiap instansi memiliki program masing-masing sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas, fungsi, sasaran, dan kegiatan yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, program yang dilaksanakan dapat memiliki sasaran masyarakat yang sama atau memiliki keterkaitan satu sama lain. Kalau koordinasi tidak dilakukan dengan baik, terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih program atau sebaliknya ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah.

A R - R A N I R Y

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW03 (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Bagaimana visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan?

Informan : Visi kami sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Aceh Besar, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Dinas Tenaga Kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, memperkuat hubungan industrial, serta mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat. Kami memandang bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan.

Peneliti : Bagaimana visi tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pencari kerja?

Informan : Prinsip keadilan diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pelatihan kerja, informasi lowongan pekerjaan, sertifikasi kompetensi, maupun program pemberdayaan tenaga kerja tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal.

Peneliti : Bagaimana visi tersebut diarahkan untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang?

Informan : Kami tidak hanya menargetkan penurunan angka pengangguran dalam jangka pendek, tetapi juga ingin membangun tenaga kerja yang kompeten, produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Karena itu pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pemagangan, pengembangan kewirausahaan, dan kerja sama dengan dunia usaha menjadi prioritas utama.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menganalisis kondisi pengangguran di Kabupaten Aceh Besar sebelum menyusun program kerja?

Informan : Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data ketenagakerjaan, hasil pendataan pencari kerja, informasi dari Badan Pusat Statistik, laporan perusahaan, masukan dari pemerintah kecamatan dan gampong, serta hasil evaluasi program tahun sebelumnya.

Peneliti : Bagaimana hasil analisis tersebut digunakan dalam menentukan prioritas program?

Informan : Hasil analisis menjadi dasar dalam menentukan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan, sasaran peserta, penyelenggaraan bursa kerja, program pemagangan, maupun kerja sama dengan perusahaan.

Peneliti : Bagaimana proses analisis dilakukan secara transparan dan akuntabel?

Informan : Seluruh penyusunan program dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta melalui proses perencanaan pemerintah daerah, termasuk Musrenbang dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Peneliti : Apa prioritas utama kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam menurunkan angka pengangguran?

Informan : Prioritas utama kami adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, memperluas akses informasi pasar kerja,

- meningkatkan penempatan tenaga kerja, mengembangkan kewirausahaan, serta memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Peneliti : Bagaimana kebijakan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat?
- Informan : Apabila masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka peluang memperoleh pekerjaan akan meningkat.
- Peneliti : Bagaimana proses penetapan prioritas dilakukan secara terbuka?
- Informan : Prioritas program ditetapkan melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, lembaga pelatihan, hingga masyarakat melalui forum Musrenbang.
- Peneliti : Apakah seluruh strategi tersebut dituangkan dalam dokumen resmi?
- Informan : Ya. Seluruh strategi dituangkan dalam Renstra, Renja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan seluruh program ketenagakerjaan. Melalui dokumen tersebut setiap kegiatan memiliki sasaran, indikator kinerja, target capaian, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
- Peneliti : Apakah terdapat indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian program?
- Informan : Tentu ada. Kami menggunakan berbagai indikator seperti jumlah peserta pelatihan, tingkat kelulusan sertifikasi kompetensi, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan, jumlah peserta pemagangan, serta perkembangan usaha yang dibangun oleh peserta program kewirausahaan.
- Peneliti : Bagaimana monitoring terhadap pelaksanaan program dilakukan?

Informan : Monitoring dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan pelatihan, kunjungan ke lokasi pemagangan, koordinasi dengan perusahaan, pemantauan penempatan tenaga kerja, serta evaluasi terhadap peserta setelah menyelesaikan program.

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, khususnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan pasar kerja?

Informan : Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya keterampilan kerja sebagian masyarakat, sementara kebutuhan pasar kerja terus berkembang. Oleh karena itu, pelatihan kerja menjadi salah satu program yang diprioritaskan. Perkembangan dunia kerja saat ini menuntut masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana komitmen Bapak dalam mendukung strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan?

Informan : Sebagai pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, saya memiliki komitmen untuk memastikan bahwa setiap program yang kami laksanakan benar-benar mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan.

Peneliti : Bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan?

Informan : Komitmen tersebut kami implementasikan melalui penyusunan program yang berbasis kebutuhan dunia kerja. Sebelum menyelenggarakan pelatihan, kami melakukan identifikasi terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri

sehingga materi pelatihan benar-benar relevan. Selain itu, kami terus memperluas kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, Balai Latihan Kerja (BLK), serta instansi pemerintah lainnya agar lulusan pelatihan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.

Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan seluruh pegawai memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

Informan : Saya selalu menekankan bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan pelayanan publik yang harus dilakukan secara profesional, cepat, adil, dan transparan. Oleh karena itu, kami rutin melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi kinerja, pembinaan pegawai, serta diskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Peneliti : Bagaimana bentuk dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan program pengurangan pengangguran di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Sebagai pimpinan, saya memberikan dukungan melalui penyediaan arah kebijakan yang jelas, penguatan koordinasi antarbidang, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program.

Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan seluruh program dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku?

Informan : Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan dipantau melalui laporan berkala, monitoring lapangan, serta evaluasi terhadap capaian indikator kinerja.

Peneliti : Bagaimana transparansi diterapkan dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan?

- Informan : Kami berusaha memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai jadwal pelatihan, persyaratan peserta, informasi lowongan kerja, program pemagangan, maupun berbagai bentuk pelayanan ketenagakerjaan lainnya melalui media informasi pemerintah daerah dan kanal komunikasi resmi.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi yang dibangun antara pimpinan dengan seluruh pegawai?
- Informan : Kami membangun komunikasi secara terbuka melalui rapat rutin, koordinasi antarbidang, diskusi teknis, serta komunikasi informal apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian segera.
- Peneliti : Bagaimana koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah lain?
- Informan : Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pertanian, Baitul Mal, serta berbagai instansi vertikal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi dilakukan dengan masyarakat pencari kerja?
- Informan : Kami terus meningkatkan penyebaran informasi mengenai kesempatan kerja, pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, serta berbagai layanan ketenagakerjaan melalui media sosial, website pemerintah daerah, job fair, dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun gampong.
- Peneliti : Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas program ketenagakerjaan?
- Informan : Seluruh keputusan didasarkan pada hasil analisis kondisi ketenagakerjaan, data pencari kerja, kebutuhan dunia usaha, hasil evaluasi program sebelumnya, serta kebijakan pembangunan daerah. Kami tidak mengambil keputusan secara sepihak,

tetapi melibatkan seluruh bidang teknis agar setiap kebijakan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan pasar kerja.

Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan keputusan tersebut memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat?

Informan : Kami memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pemerintah selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Seleksi peserta dilakukan secara objektif dan transparan sehingga tidak ada perlakuan yang membedakan berdasarkan latar belakang tertentu.

Peneliti : Bagaimana keputusan tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan?

Informan : Dalam setiap pengambilan keputusan kami selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, pemagangan, maupun kewirausahaan diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menetapkan sasaran utama dalam program penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Dalam menetapkan sasaran program, kami mengacu pada data ketenagakerjaan, jumlah pencari kerja yang terdaftar, tingkat pengangguran terbuka, kondisi ekonomi masyarakat, hasil evaluasi program sebelumnya, serta masukan dari pemerintah kecamatan dan gampong. Selain itu, kami juga memperhatikan kebutuhan tenaga kerja dari dunia

- usaha dan dunia industri sehingga program yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
- Peneliti : Bagaimana sasaran tersebut mencerminkan prinsip keadilan?
- Informan : Prinsip keadilan kami terapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program pemerintah sesuai persyaratan yang berlaku. Seleksi peserta dilakukan secara terbuka dan objektif agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian layanan.
- Peneliti : Bagaimana sasaran tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan jangka panjang?
- Informan : Kami tidak hanya menargetkan agar peserta memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan, tetapi juga memiliki kompetensi yang dapat digunakan sepanjang kariernya.
- Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menjaga konsistensi tujuan program agar tetap berorientasi pada pengurangan pengangguran?
- Informan : Seluruh program kami mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, kebijakan pembangunan nasional, serta arah pembangunan ketenagakerjaan yang telah ditetapkan pemerintah.
- Peneliti : Bagaimana akuntabilitas dijaga agar tujuan tersebut benar-benar tercapai?
- Informan : Setiap kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, seperti jumlah peserta pelatihan, tingkat kelulusan sertifikasi, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan, jumlah peserta pemagangan, serta tingkat keberhasilan program kewirausahaan.
- Peneliti : Bagaimana masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat program yang dilaksanakan?
- Informan : Kami menyampaikan informasi melalui berbagai media, seperti website pemerintah daerah, media

sosial resmi, papan pengumuman, pemerintah kecamatan dan gampong, kegiatan sosialisasi, serta pelaksanaan job fair dan bursa kerja.

Peneliti : Apa hasil utama yang ingin dicapai melalui berbagai program Dinas Tenaga Kerja?

Informan : Hasil utama yang ingin kami capai adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja, meningkatnya kompetensi tenaga kerja, berkurangnya angka pengangguran, tumbuhnya wirausaha baru, serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menilai bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat?

Informan : Kami melakukan evaluasi terhadap lulusan pelatihan untuk mengetahui apakah mereka telah bekerja, melanjutkan usaha mandiri, mengikuti sertifikasi lanjutan, ataupun memperoleh peningkatan pendapatan setelah mengikuti program.

Peneliti : Bagaimana *outcome* tersebut dikaitkan dengan prinsip *maqasid syariah*?

Informan : Dalam *perspektif maqasid syariah*, pekerjaan bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga merupakan sarana menjaga kehormatan manusia, menjaga kehidupan keluarga, dan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja memastikan keberlanjutan program ketenagakerjaan?

Informan : Keberlanjutan program menjadi perhatian utama kami karena tantangan ketenagakerjaan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, kami terus memperbarui materi pelatihan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha. Kami juga memperluas kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, Balai Latihan Kerja, perguruan tinggi, serta berbagai mitra

lainnya agar masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk bekerja maupun meningkatkan kompetensinya.

Peneliti : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program?

Informan : Masyarakat memiliki peran yang sangat penting, terutama melalui partisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan, memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan, serta mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh menjadi usaha atau pekerjaan yang produktif.

Peneliti : Apa harapan Bapak terhadap program ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar pada masa mendatang?

Informan : Harapan kami adalah semakin banyak masyarakat Aceh Besar yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, memperoleh pekerjaan yang layak, serta mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Program dan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat?

Informan : Dinas Tenaga Kerja melaksanakan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Di antaranya pelatihan keterampilan kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan, pembinaan calon tenaga kerja, serta program yang mendorong masyarakat untuk memiliki keterampilan usaha.

- Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja memastikan bahwa program ketenagakerjaan tersebut menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan?
- Informan : Kami berupaya menentukan sasaran berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan gampong juga diperlukan untuk mengetahui masyarakat yang belum bekerja atau membutuhkan peningkatan keterampilan. Namun, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pendataan dan jumlah peserta yang dapat difasilitasi sehingga tidak seluruh masyarakat dapat mengikuti program pada waktu yang sama.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan program ketenagakerjaan sudah mencerminkan prinsip keadilan dalam *maqasid syariah*?
- Informan : Kami berusaha menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan persyaratan program. Prinsipnya adalah masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan harus mendapatkan akses yang layak. Namun, karena keterbatasan anggaran dan kuota, pelaksanaan di lapangan masih perlu terus diperluas.
- Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menentukan jenis pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat?
- Informan : Jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Kami berusaha memilih keterampilan yang memiliki peluang untuk digunakan dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha. Selain keterampilan teknis, beberapa pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

- Peneliti : Apakah pelatihan yang diberikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Kami berusaha menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar kerja. Karena kebutuhan tenaga kerja terus berubah, jenis pelatihan juga perlu dievaluasi. Pelatihan yang diberikan tidak cukup hanya membuat peserta memiliki sertifikat, tetapi harus memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha.
- Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja memastikan peserta pelatihan dapat memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh?
- Informan : Setelah pelatihan, peserta diarahkan untuk memanfaatkan keterampilannya melalui pekerjaan maupun usaha. Untuk peserta yang ingin berwirausaha, diperlukan dukungan lanjutan seperti akses peralatan, modal, pemasaran, dan pendampingan. Sementara untuk pencari kerja, informasi lowongan dan fasilitasi penempatan menjadi bagian penting dari tindak lanjut.
- Peneliti : Apa upaya Dinas Tenaga Kerja dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau dunia usaha?
- Informan : Kami berupaya menyediakan informasi lowongan pekerjaan dan memfasilitasi hubungan antara pencari kerja dengan perusahaan. Informasi mengenai kesempatan kerja perlu disebarluaskan agar masyarakat mengetahui peluang yang tersedia dan dapat menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan perusahaan.
- Peneliti : Apa kendala utama dalam penempatan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Salah satu kendalanya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan

perusahaan. Selain itu, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Karena itu, peningkatan keterampilan harus berjalan bersama dengan perluasan kesempatan kerja.

Peneliti : Bagaimana strategi Dinas Tenaga Kerja untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat?

Informan : Kami perlu memperkuat kerja sama dengan dunia usaha, meningkatkan informasi pasar kerja, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dengan demikian masyarakat tidak hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan melalui usaha produktif.

Peneliti : Sejauh mana Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan perusahaan atau dunia usaha dalam mengurangi pengangguran?

Informan : Kerja sama dengan dunia usaha sangat penting karena pemerintah tidak dapat menyediakan seluruh lapangan pekerjaan. Dunia usaha memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja, memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja, dan membuka peluang bagi masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan.

Peneliti : Bagaimana bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha?

Informan : Kemitraan dapat berupa penyampaian informasi kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan berbasis kebutuhan industri, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja. Dengan pola tersebut, pelatihan yang diberikan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- Peneliti : Bagaimana pemerintah memastikan kemitraan dengan dunia usaha memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat?
- Informan : Kemitraan harus diarahkan agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang layak. Selain jumlah tenaga kerja yang terserap, aspek perlindungan tenaga kerja, kesesuaian pekerjaan, dan keberlanjutan pekerjaan juga perlu diperhatikan. Dengan demikian manfaatnya tidak hanya berupa penempatan sementara, tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Peneliti : Selain memberikan akses pekerjaan, bagaimana Dinas Tenaga Kerja mendorong masyarakat untuk menciptakan pekerjaan melalui usaha mandiri?
- Informan : Masyarakat dapat didorong melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan usaha. Peserta perlu diberikan pemahaman mengenai bagaimana memulai usaha, mengelola keuangan, menentukan produk, dan memasarkan hasil usahanya. Hal ini penting agar masyarakat memiliki alternatif selain menjadi pencari kerja.
- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu keterkaitan program kewirausahaan dengan upaya pengentasan kemiskinan?
- Informan : Kewirausahaan dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jika masyarakat memiliki usaha yang berjalan dengan baik, mereka tidak hanya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
- Peneliti : Apakah program pemberdayaan usaha perlu dilanjutkan dengan pendampingan?
- Informan : Sangat perlu. Pelatihan saja tidak cukup. Masyarakat yang baru memulai usaha biasanya menghadapi berbagai kendala, seperti modal, pemasaran,

pengelolaan usaha, dan persaingan. Karena itu, pendampingan dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain diperlukan agar usaha dapat bertahan dan berkembang.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja melihat potensi kerja sama dengan Baitul Mal dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan?

Informan : Baitul Mal memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat. Jika program zakat produktif dapat dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat memperoleh dukungan yang lebih lengkap.

Peneliti : Bagaimana bentuk integrasi program yang ideal antara Dinas Tenaga Kerja, Baitul Mal, dan lembaga ekonomi syariah?

Informan : Misalnya masyarakat yang memiliki potensi usaha dapat memperoleh pelatihan keterampilan dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian mendapatkan dukungan modal atau peralatan melalui program zakat produktif. Selanjutnya dapat diberikan pendampingan usaha dan akses pemasaran.

Peneliti : Bagaimana integrasi tersebut dapat mendukung pencapaian *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya, ketika masyarakat memperoleh pekerjaan atau mampu menjalankan usaha yang halal dan memperoleh pendapatan yang layak, maka kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi. Anak-anak dapat memperoleh pendidikan, kebutuhan kesehatan dapat dipenuhi, dan ketergantungan terhadap bantuan dapat dikurangi. Hal tersebut merupakan bagian dari kemaslahatan masyarakat.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring terhadap program pelatihan dan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan?

- Informan : Monitoring dilakukan untuk melihat pelaksanaan program dan perkembangan peserta setelah mengikuti kegiatan. Yang perlu dilihat bukan hanya jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga apakah mereka memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, atau mengalami peningkatan pendapatan.
- Peneliti : Indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ketenagakerjaan?
- Informan : Beberapa indikator yang penting antara lain jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan, jumlah peserta yang bekerja atau berusaha setelah pelatihan, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, serta perubahan kondisi ekonomi peserta.
- Peneliti : Apakah evaluasi program juga melibatkan masyarakat atau peserta program?
- Informan : Peserta perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kendala setelah mengikuti program. Masukan tersebut penting untuk memperbaiki program berikutnya. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga harus melihat manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana program Dinas Tenaga Kerja telah memberikan kontribusi terhadap penurunan pengangguran di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Program yang dilaksanakan memberikan kontribusi melalui peningkatan keterampilan, fasilitasi penempatan kerja, dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha.
- Peneliti : Apakah program ketenagakerjaan juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan?
- Informan : Iya, karena pekerjaan dan pendapatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketika seseorang memperoleh pekerjaan

atau mampu mengembangkan usaha, pendapatannya dapat meningkat sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga juga meningkat.

Peneliti : Apa yang masih perlu diperbaiki agar kontribusi program terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan menjadi lebih optimal?

Informan : Yang perlu diperkuat antara lain kualitas data, kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, hubungan dengan dunia usaha, penempatan tenaga kerja, pendampingan pascapelatihan, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga lain.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja memastikan agar manfaat program ketenagakerjaan dapat dirasakan dalam jangka panjang?

Informan : Program harus dirancang tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Peserta perlu diarahkan menuju pekerjaan, pemagangan, atau usaha. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan pendampingan agar keterampilan yang diperoleh benar-benar digunakan.

Peneliti : Apa yang dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa suatu program belum mencapai target?

Informan : Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk memperbaiki program. Misalnya jika pelatihan tertentu ternyata kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, jenis pelatihannya dapat disesuaikan. Jika masalahnya pada penempatan, maka hubungan dengan perusahaan perlu diperkuat.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa strategi yang paling penting untuk mempercepat pencapaian tujuan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Menurut saya harus ada keterpaduan antara pelatihan, penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, kemitraan dengan dunia usaha, dan pemberdayaan

masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan Baitul Mal dan lembaga ekonomi syariah sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan pekerjaan atau membangun usaha.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja melihat keberhasilan program pengentasan pengangguran jika ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*?

Informan : Keberhasilan tidak hanya dilihat dari berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan, memiliki penghasilan yang halal dan layak, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Peneliti : Mengapa pekerjaan dan penghasilan yang layak dapat dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan dalam *maqasid syariah*?

Informan : Karena dengan pekerjaan dan penghasilan yang layak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup, menjaga keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak, memenuhi kebutuhan kesehatan, dan hidup secara bermartabat. Masyarakat juga menjadi lebih mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.

Peneliti : Apa kondisi ideal yang ingin dicapai pemerintah melalui program ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Kondisi idealnya adalah masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pekerjaan dan kesempatan usaha, mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi, memperoleh penghasilan yang layak dan halal, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

- Peneliti : Apa langkah yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi peningkatan jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Ketika terjadi peningkatan jumlah pencari kerja, pemerintah berupaya melaksanakan pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja maupun berwirausaha. Pelatihan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan peluang usaha sendiri.
- Peneliti : Seberapa konsisten pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan kerja bagi masyarakat, khususnya pemuda dan pencari kerja?
- Informan : Pemerintah daerah setiap tahun melaksanakan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya bagi pemuda dan pencari kerja. Program pelatihan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Peneliti : Apakah pelatihan kerja dilaksanakan secara berkelanjutan atau hanya berdasarkan program tertentu dalam satu periode anggaran?
- Informan : Pemerintah daerah setiap tahun melaksanakan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya bagi pemuda dan pencari kerja. Pelaksanaan program tentu disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah. Karena kebutuhan masyarakat dan pasar kerja terus berubah, jenis pelatihan juga perlu disesuaikan dari waktu ke waktu.
- Peneliti : Bagaimana hasil evaluasi program pelatihan kerja digunakan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan kualitas program pada periode berikutnya?

Informan : Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki program pelatihan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah jenis keterampilan yang diberikan masih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah juga perlu melihat apakah peserta memperoleh manfaat setelah mengikuti pelatihan.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. STRUKTURAL

Peneliti : Bagaimana Bapak melihat kondisi akses masyarakat terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Secara umum, kesempatan kerja di Kabupaten Aceh Besar terus berkembang, namun penyebarannya belum merata. Sebagian besar peluang kerja masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki aktivitas ekonomi, industri, perdagangan, maupun jasa yang lebih berkembang. Sementara itu, masyarakat di beberapa wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi lowongan kerja maupun kesempatan bekerja. Selain faktor geografis, tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan kemampuan menggunakan teknologi juga memengaruhi peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan.

Peneliti : Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi efektivitas program pengurangan pengangguran?

Informan : Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta pelatihan belum dapat langsung memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program. Meskipun keterampilan mereka meningkat, kesempatan kerja yang tersedia belum selalu sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja mengatasi ketimpangan akses tersebut sesuai prinsip *maqasid syariah*?

Informan : Kami memperluas layanan informasi pasar kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan, penyelenggaraan bursa kerja (*job fair*), pelayanan antar kerja, serta kerja sama dengan perusahaan di berbagai sektor. Dalam perspektif *maqasid syariah*, setiap masyarakat memiliki hak memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerataan akses terhadap pekerjaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

Peneliti : Apa tantangan utama terkait kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Tantangan terbesar adalah masih adanya kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Sebagian pencari kerja belum memiliki sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, maupun keterampilan digital yang saat ini sangat dibutuhkan.

Peneliti : Bagaimana dampaknya terhadap angka pengangguran?

Informan : Keterbatasan kompetensi menyebabkan sebagian pencari kerja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh pekerjaan. Bahkan terdapat perusahaan yang akhirnya merekrut tenaga kerja dari luar daerah karena belum menemukan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- Peneliti : Apa langkah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi masalah tersebut?
- Informan : Kami terus meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, memperkuat kerja sama dengan Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri. Selain itu, kami mendorong peserta mengikuti sertifikasi kompetensi agar kemampuan mereka diakui secara profesional.
- Peneliti : Bagaimana kondisi investasi memengaruhi penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Investasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penciptaan lapangan kerja. Semakin banyak investasi yang masuk ke daerah, maka semakin besar pula peluang terbentuknya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian, investasi belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar sehingga kesempatan kerja juga masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
- Peneliti : Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja?
- Informan : Kami dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan, tetapi apabila investasi yang menyerap tenaga kerja masih terbatas, maka proses penempatan kerja tentu membutuhkan waktu yang lebih lama.
- Peneliti : Bagaimana harapan Bapak terhadap perkembangan investasi daerah?
- Informan : Kami berharap investasi yang masuk ke Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi seperti industri pengolahan, pertanian modern, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil menengah. Dengan meningkatnya investasi, masyarakat lokal akan memiliki kesempatan

memperoleh pekerjaan yang lebih luas sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peneliti : Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program ketenagakerjaan?

Informan : Pengembangan kompetensi tenaga kerja membutuhkan biaya yang relatif besar karena mencakup penyediaan instruktur, peralatan pelatihan, bahan praktik, sertifikasi kompetensi, hingga pendampingan peserta setelah pelatihan. Sementara itu, kemampuan anggaran pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan sehingga kami harus menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.

Peneliti : Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menjaga efektivitas penggunaan anggaran tersebut?

Informan : Kami memastikan bahwa setiap pelatihan dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kerja sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat.

Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan anggaran program ketenagakerjaan?

Informan : Seluruh program direncanakan melalui mekanisme perencanaan daerah yang terbuka dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan kegiatan dipantau melalui laporan fisik dan keuangan, pemeriksaan internal, serta evaluasi terhadap pencapaian target program.

Peneliti : Menurut pemerintah daerah, apakah masih terdapat kesenjangan antara keterampilan masyarakat dengan kebutuhan pasar kerja? Jika ada, bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kesempatan kerja masyarakat?

Informan : Masih banyak masyarakat yang belum memiliki keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh

pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengurangan pengangguran.

B. INSTITUSIONAL

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan pengangguran di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Koordinasi antarperangkat daerah pada dasarnya telah berjalan dengan baik karena penanganan pengangguran tidak dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja saja. Kami harus bekerja sama dengan Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan, Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Dinas Pendidikan terkait peningkatan kualitas lulusan, Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan kewirausahaan, Dinas Penanaman Modal untuk mendorong investasi, serta perangkat daerah lainnya.

Peneliti : Apa dampak apabila koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal?

Informan : Apabila koordinasi belum optimal, maka terdapat kemungkinan pelaksanaan program menjadi kurang efektif.

Peneliti : Bagaimana upaya Dinas Tenaga Kerja memperkuat koordinasi tersebut?

Informan : Kami aktif mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), forum perangkat daerah, Musrenbang, maupun berbagai forum teknis lainnya.

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai regulasi yang ada dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Secara umum regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan. Pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah telah memiliki berbagai kebijakan mengenai pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja.

Peneliti : Apakah terdapat kendala regulasi yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan : Dalam praktiknya terdapat beberapa prosedur administratif yang membutuhkan proses cukup panjang, terutama ketika pelaksanaan program melibatkan berbagai instansi maupun pemerintah pusat. Selain itu, perubahan regulasi terkadang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Peneliti : Bagaimana harapan Bapak terhadap penyempurnaan regulasi ke depan?

Informan : Kami berharap regulasi ketenagakerjaan semakin adaptif terhadap perubahan dunia kerja, mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal, memberikan kemudahan bagi dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan.

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai kapasitas aparatur Dinas Tenaga Kerja saat ini?

Informan : Secara umum aparatur kami memiliki komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kami juga menyadari bahwa perkembangan ketenagakerjaan saat ini menuntut peningkatan kompetensi aparatur, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan digital, penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi, serta penguasaan perkembangan pasar kerja.

Peneliti : Bagaimana keterbatasan kapasitas aparatur memengaruhi pelayanan?

Informan : Pelayanan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks. Tidak hanya memberikan kartu pencari kerja atau menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, membangun kemitraan dengan perusahaan, memberikan konsultasi karier, hingga memanfaatkan sistem informasi ketenagakerjaan.

Peneliti : Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur?

Informan : Kami secara rutin mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi kompetensi, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Selain itu, kami juga memperkuat budaya belajar di lingkungan organisasi melalui diskusi internal, evaluasi program, dan berbagi pengalaman antarpegawai.

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai sistem monitoring dan evaluasi terhadap program ketenagakerjaan?

Informan : Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam seluruh pelaksanaan program. Selama ini kami melakukan pemantauan melalui laporan kegiatan, kunjungan lapangan, evaluasi pelaksanaan pelatihan, pemantauan peserta pemagangan, serta koordinasi dengan perusahaan pengguna tenaga kerja.

Peneliti : Bagaimana transparansi diterapkan dalam proses evaluasi program?

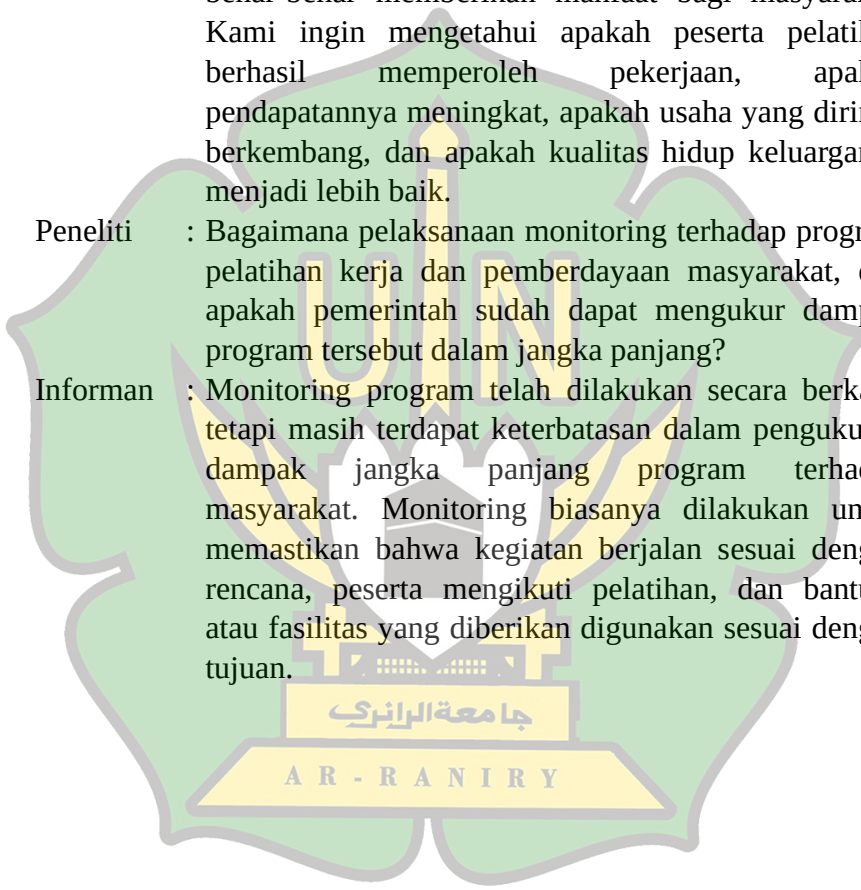
Informan : Seluruh hasil evaluasi menjadi bagian dari laporan kinerja perangkat daerah dan digunakan sebagai dasar penyempurnaan program pada tahun berikutnya. Kami juga menerima berbagai masukan dari peserta pelatihan, perusahaan, maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi pelayanan. Keterbukaan terhadap masukan tersebut penting agar kualitas pelayanan pemerintah dapat terus meningkat.

Peneliti : Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi mendukung pencapaian tujuan *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya, monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan menilai keberhasilan administratif suatu program, tetapi juga memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami ingin mengetahui apakah peserta pelatihan berhasil memperoleh pekerjaan, apakah pendapatannya meningkat, apakah usaha yang dirintis berkembang, dan apakah kualitas hidup keluarganya menjadi lebih baik.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan monitoring terhadap program pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat, dan apakah pemerintah sudah dapat mengukur dampak program tersebut dalam jangka panjang?

Informan : Monitoring program telah dilakukan secara berkala, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam pengukuran dampak jangka panjang program terhadap masyarakat. Monitoring biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, peserta mengikuti pelatihan, dan bantuan atau fasilitas yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW04 (Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Bagaimana visi dan misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan?

Informan : Visi kami adalah mewujudkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai syariat Islam sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pengelolaan zakat bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih merata.

Peneliti : Bagaimana visi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam?

Informan : Prinsip keadilan diwujudkan melalui penyaluran dana zakat kepada kelompok masyarakat yang benar-benar berhak menerima sesuai ketentuan syariat. Seluruh proses penetapan mustahik dilakukan melalui verifikasi sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Selain itu, kami berupaya menjaga keseimbangan antara bantuan yang

bersifat konsumtif dengan program pemberdayaan ekonomi sehingga mustahik memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Keadilan menurut Islam bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan melalui usaha yang halal dan produktif.

Peneliti : Bagaimana visi tersebut diarahkan untuk memberikan kemaslahatan jangka panjang?

Informan : Kami berharap zakat dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, selain memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, kami juga mengembangkan berbagai program zakat produktif seperti bantuan modal usaha, pemberdayaan UMKM, bantuan alat kerja, pelatihan usaha, serta pembinaan mustahik.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal menganalisis kondisi kemiskinan sebelum menyusun program?

Informan : Kami melakukan identifikasi melalui data mustahik, hasil survei lapangan, usulan dari pemerintah gampong, rekomendasi kecamatan, serta koordinasi dengan Dinas Sosial dan perangkat daerah lainnya. Selain melihat tingkat pendapatan, kami juga memperhatikan kondisi tempat tinggal, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan, kepemilikan usaha, serta kemampuan ekonomi secara menyeluruh.

Peneliti : Bagaimana hasil analisis tersebut digunakan dalam penyusunan program?

Informan : Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan jenis bantuan yang paling sesuai bagi setiap kelompok mustahik. Masyarakat yang membutuhkan bantuan konsumtif tentu akan memperoleh pendekatan yang berbeda dengan masyarakat yang memiliki potensi mengembangkan usaha produktif.

- Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam proses tersebut?
- Informan : Seluruh proses pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kami melibatkan aparatur gampong dan melakukan verifikasi lapangan agar data yang digunakan benar-benar akurat.
- Peneliti : Apa prioritas utama Baitul Mal dalam mendukung pengentasan kemiskinan?
- Informan : Prioritas kami adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan zakat secara produktif. Selain bantuan kebutuhan dasar, kami juga mengembangkan program modal usaha, bantuan alat produksi, pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta penguatan ekonomi keluarga.
- Peneliti : Bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran?
- Informan : Program zakat produktif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun usaha sendiri sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Beberapa penerima bantuan bahkan mampu mengembangkan usahanya dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.
- Peneliti : Bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan *maqasid syariah*?
- Informan : Seluruh program kami diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Bantuan pendidikan mendukung *hifz al-'aql*, bantuan kesehatan mendukung *hifz al-nafs*, sementara zakat produktif mendukung *hifz al-mal*.
- Peneliti : Apakah seluruh program tersebut dituangkan dalam dokumen resmi?

Informan : Ya. Seluruh kegiatan direncanakan melalui Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dokumen anggaran, serta berbagai pedoman operasional yang menjadi dasar pelaksanaan program Baitul Mal.

Peneliti : Bagaimana keberhasilan program diukur?

Informan : Kami menggunakan berbagai indikator, seperti jumlah mustahik yang menerima bantuan, perkembangan usaha penerima zakat produktif, peningkatan pendapatan keluarga, keberhasilan usaha yang dibina, serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat.

Peneliti : Bagaimana tindak lanjut dilakukan setelah evaluasi?

Informan : Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme pendataan, meningkatkan kualitas pendampingan usaha, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mengembangkan inovasi program pemberdayaan ekonomi umat.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana komitmen Bapak sebagai Ketua Badan Pelaksana Baitul Mal dalam mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya, kami memiliki komitmen agar seluruh dana yang dihimpun benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami memandang bahwa zakat bukan sekadar instrumen bantuan sosial, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi umat yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam perspektif *maqasid syariah*, komitmen tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Peneliti : Bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan program?

Informan : Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan program yang berorientasi pada pemberdayaan. Selain memberikan bantuan konsumtif kepada fakir, miskin, dan kelompok rentan lainnya, kami juga mengembangkan berbagai program ekonomi produktif yang disesuaikan dengan potensi masing-masing penerima manfaat. Kami juga berusaha memastikan bahwa seluruh bantuan diberikan secara tepat sasaran melalui proses verifikasi yang ketat sehingga dana zakat benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariat.

Peneliti : Bagaimana Bapak membangun komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

Informan : Saya selalu mengingatkan bahwa pekerjaan di Baitul Mal bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga merupakan amanah yang memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, setiap pegawai harus bekerja secara profesional, jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Kami secara rutin melaksanakan pembinaan, rapat evaluasi, diskusi internal, serta peningkatan kapasitas pegawai agar kualitas pelayanan terus meningkat.

Peneliti : Bagaimana bentuk dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi mustahik?

Informan : Sebagai pimpinan, saya memberikan dukungan melalui penyusunan kebijakan yang jelas, penguatan koordinasi antarbidang, penyediaan pendampingan bagi penerima bantuan, serta memastikan setiap program dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

- Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas?
- Informan : Setiap program direncanakan berdasarkan dokumen resmi, memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, mekanisme pelaksanaan, serta sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami melakukan monitoring terhadap penyaluran dana, perkembangan usaha penerima zakat produktif, serta pelaksanaan pendampingan.
- Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pelaksanaan program?
- Informan : Kami berusaha memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat, persyaratan penerima bantuan, jenis program yang tersedia, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Selain melalui laporan tahunan, informasi juga disampaikan melalui media resmi Baitul Mal, kegiatan sosialisasi, serta koordinasi dengan pemerintah gampong.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi yang dibangun dengan seluruh pegawai di lingkungan Baitul Mal?
- Informan : Kami membangun komunikasi yang terbuka melalui rapat rutin, evaluasi berkala, diskusi program, dan komunikasi sehari-hari. Saya memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan ide, masukan, maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
- Peneliti : Bagaimana koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah dan lembaga lain?
- Informan : Kami secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta instansi lainnya agar program pemberdayaan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri.

- Peneliti : Bagaimana komunikasi dilakukan dengan masyarakat penerima manfaat?
- Informan : Kami melakukan sosialisasi secara langsung ke gampong-gampong, membuka layanan konsultasi di kantor Baitul Mal, serta menjalin komunikasi melalui aparaturnya gampong dan pendamping program. Selain menyampaikan informasi mengenai bantuan, kami juga mendengarkan kebutuhan masyarakat sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi mereka.
- Peneliti : Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas program Baitul Mal?
- Informan : Keputusan tidak diambil secara sepihak. Kami melakukan pembahasan bersama jajaran Baitul Mal dengan mempertimbangkan data mustahik, hasil survei lapangan, masukan dari pemerintah gampong, perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan?
- Informan : Setiap keputusan didasarkan pada ketentuan syariat Islam mengenai golongan penerima zakat (*asnaf*) serta hasil verifikasi lapangan. Kami memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi persyaratan sehingga tidak terjadi penyimpangan ataupun perlakuan yang tidak adil.
- Peneliti : Bagaimana keputusan tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan?
- Informan : Dalam setiap keputusan, kami selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi lebih banyak diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, pengembangan keterampilan, serta pendampingan mustahik agar

mampu mandiri. Perubahan tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan zakat dalam perspektif *maqasid syariah*, yaitu terciptanya keadilan ekonomi dan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menetapkan sasaran utama dalam program pengentasan kemiskinan?

Informan : Penetapan sasaran program selalu mengacu pada ketentuan syariat Islam mengenai delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Dalam praktiknya, kami memprioritaskan fakir, miskin, serta kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk diberdayakan melalui program ekonomi produktif.

Peneliti : Bagaimana sasaran tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam *maqasid syariah*?

Informan : Prinsip keadilan kami terapkan melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Bantuan tidak diberikan karena kedekatan ataupun faktor lainnya, tetapi berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi ekonomi calon penerima. Dalam perspektif *maqasid syariah*, keadilan berarti memberikan hak kepada mereka yang memang berhak menerimanya, sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih merata dan kesenjangan sosial dapat dikurangi.

Peneliti : Bagaimana sasaran tersebut diarahkan agar memberikan kemaslahatan jangka panjang?

Informan : Kami ingin agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat. Oleh sebab itu, selain bantuan konsumtif kami lebih banyak

mengembangkan program pemberdayaan seperti zakat produktif, bantuan modal usaha, alat kerja, bantuan pertanian, peternakan, serta pembinaan usaha mikro.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal menjaga konsistensi tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Informan : Sejak awal kami menetapkan bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, meskipun bentuk program dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, orientasi utamanya tetap sama, yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan umat.

Peneliti : Bagaimana akuntabilitas dijaga agar tujuan tersebut benar-benar tercapai?

Informan : Setiap program memiliki target penerima manfaat, indikator keberhasilan, mekanisme pelaporan, dan evaluasi yang jelas. Kami juga melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha penerima zakat produktif untuk mengetahui apakah bantuan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

Peneliti : Bagaimana masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat program Baitul Mal?

Informan : Kami menyampaikan informasi melalui sosialisasi di tingkat gampong, media sosial resmi, website, koordinasi dengan aparat desa, masjid, serta berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat.

Peneliti : Apa hasil utama yang ingin dicapai melalui program-program Baitul Mal?

Informan : Hasil utama yang ingin kami capai adalah meningkatnya kesejahteraan mustahik, berkembangnya usaha produktif masyarakat, berkurangnya jumlah keluarga miskin, meningkatnya

kemandirian ekonomi, serta bertambahnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal menilai bahwa program tersebut benar-benar berhasil?

Informan : Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat. Kami melihat apakah usaha yang dijalankan berkembang, apakah pendapatan keluarga meningkat, apakah anak-anak dapat melanjutkan pendidikan, serta apakah penerima bantuan mulai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Peneliti : Bagaimana *outcome* tersebut dikaitkan dengan *maqasid syariah*?

Informan : Semua program kami diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan *maqasid syariah*. Ketika masyarakat memperoleh penghasilan yang layak, maka harta mereka terlindungi (*hifz al-mal*). Ketika kebutuhan hidup keluarga dapat dipenuhi, maka kehidupan mereka juga lebih terjamin (*hifz al-nafs*). Bantuan pendidikan mendukung terpeliharanya akal (*hifz al-'aql*), sedangkan pembinaan keagamaan membantu menjaga agama (*hifz al-din*).

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi?

Informan : Keberlanjutan menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itu, penerima zakat produktif tidak hanya diberikan bantuan modal, tetapi juga mendapatkan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi usaha secara berkala. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar berkembang menjadi usaha yang mampu memberikan pendapatan secara berkelanjutan.

Peneliti : Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program?

Informan : Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program. Kami mendorong penerima bantuan untuk memiliki komitmen mengembangkan usahanya, mengikuti pendampingan, memanfaatkan bantuan secara bertanggung jawab, dan berbagi pengalaman kepada penerima manfaat lainnya.

Peneliti : Apa harapan Bapak terhadap peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar pada masa mendatang?

Informan : Kami berharap Baitul Mal semakin mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Aceh Besar. Pengelolaan zakat diharapkan semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat sehingga penghimpunan dana zakat terus meningkat. Kami juga berharap semakin banyak program zakat produktif yang mampu melahirkan pelaku usaha baru, mengurangi angka kemiskinan, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, kami ingin melihat semakin banyak mustahik yang berhasil berubah menjadi muzakki.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Pelaksanaan program dimulai dari proses identifikasi calon penerima manfaat melalui usulan pemerintah gampong, hasil survei lapangan, serta verifikasi administrasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Setelah calon mustahik dinyatakan memenuhi persyaratan, kami menentukan bentuk bantuan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk masyarakat yang telah memiliki usaha, kami

- memberikan bantuan modal usaha, peralatan produksi, maupun tambahan sarana pendukung usaha.
- Peneliti : Bagaimana Bapak memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran?
- Informan : Kami menerapkan mekanisme verifikasi yang cukup ketat. Tim melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ekonomi calon penerima, jenis usaha yang dijalankan, serta potensi pengembangannya. Selain itu, kami juga meminta rekomendasi dari aparat gampong karena mereka lebih memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. Proses tersebut bertujuan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sekaligus memastikan bahwa dana zakat benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.
- Peneliti : Bagaimana program tersebut mencerminkan prinsip *maqasid syariah*?
- Informan : Program pemberdayaan mustahik diarahkan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Ketika seseorang memiliki usaha yang berkembang dan memperoleh penghasilan yang layak, maka kehidupannya menjadi lebih baik, keluarganya lebih sejahtera, dan martabatnya sebagai manusia juga terjaga. Dalam perspektif *maqasid syariah*, kondisi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), serta terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.
- Peneliti : Bagaimana bentuk kerja sama Baitul Mal dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengentasan kemiskinan?
- Informan : Kami menjalin koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian,

Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah kecamatan dan gampong.

Peneliti : Bagaimana kerja sama dengan lembaga nonpemerintah dilakukan?

Informan : Selain pemerintah, kami juga bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, masjid, dayah, lembaga amal zakat, serta pelaku usaha. Kolaborasi tersebut sangat membantu dalam pengembangan pelatihan usaha, pendampingan mustahik, edukasi zakat, maupun penguatan pemasaran produk usaha masyarakat.

Peneliti : Mengapa sinergi tersebut penting dalam perspektif *maqasid syariah*?

Informan : *Maqasid syariah* mengajarkan bahwa kemaslahatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Melalui kolaborasi, sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga dapat saling melengkapi sehingga manfaat yang diterima masyarakat menjadi lebih besar, lebih merata, dan lebih berkelanjutan.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal melakukan monitoring terhadap penerima zakat produktif?

Informan : Monitoring dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan, komunikasi langsung dengan penerima manfaat, laporan perkembangan usaha, serta koordinasi dengan aparat gampong. Kami ingin mengetahui apakah bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan, bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan, serta kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat.

Peneliti : Mengapa pendampingan dianggap penting?

Informan : Banyak usaha kecil mengalami kesulitan bukan karena kekurangan modal semata, tetapi juga karena

keterbatasan pengalaman dalam mengelola usaha, pemasaran, maupun pencatatan keuangan. Oleh sebab itu, pendampingan menjadi bagian penting agar penerima zakat mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Peneliti : Bagaimana monitoring tersebut mendukung pencapaian tujuan *maqasid syariah*?

Informan : Monitoring memastikan bahwa dana zakat benar-benar memberikan manfaat bagi mustahik. Kami ingin melihat perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan keluarga, berkembangnya usaha, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi?

Informan : Evaluasi dilakukan dengan melihat berbagai indikator, antara lain jumlah penerima manfaat, perkembangan usaha setelah menerima bantuan, peningkatan pendapatan keluarga, keberhasilan usaha bertahan dalam jangka waktu tertentu, serta perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

Peneliti : Bagaimana hasil evaluasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program?

Informan : Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya. Apabila terdapat jenis bantuan yang kurang efektif, maka kami melakukan penyesuaian baik dari sisi mekanisme penyaluran, bentuk pendampingan, maupun jenis usaha yang didukung.

Peneliti : Apa ukuran keberhasilan terbesar menurut Bapak sebagai pengelola Baitul Mal?

Informan : Bagi kami, ukuran keberhasilan bukan semata-mata besarnya dana zakat yang berhasil dihimpun atau jumlah bantuan yang telah disalurkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika mustahik mampu

bangkit dari kemiskinan, memiliki usaha yang berkembang, memperoleh penghasilan yang layak, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama *maqasid syariah*.

Peneliti : Bagaimana upaya Baitul Mal dalam mengembangkan program ekonomi produktif bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Program zakat produktif terus dikembangkan untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Program tersebut diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik dan memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan usaha. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, seperti bantuan modal usaha, peralatan kerja, maupun sarana pendukung lainnya. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga harta atau *hifz al-mal*, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Peneliti : Selain memberikan bantuan modal atau peralatan usaha, bagaimana Baitul Mal memastikan program zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat?

Informan : Kami tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga berupaya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada penerima manfaat. Mustahik diarahkan agar mampu mengelola bantuan secara produktif, mengembangkan usahanya, serta meningkatkan

pendapatan keluarga. Kami juga melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha penerima bantuan. Apabila terdapat kendala dalam pengelolaan usaha, pemasaran, maupun pemanfaatan bantuan, kami berusaha memberikan arahan atau menghubungkan penerima dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

Peneliti : Bagaimana koordinasi Baitul Mal dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat miskin?

Informan : Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyaluran zakat produktif agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Koordinasi dilakukan terutama dalam memperoleh informasi mengenai kondisi masyarakat, data calon penerima manfaat, serta program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Melalui koordinasi tersebut, kami berusaha menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan. Jika masyarakat sudah mendapatkan program tertentu dari pemerintah daerah, maka Baitul Mal dapat mempertimbangkan bentuk bantuan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Peneliti : Bagaimana bentuk bantuan zakat yang diberikan Baitul Mal untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan pendapatan keluarga?

Informan : Selain bantuan konsumtif, kami juga menjalankan program zakat produktif untuk membantu masyarakat miskin membuka usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan tersebut dapat berupa modal usaha maupun peralatan yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Kami melihat bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang berbeda. Ada yang memiliki kemampuan

berdagang, ada yang memiliki keterampilan tertentu, dan ada pula yang memiliki pengalaman dalam bidang pertanian atau usaha lainnya.

Peneliti : Apa strategi Baitul Mal dalam mengubah bantuan zakat dari sekadar pemenuhan kebutuhan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Informan : Selain bantuan yang bersifat konsumtif, kami juga menjalankan program zakat produktif untuk membantu masyarakat miskin membuka usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan produktif diarahkan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan usaha.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

Peneliti : Menurut Bapak, bagaimana kondisi penghimpunan zakat di Kabupaten Aceh Besar saat ini dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan?

Informan : Secara umum penghimpunan zakat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, terutama dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat melalui Baitul Mal. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan potensi zakat yang sebenarnya dimiliki Kabupaten Aceh Besar, jumlah yang berhasil dihimpun masih belum optimal.

Peneliti : Apa dampak keterbatasan penghimpunan zakat terhadap pelaksanaan program?

Informan : Keterbatasan dana tentu memengaruhi jumlah penerima manfaat yang dapat kami layani setiap

tahun. Kami harus menentukan skala prioritas sehingga belum semua masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan secara bersamaan. Selain itu, beberapa program pemberdayaan ekonomi memerlukan pendampingan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Semakin besar dana yang tersedia, semakin luas pula cakupan program produktif yang dapat kami jalankan.

Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan zakat sesuai prinsip *maqasid syariah*?

Informan : Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih terarah dan manfaatnya lebih luas. Kami juga meningkatkan transparansi pelaporan, memperkuat pelayanan kepada muzakki, serta melakukan sosialisasi kepada dunia usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai komunitas. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama.

Peneliti : Apakah Bapak melihat masih adanya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial maupun zakat?

Informan : Ya, kondisi tersebut masih dijumpai pada sebagian penerima manfaat. Ada masyarakat yang masih menganggap bantuan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup sehingga motivasi untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan produktivitas belum tumbuh secara optimal.

Peneliti : Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi efektivitas program pemberdayaan?

Informan : Apabila penerima bantuan belum memiliki motivasi untuk berkembang, maka dampak program menjadi kurang optimal. Bantuan yang seharusnya menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan dapat habis

digunakan untuk kebutuhan konsumsi tanpa menghasilkan peningkatan pendapatan.

Peneliti : Bagaimana strategi Baitul Mal mengurangi ketergantungan tersebut?

Informan : Kami mengembangkan pola pemberdayaan yang disertai pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, monitoring berkala, serta pembinaan mental dan spiritual. Kami ingin membangun rasa percaya diri masyarakat agar berani mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pemberdayaan lebih utama daripada ketergantungan karena tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu menjaga kehidupannya sendiri.

Peneliti : Bagaimana Bapak melihat akses masyarakat miskin terhadap pembiayaan usaha berbasis syariah?

Informan : Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan, terutama pelaku usaha mikro yang belum memiliki administrasi usaha yang memadai atau belum memenuhi persyaratan lembaga pembiayaan. Akibatnya, mereka sering mengembangkan usaha hanya dengan modal yang sangat terbatas sehingga pertumbuhan usahanya berlangsung lambat.

Peneliti : Apa peran Baitul Mal dalam mengatasi kondisi tersebut?

Informan : Kami berupaya memberikan bantuan modal usaha berbasis zakat produktif kepada mustahik yang memenuhi syarat. Walaupun bantuan tersebut tidak sebesar pembiayaan komersial, setidaknya dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Selain itu, kami juga menjalin komunikasi dengan lembaga keuangan syariah agar masyarakat yang usahanya telah

berkembang dapat memperoleh akses pembiayaan lanjutan secara lebih mudah.

Peneliti : Mengapa akses permodalan penting dalam perspektif *maqasid syariah*?

Informan : Permodalan merupakan salah satu sarana untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) karena memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh penghasilan melalui usaha yang halal. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap modal yang baik, maka mereka memiliki peluang lebih besar meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Peneliti : Apa tantangan terbesar yang dihadapi mustahik setelah memperoleh bantuan usaha?

Informan : Sebagian penerima bantuan masih menghadapi kendala dalam mengelola usaha, seperti pencatatan keuangan, pemasaran, pengembangan produk, serta kemampuan menghadapi persaingan usaha. Ada pula yang mengalami kesulitan karena perubahan kondisi pasar atau keterbatasan jaringan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal saja belum cukup tanpa adanya peningkatan kapasitas usaha.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal mengatasi tantangan tersebut?

Informan : Kami terus memperkuat pendampingan melalui pembinaan usaha, pelatihan manajemen sederhana, motivasi kewirausahaan, serta koordinasi dengan dinas teknis yang memiliki program pengembangan UMKM. Kami berharap mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Peneliti : Bagaimana Bapak memandang hambatan tersebut dalam konteks *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya, hambatan tersebut merupakan tantangan yang harus diatasi bersama. Tujuan zakat bukan hanya mendistribusikan harta, tetapi juga

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan, pendidikan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas usaha menjadi bagian penting agar tujuan *maqasid syariah* dapat diwujudkan secara nyata.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai koordinasi antara Baitul Mal dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan?

Informan : Koordinasi dengan perangkat daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Selama ini kami menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, pemerintah kecamatan, serta pemerintah gampong.

Peneliti : Apa dampaknya apabila koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal?

Informan : Apabila koordinasi belum optimal, terdapat kemungkinan terjadinya duplikasi bantuan pada sebagian penerima, sementara masyarakat lain yang juga membutuhkan justru belum memperoleh layanan. Selain itu, kurangnya pertukaran informasi dapat menyebabkan program pemberdayaan yang dilakukan masing-masing lembaga belum saling melengkapi.

Peneliti : Apa langkah yang dilakukan Baitul Mal untuk memperkuat koordinasi tersebut?

Informan : Kami terus mengikuti forum koordinasi pembangunan daerah, rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Musrenbang, serta berbagai forum lintas sektor lainnya. Selain itu, komunikasi informal dengan perangkat daerah juga

terus kami bangun agar setiap kendala dapat segera diselesaikan.

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Aceh saat ini?

Informan : Secara umum regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat di Aceh. Keberadaan berbagai ketentuan mengenai Baitul Mal memberikan kepastian dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sesuai syariat Islam. Namun demikian, dinamika sosial dan perkembangan ekonomi masyarakat terus berubah.

Peneliti : Apakah masih terdapat kendala regulasi yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan : Dalam pelaksanaan program, terkadang terdapat beberapa prosedur administrasi yang memerlukan waktu sehingga pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti : Apa harapan Bapak terhadap penyempurnaan regulasi ke depan?

Informan : Kami berharap regulasi semakin mampu mendukung pengembangan zakat produktif, memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, mempermudah inovasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendorong optimalisasi potensi zakat di Kabupaten Aceh Besar.

Peneliti : Bagaimana Bapak menilai kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Secara umum kami memiliki sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi dalam mengelola zakat dan melayani masyarakat. Namun demikian, tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks mengharuskan kami terus meningkatkan kompetensi pegawai, baik dalam bidang manajemen zakat,

pemberdayaan ekonomi, teknologi informasi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti : Apa tantangan utama dalam pengembangan kapasitas aparatur Baitul Mal?

Informan : Tantangan utamanya adalah perkembangan kebutuhan masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Aparatur tidak hanya dituntut memahami fiqh zakat, tetapi juga harus menguasai manajemen program, pendampingan usaha, analisis data, komunikasi publik, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Peneliti : Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tersebut?

Informan : Kami secara rutin mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, studi banding, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, kami juga memperkuat budaya evaluasi internal sehingga setiap pengalaman dalam pelaksanaan program menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masa mendatang.

Peneliti : Bagaimana Baitul Mal melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program yang dijalankan?

Informan : Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari proses penghimpunan dana, penyaluran bantuan, hingga perkembangan usaha penerima zakat produktif. Kami melakukan kunjungan lapangan, menerima laporan dari pendamping, berkoordinasi dengan aparatur gampong, serta mengevaluasi seluruh program melalui rapat internal.

Peneliti : Bagaimana peran digitalisasi dalam meningkatkan tata kelola Baitul Mal?

Informan : Pemanfaatan teknologi informasi semakin penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Kami terus mendorong penggunaan sistem

informasi untuk pengelolaan data muzakki, mustahik, administrasi penyaluran bantuan, dokumentasi program, serta penyusunan laporan.

Peneliti : Bagaimana monitoring, evaluasi, dan digitalisasi mendukung pencapaian *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya, monitoring, evaluasi, dan digitalisasi merupakan bagian dari amanah dalam mengelola harta umat. Melalui sistem yang baik, kami dapat memastikan bahwa dana zakat dihimpun dan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam perspektif *maqasid syariah*, tata kelola yang baik bukan hanya mencerminkan akuntabilitas administrasi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan upaya menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat kualitas kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mengembangkan sistem pelayanan yang semakin modern agar Baitul Mal mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW05 (Akademisi Ekonomi Syariah)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan jika ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya, visi dan misi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan secara statistik. Pemerintah harus melihat kemiskinan sebagai persoalan multidimensional yang menyangkut pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara bermartabat. Kalau kita menggunakan perspektif *maqasid syariah*, maka tujuan pembangunan harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan manusia. Artinya, masyarakat bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memperoleh kehidupan yang lebih layak dan mandiri. Dalam konteks Aceh Besar, saya melihat visi pembangunan seharusnya mengintegrasikan pendekatan ekonomi konvensional dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Peneliti : Bagaimana prinsip keadilan seharusnya diterapkan dalam perencanaan kebijakan tersebut?

Informan : Keadilan dalam ekonomi Islam tidak berarti semua orang mendapatkan bantuan dalam jumlah yang sama. Keadilan berarti setiap orang memperoleh hak dan

kesempatan sesuai dengan kebutuhan serta kondisinya. Kelompok miskin ekstrem, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok rentan lainnya membutuhkan intervensi yang lebih besar dibandingkan kelompok yang secara ekonomi sudah relatif kuat.

Peneliti : Sejauh mana perencanaan pembangunan daerah harus memasukkan prinsip kemaslahatan?

Informan : Sangat penting. *Masalah* harus menjadi orientasi akhir kebijakan. Program pemerintah harus ditanyakan kembali: apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, siapa yang menerima manfaat, siapa yang belum memperoleh manfaat, dan apakah manfaat tersebut berkelanjutan? Jangan hanya menghitung berapa program yang dibuat dan berapa anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting adalah perubahan kehidupan masyarakat setelah program dilaksanakan.

Peneliti : Bagaimana pemerintah daerah seharusnya menganalisis kondisi kemiskinan dan pengangguran sebelum menetapkan program?

Informan : Analisis harus menggunakan data yang komprehensif dan diperbarui secara berkala. Pemerintah perlu mengetahui bukan hanya jumlah orang miskin dan pengangguran, tetapi juga karakteristik mereka.

Peneliti : Bagaimana data kemiskinan seharusnya dikaitkan dengan potensi ekonomi syariah?

Informan : Data kemiskinan seharusnya diintegrasikan dengan data potensi ekonomi masyarakat. Misalnya, siapa yang memiliki usaha mikro, siapa yang memiliki keterampilan, siapa yang berpotensi menerima zakat produktif, siapa yang dapat memperoleh pembiayaan syariah, dan siapa yang membutuhkan pelatihan.

- Peneliti : Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam analisis situasi tersebut?
- Informan : Pemerintah harus transparan mengenai sumber data, metode penentuan sasaran, serta dasar penetapan program. Masyarakat perlu mengetahui mengapa suatu wilayah atau kelompok menjadi prioritas. Transparansi juga penting agar tidak terjadi politisasi data kemiskinan.
- Peneliti : Apa prioritas kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran?
- Informan : Menurut saya ada beberapa prioritas. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Kedua, penguatan UMKM dan usaha produktif masyarakat. Ketiga, peningkatan akses terhadap pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Keempat, optimalisasi zakat produktif. Kelima, pengembangan sektor ekonomi lokal yang memiliki keunggulan komparatif.
- Peneliti : Bagaimana zakat dapat ditempatkan dalam strategi pengentasan kemiskinan?
- Informan : Zakat memiliki posisi yang sangat strategis. Namun zakat tidak boleh dipandang hanya sebagai bantuan konsumtif. Untuk kelompok tertentu, zakat dapat digunakan secara produktif selama memenuhi ketentuan syariah.
- Peneliti : Bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan *maqasid syariah*?
- Informan : Ketika kebijakan mampu meningkatkan pendapatan, menjaga kehidupan keluarga, meningkatkan pendidikan, melindungi harta, dan memberikan kesempatan kerja, maka sebenarnya pemerintah sedang menjalankan substansi *maqasid syariah*. Jadi *maqasid syariah* bukan hanya teori keagamaan, tetapi dapat menjadi kerangka evaluasi kebijakan publik.

Peneliti : Seberapa penting dokumen perencanaan dalam menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan?

Informan : Sangat penting. Program pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berdasarkan kebijakan tahunan atau program yang bersifat reaktif. Harus ada kesinambungan antara perencanaan jangka menengah, rencana tahunan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Peneliti : Bagaimana akuntabilitas program dapat diperkuat?

Informan : Setiap program harus memiliki indikator input, output, dan outcome. Pemerintah jangan hanya melaporkan bahwa anggaran sudah terserap atau kegiatan sudah dilaksanakan. Yang harus dilihat adalah apakah setelah program berjalan pendapatan masyarakat meningkat, apakah pengangguran berkurang, apakah usaha masyarakat berkembang, dan apakah kualitas hidup meningkat.

Peneliti : Bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam tindak lanjut program?

Informan : Prinsip utamanya adalah amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menilai pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam pengentasan kemiskinan?

Informan : Komitmen pimpinan sangat menentukan. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan jika tidak ada kepemimpinan yang konsisten. Pimpinan daerah harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Keberpihakan tersebut bukan berarti mengabaikan kelompok lain, tetapi

memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian yang proporsional.

Peneliti : Apa bentuk komitmen yang dapat dilihat secara nyata?

Informan : Bisa dilihat dari prioritas anggaran, konsistensi program, koordinasi antarperangkat daerah, keberanian melakukan evaluasi, dan keterbukaan terhadap kritik. Jika kemiskinan menjadi prioritas, maka kebijakan pemerintah harus menunjukkan keberpihakan tersebut secara nyata.

Peneliti : Bagaimana dukungan pimpinan dapat memengaruhi keberhasilan program?

Informan : Pimpinan harus memberikan dukungan politik, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Program pemberdayaan tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan. Harus ada dukungan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan program sehingga mereka memiliki kapasitas untuk bekerja secara optimal.

Peneliti : Apa yang terjadi apabila dukungan pimpinan lemah?

Informan : Program akan berjalan sektoral, anggaran mungkin tidak optimal, koordinasi menjadi lemah, dan inovasi sulit berkembang. Akhirnya program hanya menjadi kegiatan administratif tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan.

Peneliti : Bagaimana komunikasi antarlembaga seharusnya dilakukan?

Informan : Harus dibangun komunikasi lintas sektor. Kemiskinan bukan hanya persoalan Dinas Sosial. Pengangguran bukan hanya persoalan Dinas Tenaga Kerja. Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Baitul Mal, lembaga keuangan syariah, pemerintah gampong, dan perguruan tinggi harus memiliki ruang koordinasi yang jelas.

- Peneliti : Apa manfaat kerja sama dengan Baitul Mal?
- Informan : Baitul Mal memiliki sumber daya dan instrumen yang berbeda dari pemerintah. Zakat dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang memenuhi kriteria mustahik. Jika pemerintah mampu mengintegrasikan program pemberdayaan dengan program Baitul Mal tanpa mencampuradukkan kewenangan dan ketentuan syariah, maka dampaknya bisa lebih besar.
- Peneliti : Bagaimana seharusnya pengambilan keputusan terkait kemiskinan dilakukan?
- Informan : Keputusan harus berbasis data, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi lapangan. Data statistik penting, tetapi pemerintah juga perlu mendengar masyarakat. Musyawarah merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam. Kebijakan yang menyangkut masyarakat sebaiknya dibangun melalui proses partisipatif.
- Peneliti : Bagaimana memastikan keputusan tersebut adil?
- Informan : Dengan memastikan bahwa kelompok yang paling rentan tidak kehilangan akses. Pemerintah harus melakukan analisis dampak kebijakan terhadap kelompok miskin.

C. FOKUS/TUJUAN

- Peneliti : Bagaimana tujuan kebijakan pengentasan kemiskinan seharusnya dirumuskan?
- Informan : Tujuannya harus jelas dan tidak terlalu umum. Misalnya bukan hanya "meningkatkan kesejahteraan masyarakat", tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas UMKM, atau peningkatan akses pembiayaan produktif.

- Peneliti : Apa yang dimaksud kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam?
- Informan : Kesejahteraan dalam Islam lebih luas daripada pendapatan. Ada dimensi material dan spiritual. Masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang halal, dan memiliki kehidupan yang bermartabat.
- Peneliti : Apakah tujuan program sebaiknya menggunakan pendekatan SMART?
- Informan : Ya. Tujuan harus spesifik, dapat diukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui apakah program berhasil atau tidak.
- Peneliti : Mengapa pengukuran penting dalam perspektif akuntabilitas?
- Informan : Karena masyarakat berhak mengetahui hasil dari penggunaan sumber daya publik. Pemerintah harus dapat menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya.
- Peneliti : Bagaimana tujuan pengentasan kemiskinan seharusnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah?
- Informan : Tujuan tersebut harus konsisten mulai dari dokumen perencanaan jangka menengah sampai dengan rencana kerja dan penganggaran tahunan. Jangan sampai dokumen perencanaan mengatakan satu hal tetapi program anggarannya berbeda.
- Peneliti : Apa pentingnya sinkronisasi tersebut?
- Informan : Agar ada kesinambungan kebijakan. Pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan melalui satu tahun anggaran.
- Peneliti : Bagaimana target outcome seharusnya ditetapkan?
- Informan : Target harus memperhatikan kelompok yang paling membutuhkan. Misalnya, bukan hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan,

tetapi juga memastikan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendapatan kelompok miskin, dan peningkatan kesempatan kerja.

Peneliti : Apakah target outcome harus diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang?

Informan : Ya. Program yang hanya membuat masyarakat bertahan selama beberapa bulan belum dapat disebut sebagai solusi kemiskinan yang berkelanjutan. Pemerintah harus menciptakan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Itulah mengapa pendidikan, keterampilan, modal produktif, akses pasar, dan pendampingan sangat penting.

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menilai banyaknya program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan?

Informan : Jumlah program bukan ukuran utama keberhasilan. Yang lebih penting adalah kualitas dan dampaknya. Terlalu banyak program yang tidak terintegrasi justru dapat menyebabkan pemborosan. Lebih baik beberapa program strategis tetapi terintegrasi dan memberikan dampak nyata.

Peneliti : Bagaimana program dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar?

Informan : Program harus menyasar akar persoalan. Jika masalahnya adalah keterampilan, berikan pelatihan yang relevan. Jika masalahnya modal, berikan akses pembiayaan. Jika masalahnya pemasaran, bantu akses pasar.

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya transparansi anggaran?

Informan : Transparansi merupakan bagian dari amanah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan. Namun transparansi jangan hanya berupa angka realisasi anggaran. Harus disertai informasi tentang hasil yang dicapai.

- Peneliti : Apakah penyerapan anggaran yang tinggi berarti program berhasil?
- Informan : Tidak. Anggaran dapat terserap 100 persen tetapi program tidak memberikan dampak yang berarti. Karena itu, evaluasi harus menghubungkan anggaran dengan outcome.
- Peneliti : Apa indikator keberhasilan utama program pengentasan kemiskinan?
- Informan : Indikatornya antara lain penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan keberlanjutan usaha, serta peningkatan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
- Peneliti : Bagaimana menilai kemaslahatan masyarakat?
- Informan : Kita perlu melihat perubahan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Apakah mereka lebih mandiri? Apakah anak-anaknya dapat bersekolah? Apakah kesehatan keluarga membaik? Apakah mereka memiliki pekerjaan yang halal dan produktif? Itu semua merupakan bagian dari kemaslahatan.
- Peneliti : Bagaimana evaluasi program seharusnya dilakukan?
- Informan : Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan objektif. Jangan hanya dilakukan ketika ada masalah. Evaluasi harus menjadi bagian dari siklus kebijakan.
- Peneliti : Apa yang harus dilakukan jika program tidak mencapai target?
- Informan : Jangan langsung menyalahkan pelaksana. Pemerintah harus melihat akar masalahnya. Apakah desain program salah, datanya tidak tepat, anggarannya kurang, pendampingannya lemah, atau kondisi eksternal berubah. Setelah itu dilakukan perbaikan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, perbaikan kebijakan diperlukan agar kemaslahatan masyarakat semakin besar.

- Peneliti : Bagaimana seharusnya pemerintah menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran?
- Informan : evaluasi program seharusnya tidak hanya melihat penyerapan anggaran, tetapi juga dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, aspek apa yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam evaluasi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran?
- Informan : Evaluasi program seharusnya lebih menekankan pada outcome dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan hanya pada realisasi kegiatan atau penyerapan anggaran.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat ketimpangan akses ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar?
- Informan : Ketimpangan akses masih menjadi persoalan penting. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap modal, informasi, pasar, teknologi, dan lapangan pekerjaan. Masyarakat yang tinggal dekat pusat ekonomi biasanya memiliki akses yang lebih baik dibandingkan masyarakat di wilayah yang lebih terpencil.
- Peneliti : Apakah kondisi tersebut memengaruhi distribusi manfaat ekonomi syariah?
- Informan : Tentu. Kalau akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, pembiayaan, maupun zakat produktif tidak merata, maka manfaat ekonomi

syariah juga tidak akan merata. Karena itu, kebijakan ekonomi syariah harus bersifat inklusif.

Peneliti : Bagaimana solusinya?

Informan : Pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan syariah, memperkuat literasi keuangan syariah, meningkatkan akses pasar, dan memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan gampong.

Peneliti : Bagaimana kualitas SDM memengaruhi pengentasan kemiskinan?

Informan : Sangat besar pengaruhnya. Masyarakat dengan keterampilan rendah akan sulit memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif. Karena itu, pendidikan dan pelatihan harus menjadi investasi jangka panjang pemerintah.

Peneliti : Bagaimana keterbatasan SDM memengaruhi ekonomi syariah?

Informan : Ekonomi syariah membutuhkan SDM yang memahami dua aspek sekaligus, yaitu aspek bisnis dan aspek syariah. Tanpa SDM yang kompeten, perkembangan ekonomi syariah akan berjalan lambat.

Peneliti : Apa strategi yang diperlukan?

Informan : Pendidikan, sertifikasi kompetensi, pelatihan kewirausahaan, literasi digital, literasi keuangan syariah, dan penguatan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, serta lembaga ekonomi syariah.

Peneliti : Bagaimana infrastruktur memengaruhi kesempatan ekonomi masyarakat?

Informan : Infrastruktur menentukan akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, pelatihan, transportasi, dan berbagai layanan ekonomi. Jika infrastruktur tidak merata, biaya ekonomi masyarakat di wilayah tertentu menjadi lebih tinggi.

- Peneliti : Apakah kondisi tersebut dapat menghambat ekonomi syariah?
- Informan : Bisa. Misalnya pelaku UMKM memiliki produk yang bagus tetapi sulit memasarkannya karena akses transportasi atau jaringan digital terbatas. Karena itu, pembangunan infrastruktur juga harus dipandang sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
- Peneliti : Bagaimana transparansi pembangunan infrastruktur diperlukan?
- Informan : Masyarakat perlu mengetahui prioritas pembangunan, anggaran, dan manfaat yang diharapkan. Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan sumber daya publik.
- Peneliti : Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi program pengentasan kemiskinan?
- Informan : Keterbatasan fiskal tentu membatasi ruang pemerintah untuk membiayai program. Karena itu, pemerintah harus melakukan prioritas anggaran dan mencari sumber pembiayaan alternatif yang sah. Dalam konteks Aceh, zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat miskin sesuai ketentuan syariah.
- Peneliti : Bagaimana penggunaan anggaran dapat tetap akuntabel?
- Informan : Dengan perencanaan yang baik, penganggaran berbasis kinerja, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi outcome. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengurangi akuntabilitas.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran?
- Informan : Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, program pelatihan kerja dan

peningkatan kapasitas masyarakat perlu terus diperluas agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

Peneliti : Bagaimana instrumen ekonomi syariah dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah daerah?

Informan : Optimalisasi instrumen ekonomi syariah seperti zakat produktif, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi umat dapat menjadi alternatif solusi dalam membantu mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ekonomi syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ekonomi syariah masih perlu diperkuat agar strategi ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Peneliti : Apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah dari sisi regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi terkait pengembangan ekonomi syariah agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki dukungan kebijakan yang lebih kuat.

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ekonomi syariah?

Informan : Pemahaman aparatur mengenai konsep dan implementasi ekonomi syariah masih perlu diperkuat agar program yang dijalankan dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menilai koordinasi antarlembaga dalam pengentasan kemiskinan?

Informan : Koordinasi masih menjadi tantangan. Masing-masing lembaga memiliki program dan target sendiri. Jika tidak ada integrasi, program dapat berjalan paralel dan bahkan berpotensi tumpang tindih.

Peneliti : Apa dampaknya terhadap prinsip keadilan?

Informan : Dampaknya adalah distribusi manfaat menjadi tidak optimal. Ada kelompok yang menerima berbagai program, sementara kelompok lain belum tersentuh.

Peneliti : Bagaimana solusinya?

Informan : Perlu satu basis data yang terintegrasi, forum koordinasi yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, dan indikator bersama. Baitul Mal juga harus dilibatkan secara strategis karena memiliki instrumen zakat yang sangat relevan dengan pemberdayaan masyarakat miskin.

Peneliti : Bagaimana regulasi dapat menjadi hambatan pengembangan ekonomi syariah?

Informan : Regulasi dapat menjadi hambatan jika terlalu birokratis, tidak adaptif terhadap inovasi, atau belum mengakomodasi perkembangan ekonomi digital dan model bisnis baru. Namun regulasi juga diperlukan untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tetap tertib dan sesuai prinsip syariah.

Peneliti : Bagaimana bentuk koordinasi lintas sektor yang ideal?

Informan : Idealnya ada ekosistem. Pemerintah menyediakan kebijakan dan infrastruktur, Baitul Mal mengoptimalkan zakat, lembaga keuangan menyediakan pembiayaan, perguruan tinggi memberikan pengetahuan dan pendampingan, sementara dunia usaha membantu membuka pasar.

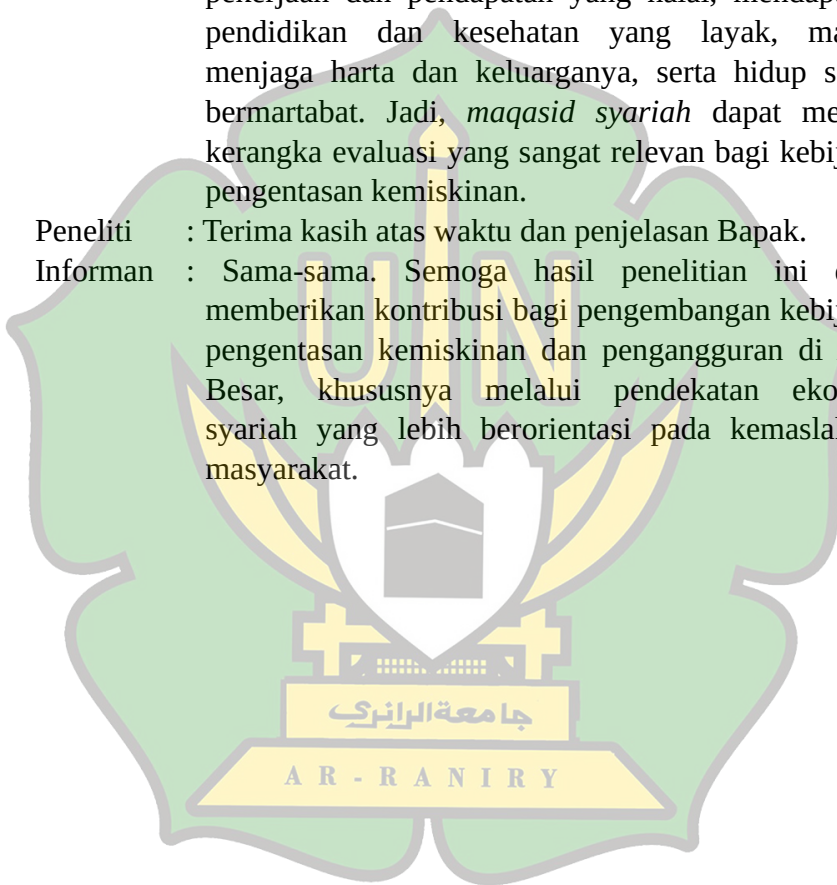
Peneliti : Bagaimana pertanggungjawaban antarlembaga dilakukan?

- Informan : Setiap lembaga harus memiliki indikator yang jelas dan melaporkan hasilnya. Kolaborasi tidak boleh berarti tanggung jawab menjadi kabur. Justru setiap pihak harus mengetahui peran dan kontribusinya.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah dapat memastikan keputusan strategis diambil secara cepat dan tepat?
- Informan : Kuncinya adalah data dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Pemerintah tidak boleh terlalu lambat dalam merespons persoalan masyarakat, tetapi keputusan juga tidak boleh dibuat tanpa analisis.
- Peneliti : Mengapa transparansi penting dalam perspektif Islam?
- Informan : Karena pengelolaan sumber daya publik merupakan amanah. Amanah harus dilaksanakan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga ekonomi syariah.
- Peneliti : Sebagai penutup, menurut Bapak/Ibu, apa strategi paling penting yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan berdasarkan perspektif *maqasid syariah*?
- Informan : Menurut saya, pemerintah harus mengubah paradigma dari sekadar... memberikan bantuan menjadi membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pertama, pemerintah harus memperkuat kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Kedua, harus ada penguatan UMKM dan sektor ekonomi lokal. Ketiga, akses pembiayaan syariah harus diperluas. Keempat, potensi zakat harus dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin sesuai ketentuan syariah. Kelima, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program. Yang paling penting adalah pemerintah harus mengukur keberhasilan berdasarkan perubahan kehidupan masyarakat, bukan

hanya berdasarkan jumlah program atau besarnya anggaran yang terserap. Kalau menggunakan perspektif *maqasid syariah*, maka keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang halal, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, mampu menjaga harta dan keluarganya, serta hidup secara bermartabat. Jadi, *maqasid syariah* dapat menjadi kerangka evaluasi yang sangat relevan bagi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Peneliti : Terima kasih atas waktu dan penjelasan Bapak.

Informan : Sama-sama. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Aceh Besar, khususnya melalui pendekatan ekonomi syariah yang lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW06 (Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran sudah mencerminkan keadilan bagi masyarakat?

Informan : Menurut saya sudah ada upaya ke arah itu. Pemerintah memang memiliki berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, bantuan untuk usaha kecil, dan program lainnya. Tetapi dari yang saya lihat, belum semua masyarakat yang membutuhkan mendapatkan kesempatan yang sama. Ada masyarakat yang mengetahui informasi program dan kemudian bisa mendaftar, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mendapatkan informasi sehingga tidak ikut.

Peneliti : Sejauh mana program pemerintah tersebut memberikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan?

Informan : Kalau untuk bantuan langsung, memang sangat membantu, terutama bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi bantuan seperti itu menurut saya lebih banyak membantu untuk kebutuhan jangka pendek. Untuk kesejahteraan jangka panjang, masyarakat membutuhkan pekerjaan tetap, usaha yang berkembang, keterampilan, modal, dan akses pasar.

- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan rencana program?
- Informan : Informasi sudah ada melalui pemerintah gampong, media sosial, dan kadang-kadang melalui perangkat daerah. Tetapi menurut saya belum semua masyarakat mendapatkan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Biasanya masyarakat yang dekat dengan aparatur atau aktif di gampong lebih cepat mengetahui program.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah memahami kondisi kemiskinan dan pengangguran yang dialami masyarakat?
- Informan : Menurut saya pemerintah cukup memahami, terutama melalui data dari gampong dan kecamatan. Tetapi kondisi masyarakat di lapangan kadang berubah dengan cepat. Ada keluarga yang sebelumnya masih mampu tetapi kemudian kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
- Peneliti : Apakah data penerima bantuan menurut Bapak/Ibu sudah tepat?
- Informan : Secara umum mungkin sudah cukup membantu, tetapi menurut saya masih ada kemungkinan data tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi terbaru. Misalnya seseorang yang terdata sebagai masyarakat miskin mungkin sekarang sudah memiliki usaha, sedangkan orang lain yang baru mengalami kesulitan ekonomi belum masuk dalam data.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah seharusnya memastikan kelompok rentan tidak terlewatkan?
- Informan : Menurut saya pemerintah perlu turun langsung dan tidak hanya mengandalkan data administrasi. Kelompok seperti lansia, keluarga dengan pendapatan rendah, penyandang disabilitas, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, dan masyarakat

yang kehilangan pekerjaan harus mendapat perhatian khusus.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, program apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Bantuan modal usaha juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Untuk anak muda, pelatihan kerja harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Peneliti : Apakah pemberdayaan ekonomi melalui usaha produktif lebih bermanfaat daripada bantuan konsumtif?

Informan : Menurut saya iya, kalau masyarakat memang sudah siap menjalankan usaha. Bantuan konsumtif memang dibutuhkan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi bagi masyarakat yang masih memiliki kemampuan bekerja, bantuan produktif lebih baik karena dapat menghasilkan pendapatan.

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang penggunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat?

Informan : Saya sangat mendukung. Di Aceh, zakat sebenarnya memiliki potensi besar. Kalau dikelola dengan baik dan diberikan kepada orang yang tepat, zakat tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari tetapi juga dapat menjadi modal untuk usaha. Misalnya masyarakat diberikan bantuan untuk usaha kecil, peralatan kerja, atau kegiatan produktif lainnya. Tetapi harus ada pengawasan supaya bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuan.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui adanya rencana pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Kalau secara umum masyarakat mengetahui ada program pemerintah. Tetapi kalau mengenai dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, atau dokumen lainnya, tidak semua masyarakat mengetahuinya.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui indikator keberhasilan program tersebut?

Informan : Belum terlalu. Biasanya masyarakat hanya mengetahui apakah bantuan sudah diterima atau belum. Kalau indikator keberhasilan seperti berapa orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau berapa usaha yang berkembang, informasi tersebut belum banyak diketahui masyarakat.

Peneliti : Bagaimana pemerintah seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi?

Informan : Menurut saya pemerintah harus melihat kondisi penerima setelah mendapatkan bantuan. Jangan hanya memeriksa apakah bantuan sudah disalurkan. Misalnya kalau diberikan modal usaha, beberapa bulan kemudian dilihat apakah usahanya berjalan, apakah pendapatannya meningkat, dan apa kendalanya.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menilai perhatian pimpinan daerah terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya masalah kemiskinan dan pengangguran memang menjadi perhatian pemerintah. Hal itu terlihat dari berbagai program bantuan dan pemberdayaan yang ada. Tetapi masyarakat tentu berharap perhatian tersebut tidak hanya berupa bantuan, tetapi juga diwujudkan dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

- Peneliti : Apakah masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan?
- Informan : Masyarakat biasanya dilibatkan melalui kegiatan di gampong seperti musyawarah atau Musrenbang. Tetapi menurut saya tidak semua usulan masyarakat bisa direalisasikan.
- Peneliti : Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari kepemimpinan pemerintah daerah?
- Informan : Saya berharap pemimpin lebih sering melihat kondisi masyarakat secara langsung. Jangan hanya berdasarkan laporan. Dengan turun ke lapangan, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah konsisten dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan?
- Informan : Ada program yang berjalan secara rutin, tetapi ada juga program yang menurut masyarakat hanya muncul pada waktu tertentu. Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah program yang berkelanjutan.
- Peneliti : Apa yang menunjukkan komitmen pemerintah menurut Bapak/Ibu?
- Informan : Kalau program benar-benar dilaksanakan dan masyarakat merasakan manfaatnya, itu menunjukkan komitmen. Selain itu, pemerintah juga harus mau mendengar keluhan masyarakat ketika program tidak berjalan dengan baik.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat selama pelaksanaan program?
- Informan : Komunikasi biasanya dilakukan melalui pemerintah gampong. Menurut saya cara ini cukup efektif karena masyarakat lebih mudah berkomunikasi dengan aparaturnya gampong. Tetapi untuk program tertentu, informasi dari pemerintah daerah sebaiknya disampaikan langsung melalui media sosial atau

media lain agar masyarakat tidak hanya bergantung pada informasi dari satu pihak.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui adanya kerja sama pemerintah dengan Baitul Mal atau lembaga ekonomi syariah?

Informan : Sebagian masyarakat mengetahuinya, terutama yang pernah mendapatkan bantuan atau pernah berhubungan dengan Baitul Mal. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail bentuk kerja samanya.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah keputusan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Informan : Sebagian sudah, tetapi menurut saya pemerintah perlu lebih sering melakukan survei dan berdiskusi dengan masyarakat sebelum menetapkan program.

Peneliti : Apa yang paling penting dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil keputusan?

Informan : Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang paling miskin dan sulit mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah program tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang.

Peneliti : Apakah masyarakat dapat mengakses informasi tentang program pemerintah?

Informan : Sebagian informasi bisa diperoleh melalui pemerintah gampong, media sosial, dan informasi dari masyarakat lain. Tetapi informasi mengenai anggaran dan hasil program biasanya tidak terlalu diketahui oleh masyarakat umum.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat perlu mengetahui anggaran program?

Informan : Perlu. Masyarakat tidak harus mengetahui semua detail teknis, tetapi setidaknya mengetahui programnya apa, siapa penerimanya, berapa targetnya,

dan apa hasilnya. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi.

Peneliti : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang diharapkan masyarakat?

Informan : Pemerintah harus menyampaikan hasil program secara terbuka. Kalau berhasil, masyarakat perlu mengetahui keberhasilannya. Kalau tidak berhasil, pemerintah juga sebaiknya menjelaskan penyebabnya dan apa yang akan diperbaiki.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan program pemerintah sudah jelas bagi masyarakat?

Informan : Untuk program bantuan, biasanya cukup jelas karena masyarakat mengetahui bantuan tersebut untuk apa. Tetapi untuk program pembangunan yang lebih luas, masyarakat kadang tidak mengetahui target akhirnya.

Peneliti : Apa tujuan yang paling diharapkan masyarakat dari program pengentasan kemiskinan?

Informan : Masyarakat tentu ingin memiliki penghasilan yang cukup dan pekerjaan yang layak. Jadi bukan hanya mendapatkan bantuan, tetapi mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan usaha atau pekerjaan sendiri.

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu target program pemerintah sudah jelas dan dapat diukur?

Informan : Untuk masyarakat umum, target yang digunakan pemerintah belum terlalu diketahui. Yang masyarakat rasakan biasanya apakah mendapatkan manfaat atau tidak.

Peneliti : Mengapa target yang jelas penting bagi masyarakat?

Informan : Supaya masyarakat bisa mengetahui apakah program benar-benar berhasil. Kalau target tidak jelas, masyarakat sulit menilai apakah program tersebut berhasil atau tidak.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui hubungan program pemerintah dengan dokumen perencanaan daerah?

Informan : Tidak banyak yang mengetahui secara detail. Masyarakat lebih melihat hasil akhirnya. Tetapi menurut saya memang harus ada hubungan antara perencanaan dengan program yang dilaksanakan agar pembangunan tidak berubah-ubah dan mempunyai arah yang jelas.

Peneliti : Apa yang masyarakat harapkan dari perencanaan tersebut?

Informan : Kami berharap perencanaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan program yang mudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa hasil akhir yang seharusnya dicapai dari program pengentasan kemiskinan?

Informan : Masyarakat miskin menjadi lebih mandiri, mendapatkan pekerjaan atau memiliki usaha, pendapatannya meningkat, dan tidak terus bergantung kepada bantuan.

Peneliti : Apakah program pemerintah saat ini sudah memberikan manfaat jangka panjang?

Informan : Ada yang sudah memberikan manfaat jangka panjang, tetapi ada juga yang manfaatnya hanya sementara. Menurut saya program yang memberikan keterampilan dan modal usaha memiliki peluang lebih besar memberikan manfaat jangka panjang.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu mengetahui berbagai program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Ya, ada bantuan sosial, bantuan usaha, pelatihan kerja, program pemberdayaan masyarakat, dan berbagai program lainnya. Tetapi masyarakat biasanya

mengetahui program yang memang dekat dengan kehidupan mereka.

Peneliti : Apakah program tersebut sudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan?

Informan : Menurut saya sudah menjangkau sebagian besar kelompok yang membutuhkan, tetapi belum semuanya. Masih ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi belum mendapatkan program karena mungkin masalah data, informasi, atau keterbatasan kuota.

Peneliti : Bagaimana agar program memberikan kemaslahatan yang lebih besar?

Informan : Program harus tepat sasaran dan tidak hanya diberikan sekali. Kalau bantuan usaha diberikan, harus ada pendampingan supaya usaha tersebut bisa berkembang.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui realisasi anggaran program pengentasan kemiskinan?

Informan : Secara umum tidak terlalu mengetahui detailnya. Masyarakat lebih mengetahui program apa yang dilaksanakan dan siapa yang mendapatkan bantuan.

Peneliti : Apakah masyarakat membutuhkan informasi mengenai penggunaan anggaran?

Informan : Menurut saya perlu. Bukan karena masyarakat ingin mencampuri urusan pemerintah, tetapi karena uang yang digunakan adalah uang publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran digunakan sesuai tujuan.

Peneliti : Bagaimana pemerintah sebaiknya menyampaikan informasi tersebut?

Informan : Bisa melalui website, media sosial, pemerintah gampong, papan informasi, atau forum masyarakat. Informasinya dibuat sederhana supaya mudah dipahami.

- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemerintah sudah membantu mengurangi kemiskinan?
- Informan : Program pemerintah jelas membantu, terutama bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan. Tetapi untuk mengurangi kemiskinan secara keseluruhan, menurut saya masih membutuhkan waktu dan program yang lebih berkelanjutan.
- Peneliti : Apakah program tersebut memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan?
- Informan : Bagi penerima yang tepat, manfaatnya nyata. Misalnya bantuan kebutuhan dasar sangat membantu keluarga yang sedang kesulitan. Bantuan usaha juga bisa membantu kalau penerimanya memang memiliki kemampuan menjalankan usaha.
- Peneliti : Apa tanda bahwa program benar-benar berhasil menurut Bapak/Ibu?
- Informan : Kalau masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai penghasilan kemudian memiliki pekerjaan atau usaha, pendapatannya meningkat, dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Menurut saya itu keberhasilan yang sebenarnya.
- Peneliti : Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam evaluasi program?
- Informan : Biasanya masyarakat memberikan masukan melalui aparat gampong atau ketika ada pertemuan. Tetapi menurut saya pelibatan masyarakat secara langsung masih bisa diperkuat.
- Peneliti : Bagaimana masyarakat mengetahui hasil evaluasi program?
- Informan : Belum semua hasil evaluasi disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Biasanya masyarakat hanya mengetahui kalau ada program baru atau perubahan program.
- Peneliti : Apa perbaikan yang paling penting menurut Bapak/Ibu?

Informan : Pemerintah perlu memperbaiki pendataan, memperluas informasi, memastikan bantuan tepat sasaran, dan memberikan pendampingan setelah bantuan diberikan. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat akses masyarakat terhadap modal usaha, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi?

Informan : Menurut saya aksesnya belum sama. Masyarakat yang sudah memiliki usaha dan jaringan biasanya lebih mudah mendapatkan informasi dan modal. Sementara masyarakat yang baru mau memulai usaha sering kesulitan.

Peneliti : Apakah kondisi tersebut memengaruhi akses masyarakat terhadap ekonomi syariah dan zakat produktif?

Informan : Iya. Masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang pembiayaan syariah atau program zakat produktif bisa saja tidak mendapatkan manfaatnya. Menurut saya informasi harus lebih aktif diberikan kepada masyarakat, bukan hanya menunggu masyarakat datang dan bertanya.

Peneliti : Bagaimana akses ekonomi dapat dibuat lebih adil?

Informan : Pemerintah dan lembaga ekonomi syariah harus lebih aktif menjangkau masyarakat yang kurang mendapatkan akses. Selain itu, persyaratan program jangan terlalu sulit bagi masyarakat miskin.

- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat kualitas keterampilan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja?
- Informan : Masih ada masyarakat yang keterampilannya terbatas. Terutama bagi yang tidak melanjutkan pendidikan atau belum pernah mengikuti pelatihan. Padahal sekarang banyak pekerjaan membutuhkan keterampilan tertentu, termasuk kemampuan menggunakan teknologi.
- Peneliti : Apakah keterbatasan keterampilan memengaruhi kesempatan kerja?
- Informan : Sangat memengaruhi. Orang yang tidak memiliki keterampilan biasanya hanya bisa mencari pekerjaan tertentu dengan pendapatan yang terbatas.
- Peneliti : Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
- Informan : Pelatihan harus diperbanyak tetapi juga harus sesuai kebutuhan pasar. Setelah pelatihan, sebaiknya ada bantuan untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.
- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menilai ketersediaan pasar, akses transportasi, dan fasilitas ekonomi di wilayah masyarakat?
- Informan : Di beberapa wilayah fasilitas ekonomi sudah cukup baik, tetapi ada daerah yang aksesnya masih terbatas. Jarak menuju pusat pasar dan fasilitas tertentu juga dapat menjadi kendala bagi masyarakat.
- Peneliti : Apakah ketimpangan infrastruktur memengaruhi usaha masyarakat?
- Informan : Iya. Kalau akses jalan atau transportasi sulit, biaya untuk membawa barang ke pasar menjadi lebih tinggi. Akhirnya keuntungan usaha menjadi lebih kecil.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah sebaiknya menyampaikan informasi mengenai pembangunan infrastruktur?
- Informan : Informasi mengenai rencana pembangunan sebaiknya disampaikan kepada masyarakat secara terbuka,

termasuk alasan suatu wilayah menjadi prioritas dan manfaat yang ingin dicapai.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah keterbatasan anggaran memengaruhi program pemerintah?

Informan : Kemungkinan besar iya. Karena pemerintah tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan masyarakat sekaligus. Mungkin itu sebabnya ada program yang hanya diberikan kepada sebagian masyarakat atau dilakukan secara bertahap.

Peneliti : Bagaimana pemerintah seharusnya menggunakan anggaran yang terbatas?

Informan : Menurut saya harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang paling penting dan masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai anggaran banyak digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat.

Peneliti : Bagaimana transparansi anggaran dapat ditingkatkan?

Informan : Pemerintah perlu memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat mengenai program dan anggarannya. Dengan begitu masyarakat dapat ikut mengawasi.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah ketergantungan masyarakat pada pekerjaan musiman memengaruhi kestabilan pendapatan keluarga?

Informan : Sebagian masyarakat masih bergantung pada pekerjaan musiman, sehingga ketika hasil pertanian menurun, pendapatan keluarga juga ikut berkurang. Kondisi ini membuat pendapatan masyarakat tidak selalu stabil.

Peneliti : Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan musiman?

Informan : Menurut saya pemerintah perlu mengembangkan usaha alternatif yang sesuai dengan potensi masyarakat dan kondisi wilayah. Masyarakat dapat

diberikan pelatihan keterampilan yang dapat digunakan sepanjang tahun, kemudian didukung dengan modal, pendampingan, dan akses pasar. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan Baitul Mal dan lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan dukungan usaha produktif. Dengan adanya sumber pendapatan alternatif, ketika hasil pertanian menurun masyarakat masih memiliki usaha atau pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemerintah sudah terkoordinasi dengan baik?

Informan : Menurut saya masih ada kemungkinan program yang hampir sama dijalankan oleh beberapa lembaga. Masyarakat sendiri kadang bingung harus mengurus atau mendapatkan informasi dari instansi yang mana.

Peneliti : Apakah lemahnya koordinasi dapat memengaruhi pemerataan bantuan?

Informan : Bisa. Kalau data antarinstansi berbeda, ada kemungkinan satu orang mendapatkan beberapa bantuan sementara orang lain tidak mendapatkan bantuan.

Peneliti : Bagaimana koordinasi sebaiknya diperbaiki?

Informan : Menurut saya harus ada data bersama dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pemerintah gampong, Baitul Mal, dan lembaga lainnya.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah aturan yang ada memudahkan masyarakat mendapatkan program ekonomi?

Informan : Sebagian aturan memang diperlukan supaya bantuan tepat sasaran. Tetapi kalau persyaratannya terlalu banyak atau sulit dipahami masyarakat, bisa menjadi hambatan.

- Peneliti : Apa manfaat kerja sama tersebut bagi masyarakat?
- Informan : Masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi bisa mendapatkan pelatihan, modal, pendampingan, dan akses pasar.
- Peneliti : Bagaimana pertanggungjawaban antarlembaga seharusnya dilakukan?
- Informan : Masing-masing lembaga harus menjelaskan tugas dan hasil programnya. Jangan sampai ketika program gagal semua pihak saling menyalahkan.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah cukup cepat merespons masalah masyarakat?
- Informan : Untuk beberapa masalah cukup cepat, tetapi untuk program yang membutuhkan proses administrasi biasanya masyarakat harus menunggu. Menurut saya pemerintah perlu mempercepat pelayanan terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- Peneliti : Apa yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan?
- Informan : Kebutuhan masyarakat, kondisi kelompok miskin, jumlah penerima yang membutuhkan, kemampuan anggaran, dan manfaat jangka panjang dari program tersebut.
- Peneliti : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang paling diharapkan masyarakat?
- Informan : Pemerintah harus menjelaskan program secara terbuka, siapa penerimanya, apa hasilnya, dan apa yang dilakukan jika program tidak berhasil.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu memahami hubungan antara program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan prinsip *maqasid syariah*?
- Informan : Menurut pemahaman saya, *maqasid syariah* berkaitan dengan bagaimana kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan terlindungi. Kalau dikaitkan dengan kemiskinan, pemerintah harus membantu masyarakat

supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik dan halal.

Peneliti : Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Harapan saya pemerintah lebih banyak membuka kesempatan kerja dan membantu masyarakat mengembangkan usaha. Bantuan tetap diperlukan, terutama bagi masyarakat yang sangat miskin, tetapi jangan sampai masyarakat selamanya bergantung kepada bantuan. Saya juga berharap program pemerintah lebih tepat sasaran. Data masyarakat harus sering diperbarui supaya orang yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan. Untuk anak muda, saya berharap lebih banyak pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sekarang. Jangan hanya diberikan pelatihan, tetapi setelah itu tidak ada kelanjutan.

Peneliti : Terima kasih atas waktu dan keterbukaan Bapak/Ibu dalam memberikan informasi.

Informan : Sama-sama. Mudah-mudahan penelitian ini bisa memberikan masukan supaya program pemerintah ke depan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

A R - R A N I R Y

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW07 (Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu melihat perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya pemerintah sudah memberikan perhatian. Kita bisa melihat dari adanya bantuan sosial, program untuk masyarakat miskin, pelatihan kerja, bantuan untuk usaha kecil, dan program pemberdayaan lainnya. Tetapi menurut saya masalahnya bukan hanya apakah program itu ada atau tidak, melainkan apakah program tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peneliti : Apakah program pemerintah sudah mencerminkan prinsip keadilan?

Informan : Menurut saya sudah mengarah ke sana, tetapi belum sepenuhnya. Keadilan menurut saya bukan berarti semua orang mendapatkan bantuan yang sama. Orang yang benar-benar miskin dan tidak mempunyai penghasilan tentu membutuhkan bantuan lebih besar dibandingkan orang yang masih memiliki pekerjaan atau usaha. Jadi pemerintah harus benar-benar melihat kondisi masyarakat sebelum menentukan penerima program.

Peneliti : Apa masalah yang sering dihadapi masyarakat dalam mengakses program pemerintah?

Informan : Menurut saya salah satunya adalah informasi. Kadang masyarakat tidak mengetahui bahwa ada program

tertentu. Mereka baru tahu setelah program selesai atau setelah ada orang lain yang mendapatkan. Selain informasi, ada juga masyarakat yang merasa proses administrasinya cukup rumit.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan?

Informan : Menurut saya pemerintah harus memperbanyak program yang menghasilkan pendapatan. Misalnya bantuan usaha, pelatihan keterampilan, bantuan peralatan kerja, akses modal, dan bantuan pemasaran. Kalau hanya bantuan kebutuhan sehari-hari, memang membantu tetapi tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui rencana pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Secara umum tahu bahwa pemerintah mempunyai program, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui rencana secara detail. Biasanya masyarakat mengetahui program ketika sudah ada sosialisasi di gampong atau ketika ada pendaftaran.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemerataan pelaksanaan program pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan menganggur di Kabupaten Aceh Besar?

Informan : Program pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan masih ada masyarakat yang belum memperoleh akses bantuan.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh masyarakat yang membutuhkan sudah memperoleh akses yang sama terhadap program bantuan dan pemberdayaan pemerintah? Mengapa?

Informan : Program pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan

masih ada masyarakat yang belum memperoleh akses bantuan. Menurut saya, hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan informasi, pendataan yang belum sepenuhnya akurat, persyaratan administrasi, dan keterbatasan jumlah penerima program.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya pemimpin daerah menangani masalah kemiskinan?

Informan : Pemimpin harus melihat masalah masyarakat secara langsung dan mendengarkan keluhan masyarakat. Menurut saya pemimpin tidak cukup hanya menerima laporan dari bawahannya. Dengan turun ke lapangan, pemimpin bisa mengetahui apakah program benar-benar berjalan atau hanya bagus di laporan.

Peneliti : Apakah masyarakat sudah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi?

Informan : Ada melalui musyawarah gampong dan Musrenbang. Tetapi tidak semua usulan masyarakat dapat diterima. Menurut saya itu wajar karena anggaran terbatas. Yang penting masyarakat diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan dan pemerintah memberikan penjelasan apabila usulan tersebut belum dapat direalisasikan.

Peneliti : Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kepemimpinan pemerintah daerah?

Informan : Saya berharap pemimpin lebih fokus kepada kebutuhan masyarakat bawah, terutama masalah pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan usaha masyarakat.

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu melihat adanya komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan?

Informan : Ada. Banyak program yang menunjukkan pemerintah memperhatikan masyarakat miskin. Tetapi komitmen itu harus terlihat dari keberlanjutan program. Jangan

sampai program hanya berjalan satu kali kemudian berhenti.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komitmen tersebut dapat diperkuat?

Informan : Dengan membuat program jangka panjang. Misalnya kalau masyarakat diberi bantuan usaha, harus ada pendampingan dan evaluasi. Kalau anak muda diberi pelatihan, harus ada hubungan dengan dunia kerja.

Peneliti : Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat?

Informan : Komunikasi melalui pemerintah gampong cukup membantu. Tetapi pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan media sosial karena sekarang banyak masyarakat mendapatkan informasi dari internet.

Peneliti : Apa kendala komunikasi yang dirasakan masyarakat?

Informan : Kadang informasi tidak sampai secara merata. Ada masyarakat yang aktif mencari informasi, tetapi ada juga yang hanya mengetahui kalau ada orang lain memberitahukan. Menurut saya informasi program harus dibuat lebih sederhana dan disampaikan melalui berbagai saluran.

Peneliti : Bagaimana kerja sama pemerintah dengan Baitul Mal menurut Bapak/Ibu?

Informan : Menurut saya sangat penting. Baitul Mal mempunyai fungsi yang sangat dekat dengan masyarakat miskin. Kalau program zakat dapat dihubungkan dengan pemberdayaan usaha dan program pemerintah, manfaatnya bisa lebih besar.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan?

Informan : Kebutuhan masyarakat dan data yang benar. Pemerintah juga harus melihat apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan.

Peneliti : Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan?

Informan : Perlu, terutama masyarakat yang akan menerima program. Karena mereka yang paling mengetahui masalah di lapangan.

Peneliti : Bagaimana keputusan dapat mencerminkan kemaslahatan?

Informan : Keputusan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Jangan sampai program hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Peneliti : Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan transparansi?

Informan : Informasi program bisa disampaikan melalui website, media sosial, pemerintah gampong, papan pengumuman, atau pertemuan masyarakat. Informasinya harus mudah dipahami.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Apa tujuan utama yang seharusnya dicapai pemerintah dalam mengatasi kemiskinan?

Informan : Tujuan utamanya menurut saya adalah membuat masyarakat mampu hidup mandiri. Pemerintah membantu sampai masyarakat mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penghasilan sendiri.

Peneliti : Bagaimana dengan pengangguran?

Informan : Tujuannya harus memberikan kesempatan kerja. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, pelatihan saja tidak cukup. Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan atau pelaku usaha supaya masyarakat yang sudah dilatih mempunyai kesempatan bekerja.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa outcome yang paling penting dari program pengentasan kemiskinan?

Informan : Masyarakat mempunyai penghasilan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan, usaha berkembang, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Peneliti : Apakah keberhasilan cukup diukur dari jumlah bantuan yang diberikan?

Informan : Tidak. Bantuan yang banyak belum tentu berarti kemiskinan berkurang. Yang penting adalah perubahan kondisi masyarakat setelah mendapatkan bantuan.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Apakah program pemerintah sudah cukup banyak?

Informan : Menurut saya programnya cukup banyak. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah program tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan apakah programnya saling mendukung.

Peneliti : Apa program yang paling dibutuhkan masyarakat?

Informan : Pekerjaan, pelatihan keterampilan, bantuan usaha, akses modal, dan pemasaran produk.

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu melihat perubahan ekonomi masyarakat setelah adanya program pemerintah?

Informan : Ada beberapa masyarakat yang mengalami perubahan. Misalnya ada yang mendapatkan bantuan usaha kemudian bisa mengembangkan usahanya. Tetapi tidak semuanya berhasil. Ada juga bantuan usaha yang tidak berkembang karena penerimanya kurang memiliki pengalaman atau karena pasar produknya terbatas.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, mengapa ada program yang berhasil dan ada yang tidak?

Informan : Menurut saya karena kemampuan penerima berbeda. Ada orang yang memang sudah mempunyai pengalaman usaha, sehingga ketika diberikan modal dia bisa mengembangkannya. Tetapi ada yang belum pernah berusaha sehingga membutuhkan pendampingan.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemerintah perlu dievaluasi bersama masyarakat?

Informan : Iya. Masyarakat dapat memberikan informasi yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Misalnya

bantuan sudah diterima tetapi ternyata tidak sesuai kebutuhan.

Peneliti : Apa bentuk evaluasi yang paling efektif?

Informan : Pemerintah bisa bertanya langsung kepada penerima program, melakukan kunjungan, atau mengadakan pertemuan evaluasi di gampong.

Peneliti : Apa perbaikan yang paling penting?

Informan : Pendataan harus diperbaiki, informasi harus lebih terbuka, penerima harus tepat sasaran, dan program harus disertai pendampingan.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat mempunyai kesempatan ekonomi yang sama?

Informan : Belum sama. Ada masyarakat yang mempunyai modal dan jaringan sehingga lebih mudah mengembangkan usaha. Ada juga yang sebenarnya mempunyai kemampuan tetapi tidak mempunyai modal. Untuk pekerjaan juga begitu. Orang yang mempunyai pendidikan dan keterampilan lebih mudah mencari pekerjaan dibandingkan yang tidak mempunyai keterampilan.

Peneliti : Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi masyarakat miskin?

Informan : Mereka semakin sulit keluar dari kemiskinan kalau tidak ada bantuan atau kesempatan. Karena itu pemerintah harus membantu membuka akses, bukan hanya memberikan bantuan sesaat.

Peneliti : Bagaimana peran ekonomi syariah dalam mengatasi masalah tersebut?

- Informan : Menurut saya zakat produktif dan pembiayaan syariah bisa membantu. Masyarakat yang memenuhi syarat dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani sistem yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka.
- Peneliti : Apa kendala utama masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan?
- Informan : Salah satunya keterampilan. Banyak pekerjaan sekarang membutuhkan kemampuan tertentu. Kalau seseorang tidak memiliki keterampilan, pilihan pekerjaannya menjadi terbatas.
- Peneliti : Apakah keterbatasan anggaran dapat memengaruhi program pengentasan kemiskinan?
- Informan : Menurut saya tentu berpengaruh. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan dalam waktu bersamaan karena anggaran terbatas.
- Peneliti : Bagaimana seharusnya pemerintah menentukan prioritas?
- Informan : Masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan harus menjadi prioritas. Selain itu, program yang dapat menghasilkan pendapatan harus diperhatikan karena bisa membantu masyarakat mandiri.
- Peneliti : Bagaimana masyarakat menilai penggunaan anggaran pemerintah?
- Informan : Yang penting manfaatnya dapat dirasakan. Pemerintah harus menghindari pengeluaran yang tidak terlalu penting dan lebih fokus kepada program yang langsung membantu masyarakat.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi antarinstansi sudah baik?
- Informan : Menurut saya masih bisa ditingkatkan. Kadang masyarakat tidak mengetahui harus menghubungi

instansi yang mana untuk mendapatkan program tertentu.

Peneliti : Apakah persyaratan program pemerintah terkadang menjadi hambatan?

Informan : Ada. Mungkin aturan dibuat supaya program tertib, tetapi bagi masyarakat yang kurang memahami administrasi, beberapa persyaratan bisa terasa sulit.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah cukup cepat dalam menangani masalah ekonomi masyarakat?

Informan : Menurut saya ada yang cepat dan ada yang membutuhkan waktu. Untuk bantuan tertentu masyarakat harus melalui beberapa tahapan administrasi. Saya memahami pemerintah membutuhkan prosedur, tetapi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, pelayanan sebaiknya dibuat lebih cepat.

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat program pengentasan kemiskinan dan pengangguran jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya *maqasid syariah* pada dasarnya berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Jadi kalau pemerintah membuat program untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, menjaga keluarga, memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan yang halal, itu menurut saya sejalan dengan tujuan tersebut. Bagi masyarakat miskin, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.

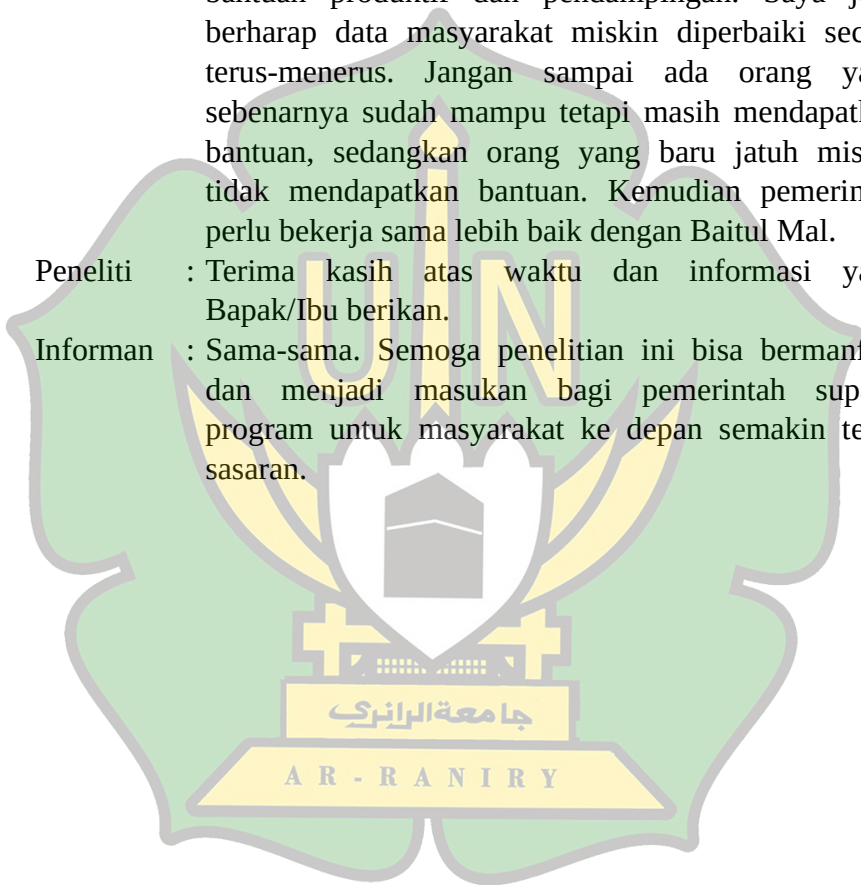
Peneliti : Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Saya berharap pemerintah tidak hanya fokus memberikan bantuan, tetapi lebih banyak membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Pertama,

lapangan pekerjaan harus diperbanyak. Kedua, pelatihan kerja harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, UMKM harus dibantu supaya bisa berkembang. Keempat, masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha dapat diberikan bantuan produktif dan pendampingan. Saya juga berharap data masyarakat miskin diperbaiki secara terus-menerus. Jangan sampai ada orang yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan, sedangkan orang yang baru jatuh miskin tidak mendapatkan bantuan. Kemudian pemerintah perlu bekerja sama lebih baik dengan Baitul Mal.

Peneliti : Terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak/Ibu berikan.

Informan : Sama-sama. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah supaya program untuk masyarakat ke depan semakin tepat sasaran.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW08 (Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu melihat upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya pemerintah sudah berusaha melalui berbagai program. Ada bantuan sosial, program pemberdayaan, pelatihan, bantuan untuk masyarakat yang mempunyai usaha, dan program lainnya. Tetapi kalau melihat kondisi masyarakat, masalah kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan.

Peneliti : Apakah program pemerintah menurut Bapak/Ibu sudah mencerminkan keadilan?

Informan : Menurut saya cukup mengarah kepada keadilan, tetapi dalam pelaksanaan masih ada yang perlu diperbaiki. Keadilan itu menurut saya bukan berarti semua masyarakat mendapatkan jumlah bantuan yang sama. Masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tentu harus diprioritaskan.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat?

Informan : Pemerintah tentu mempunyai data dan laporan dari gampong. Tetapi menurut saya tidak semua masalah masyarakat bisa diketahui hanya melalui data. Ada keluarga yang kondisi ekonominya tiba-tiba berubah karena kehilangan pekerjaan. Ada juga usaha kecil yang mengalami penurunan pendapatan. Jadi pemerintah perlu sering memperbarui data.

- Peneliti : Apa masalah yang paling sering dirasakan masyarakat dalam mendapatkan program pemerintah?
- Informan : Menurut saya informasi dan persyaratan. Ada masyarakat yang tidak mengetahui kapan program dibuka atau bagaimana cara mendaftarnya. Kadang masyarakat juga merasa bingung dengan persyaratan administrasi. Kalau masyarakat tidak mengerti, mereka akhirnya tidak melanjutkan proses.
- Peneliti : Program seperti apa yang menurut Bapak/Ibu paling dibutuhkan masyarakat miskin?
- Informan : Menurut saya kebutuhan dasarnya memang harus dibantu, terutama bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu. Tetapi bagi masyarakat yang masih produktif, lebih baik diberikan bantuan yang bisa menghasilkan pendapatan. Misalnya bantuan alat kerja, modal usaha, pelatihan, atau bantuan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah sebaiknya menangani pengangguran?
- Informan : Pemerintah harus membuka lebih banyak kesempatan kerja dan memperkuat pelatihan keterampilan. Banyak anak muda sebenarnya mau bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai keterampilan yang sesuai. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan atau pelaku usaha sehingga pelatihan yang diberikan memang sesuai kebutuhan pekerjaan.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemberdayaan perempuan penting dalam mengurangi kemiskinan?
- Informan : Sangat penting. Banyak keluarga yang pendapatannya terbatas tetapi sebenarnya ibu atau perempuan dalam keluarga memiliki kemampuan untuk membantu ekonomi. Misalnya melalui usaha makanan, kerajinan, perdagangan kecil, atau usaha rumahan. Kalau diberikan pelatihan dan akses pemasaran, pendapatan keluarga bisa bertambah.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu pemimpin daerah seharusnya melihat masalah kemiskinan?

Informan : Pemimpin harus melihat kemiskinan sebagai masalah jangka panjang. Jangan hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini, tetapi juga memikirkan bagaimana masyarakat keluar dari kemiskinan. Menurut saya pemimpin harus berani membuat program yang mendorong masyarakat bekerja dan berusaha.

Peneliti : Apa yang membuat masyarakat percaya kepada pemimpin daerah?

Informan : Kalau pemimpin terbuka, mau mendengar masyarakat, tidak membedakan masyarakat, dan programnya benar-benar memberikan manfaat.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana melihat komitmen pemerintah dalam mengatasi kemiskinan?

Informan : Komitmennya terlihat dari adanya berbagai program. Tetapi komitmen menurut saya harus dilihat dari keberlanjutannya. Kalau masyarakat diberikan bantuan satu kali lalu tidak ada lagi pendampingan, hasilnya mungkin tidak maksimal.

Peneliti : Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat menurut Bapak/Ibu?

Informan : Untuk informasi dasar biasanya masyarakat mendapatkan dari pemerintah gampong. Sekarang media sosial juga membantu. Tetapi menurut saya pemerintah perlu lebih aktif memberikan informasi secara langsung, terutama mengenai program yang memiliki persyaratan tertentu.

Peneliti : Apakah pemerintah sudah cukup terbuka mengenai program yang dilaksanakan?

Informan : Menurut saya sudah ada upaya keterbukaan, tetapi masih bisa ditingkatkan. Masyarakat biasanya mengetahui programnya, tetapi tidak selalu mengetahui hasil akhirnya.

Peneliti : Informasi apa yang paling penting diketahui masyarakat?

Informan : Kriteria penerima, jumlah penerima, cara mendaftar, jadwal program, bentuk bantuan, dan hasil program. Kalau memungkinkan, informasi mengenai anggaran juga disampaikan secara sederhana.

Peneliti : Apa manfaat transparansi bagi masyarakat?

Informan : Masyarakat menjadi lebih percaya dan dapat ikut mengawasi. Kalau ada masalah, masyarakat juga tahu ke mana harus menyampaikan keluhan.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan program pengentasan kemiskinan sudah jelas?

Informan : Secara umum jelas, yaitu membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi untuk tujuan masing-masing program, tidak semua masyarakat mengetahuinya secara detail.

Peneliti : Apa tujuan yang paling penting menurut masyarakat?

Informan : Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa selalu bergantung kepada bantuan. Jadi harus ada peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

Peneliti : Apa hasil akhir yang diharapkan dari program pengentasan kemiskinan?

Informan : Masyarakat mempunyai penghasilan yang meningkat, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, kebutuhan kesehatan terpenuhi, dan keluarga mampu hidup lebih layak.

Peneliti : Apakah penyaluran bantuan sudah cukup untuk disebut berhasil?

Informan : Belum. Bantuan yang tersalurkan baru menunjukkan output. Keberhasilannya harus dilihat dari perubahan kehidupan penerima.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Apakah program pemerintah sudah cukup banyak?

Informan : Menurut saya cukup banyak. Tetapi yang penting bukan jumlah programnya. Yang penting program tersebut tepat sasaran dan memberikan hasil.

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui bagaimana anggaran program digunakan?

Informan : Tidak mengetahui secara rinci. Masyarakat biasanya hanya mengetahui bantuan atau kegiatan yang diterima.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi tersebut perlu dibuka?

Informan : Iya. Masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran karena anggaran berasal dari sumber publik.

Peneliti : Apakah program pemerintah memberikan perubahan bagi masyarakat?

Informan : Bagi sebagian masyarakat iya. Ada yang terbantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada yang bisa menjalankan usaha setelah mendapatkan bantuan. Tetapi perubahan setiap orang berbeda. Ada yang cepat berkembang dan ada yang masih kesulitan.

Peneliti : Mengapa hasil program berbeda antara satu penerima dengan penerima lainnya?

Informan : Karena kondisi dan kemampuan masyarakat berbeda. Ada yang sudah memiliki pengalaman usaha, ada yang belum. Ada yang memiliki pasar, ada yang kesulitan menjual produknya.

Peneliti : Apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap penerima yang belum berhasil?

Informan : Jangan langsung dianggap gagal. Pemerintah perlu melihat masalahnya. Mungkin mereka membutuhkan pelatihan tambahan atau pendampingan.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan modal dan pelatihan usaha yang diberikan pemerintah

memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi keluarga?

Informan : Setelah mendapatkan bantuan modal dan pelatihan usaha, penghasilan keluarga kami mulai meningkat.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat kesenjangan akses ekonomi di masyarakat?

Informan : Menurut saya masih ada. Orang yang mempunyai modal lebih mudah mengembangkan usaha. Orang yang tidak mempunyai modal sering kesulitan memulai. Begitu juga dengan pekerjaan. Masyarakat yang mempunyai pendidikan dan keterampilan biasanya memiliki pilihan pekerjaan lebih banyak.

Peneliti : Apa kendala SDM yang menurut Bapak/Ibu masih dirasakan masyarakat?

Informan : Keterampilan kerja masih menjadi kendala. Tidak semua masyarakat mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan atau pelatihan. Selain itu kemampuan menggunakan teknologi juga berbeda-beda.

Peneliti : Apa jenis pelatihan yang dibutuhkan masyarakat?

Informan : Pelatihan yang dapat langsung digunakan untuk bekerja atau berusaha. Misalnya keterampilan teknis, pengolahan produk, pemasaran digital, pengelolaan usaha, dan keterampilan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Peneliti : Apakah pelatihan saja cukup?

Informan : Tidak. Setelah pelatihan harus ada tindak lanjut. Kalau tidak ada kesempatan kerja atau modal usaha, peserta pelatihan bisa kembali menganggur.

- Peneliti : Apakah bantuan sosial tetap diperlukan?
Informan : Tetap diperlukan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tetapi bagi masyarakat yang masih produktif, program pemberdayaan lebih baik supaya mereka bisa mandiri.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu koordinasi antarinstansi dalam menjalankan program?
Informan : Menurut saya masih perlu diperkuat. Masyarakat kadang melihat program dari beberapa instansi yang hampir sama. Kalau tidak dikoordinasikan, bisa terjadi tumpang tindih.
Peneliti : Apakah aturan dan persyaratan program terkadang menyulitkan masyarakat?
Informan : Ada masyarakat yang merasa demikian. Terutama masyarakat yang tidak terbiasa dengan administrasi.
Peneliti : Bagaimana aturan seharusnya dibuat?
Informan : Aturan tetap diperlukan, tetapi harus sederhana, jelas, dan tidak menyulitkan masyarakat yang memang berhak menerima.
Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah sudah cukup cepat merespons kebutuhan masyarakat?
Informan : Untuk beberapa hal cukup cepat, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lama karena proses administrasi dan anggaran.
Peneliti : Apa yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat?
Informan : Keterbukaan dan ketepatan sasaran. Masyarakat akan percaya kalau melihat bahwa program benar-benar diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*?

Informan : Menurut saya sangat berkaitan. Dalam Islam, pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Kalau masyarakat miskin dibantu mendapatkan pekerjaan, mempunyai penghasilan, mendapatkan pendidikan, dan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan, menurut saya itu merupakan bagian dari kemaslahatan.

Peneliti : Apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Harapan saya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memberikan program yang bisa membuat masyarakat mandiri. Bantuan sosial tetap diperlukan untuk masyarakat yang tidak mampu. Tetapi masyarakat yang masih produktif sebaiknya diberikan kesempatan bekerja, pelatihan, modal usaha, dan pendampingan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW09 (Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap persoalan kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya pemerintah sudah memberikan perhatian karena kita melihat ada berbagai bentuk bantuan dan program yang ditujukan kepada masyarakat. Ada bantuan sosial, program pemberdayaan, pelatihan, bantuan untuk usaha kecil, dan sebagainya.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah memahami kondisi masyarakat miskin?

Informan : Pemerintah pasti mempunyai data tentang masyarakat miskin. Tetapi kondisi di masyarakat cepat berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau anggota keluarga yang menjadi sumber pendapatan mengalami masalah. Jadi menurut saya pendataan harus dilakukan secara berkala. Jangan hanya menggunakan data lama.

Peneliti : Apa persoalan yang sering dialami masyarakat ketika mengakses program pemerintah?

Informan : Menurut saya yang pertama adalah informasi. Tidak semua masyarakat mengetahui program yang tersedia. Kadang informasi lebih cepat diterima oleh orang yang aktif mencari informasi. Yang kedua adalah administrasi. Ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi kurang memahami cara mengurus persyaratan.

- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan?
- Informan : Menurut saya yang paling penting adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bantuan usaha, pelatihan, akses modal, bantuan peralatan kerja, dan pemasaran. Untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, bantuan kebutuhan dasar tetap diperlukan. Tetapi untuk masyarakat yang masih produktif, sebaiknya diarahkan kepada program yang membuat mereka mandiri.
- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pengembangan UMKM?
- Informan : UMKM sangat penting karena banyak masyarakat menggantungkan pendapatan dari usaha kecil. Tetapi mereka biasanya mempunyai masalah modal, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Pemerintah dapat membantu dengan pelatihan, akses pembiayaan, pemasaran digital, kemasan produk, dan membuka akses pasar.
- Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan?
- Informan : Tidak selalu. Biasanya masyarakat mengetahui ketika program akan dimulai dan ketika bantuan diberikan. Setelah itu informasi mengenai perkembangan program tidak selalu diketahui.
- Peneliti : Mengapa tindak lanjut diperlukan?
- Informan : Karena kondisi masyarakat setelah mendapatkan bantuan perlu dilihat. Misalnya seseorang mendapat bantuan usaha, kita perlu tahu apakah usahanya berkembang atau tidak. Kalau tidak berkembang, harus dicari tahu penyebabnya.

B. KEPEMIMPINAN

- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, seperti apa pemimpin daerah yang mampu mengatasi kemiskinan?
- Informan : Pemimpin harus mempunyai visi jangka panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memberikan bantuan, tetapi harus memikirkan bagaimana masyarakat keluar dari kemiskinan. Pemimpin juga harus mau mendengarkan masyarakat karena kebutuhan setiap wilayah bisa berbeda.
- Peneliti : Apa yang diharapkan masyarakat dari pemimpin daerah?
- Informan : Saya berharap pemimpin tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan ekonomi masyarakat. Jalan dan fasilitas penting, tetapi masyarakat juga perlu pekerjaan dan pendapatan.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat?
- Informan : Menurut saya cukup baik melalui pemerintah gampong. Sekarang media sosial juga menjadi sarana penting. Tetapi tidak semua masyarakat aktif menggunakan media sosial, terutama masyarakat yang lebih tua. Jadi informasi tetap perlu disampaikan secara langsung melalui gampong.
- Peneliti : Apa yang seharusnya menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan?
- Informan : Kebutuhan masyarakat, data yang benar, kemampuan anggaran, dan manfaat program.
- Peneliti : Apakah masyarakat harus dilibatkan?
- Informan : Iya. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan.
- Peneliti : Bagaimana agar keputusan pemerintah adil?
- Informan : Kriteria harus jelas dan berlaku untuk semua. Jangan sampai keputusan dipengaruhi kedekatan atau kepentingan tertentu.

- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu tingkat keterbukaan pemerintah?
- Informan : Menurut saya sudah ada keterbukaan, tetapi masih perlu diperluas. Masyarakat harus lebih mudah mengetahui program dan hasilnya.
- Peneliti : Mengapa transparansi penting?
- Informan : Karena program pemerintah menggunakan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui penggunaannya. Selain itu keterbukaan dapat mencegah kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan.
- Peneliti : Apa bentuk informasi yang sebaiknya dibuka?
- Informan : Jenis program, penerima, kriteria, anggaran secara umum, serta hasil yang sudah dicapai.

C. FOKUS/TUJUAN

- Peneliti : Apa tujuan utama yang seharusnya dicapai dalam program pengentasan kemiskinan?
- Informan : Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat harus mempunyai pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan.
- Peneliti : Apakah masyarakat memahami perencanaan pembangunan daerah?
- Informan : Tidak secara detail. Masyarakat lebih mengetahui program yang langsung dirasakan. Tetapi menurut saya semua program harus mempunyai perencanaan yang jelas supaya tidak berjalan sendiri-sendiri.
- Peneliti : Apa yang harus diperhatikan dalam perencanaan?
- Informan : Kondisi masing-masing wilayah dan kebutuhan masyarakat. Program harus berdasarkan masalah yang benar-benar terjadi.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa ukuran keberhasilan program pengentasan kemiskinan?

- Informan : Kalau pendapatan masyarakat meningkat, jumlah pengangguran berkurang, usaha berkembang, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
- Peneliti : Apakah jumlah bantuan yang disalurkan dapat menjadi ukuran keberhasilan?
- Informan : Tidak cukup. Banyaknya bantuan tidak berarti banyaknya masyarakat yang menjadi sejahtera. Yang harus dilihat adalah perubahan setelah bantuan diberikan.

D. UPAYA PENCAPAIAN

- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu menilai jumlah program pemerintah?
- Informan : Menurut saya cukup banyak. Tetapi masyarakat tidak selalu mengetahui semua program tersebut.
- Peneliti : Program seperti apa yang menurut Bapak/Ibu paling memberikan manfaat?
- Informan : Program yang memberikan kemampuan menghasilkan pendapatan. Misalnya bantuan alat kerja, pelatihan, modal usaha, dan akses pasar.
- Peneliti : Apakah Bapak/Ibu melihat adanya masyarakat yang menjadi lebih mandiri setelah mendapatkan program pemerintah?
- Informan : Ada. Beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan usaha dapat mengembangkan usaha mereka. Tetapi tentu tidak semua berhasil.
- Peneliti : Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat berhasil?
- Informan : Biasanya karena mereka sudah mempunyai keterampilan, pengalaman, dan kemauan untuk menjalankan usaha. Selain itu mereka mempunyai pasar atau jaringan untuk menjual produk.
- Peneliti : Apa yang menyebabkan sebagian lainnya belum berhasil?

- Informan : Kurang pengalaman, modal tidak cukup, kesulitan pemasaran, atau usaha yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi pasar.
- Peneliti : Bagaimana evaluasi program sebaiknya dilakukan?
- Informan : Pemerintah dapat mendatangi penerima program dan melihat kondisi mereka. Bisa juga dilakukan pertemuan untuk mendengar pengalaman penerima.
- Peneliti : Apa yang harus menjadi bahan evaluasi?
- Informan : Ketepatan sasaran, manfaat program, proses pelaksanaan, kendala penerima, dan hasil akhirnya.
- Peneliti : Apa perbaikan yang paling penting?
- Informan : Menurut saya pendataan dan pendampingan. Kalau data tepat, penerima tepat. Kalau ada pendampingan, peluang program berhasil lebih besar.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemerintah saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan bantuan usaha?
- Informan : Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan bantuan usaha sehingga program pemerintah perlu diperluas lagi.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

- Peneliti : Apakah semua masyarakat mempunyai kesempatan ekonomi yang sama?
- Informan : Belum. Orang yang sudah mempunyai modal dan jaringan tentu lebih mudah mengembangkan usaha. Sedangkan masyarakat miskin biasanya justru kekurangan modal dan akses.
- Peneliti : Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi masyarakat?

Informan : Masyarakat yang kurang modal sulit berkembang. Kadang mereka mempunyai keterampilan tetapi tidak bisa memulai usaha karena tidak mempunyai alat atau modal.

Peneliti : Apa kendala kualitas SDM yang paling dirasakan masyarakat?

Informan : Keterampilan kerja. Sekarang kebutuhan pekerjaan semakin berkembang. Kalau masyarakat tidak meningkatkan keterampilan, mereka akan kesulitan bersaing.

Peneliti : Apakah keterbatasan anggaran dapat menghambat program pengentasan kemiskinan?

Informan : Pasti ada pengaruh. Pemerintah mempunyai banyak kebutuhan pembangunan, sementara anggaran terbatas.

Peneliti : Bagaimana pemerintah sebaiknya menentukan prioritas?

Informan : Prioritas harus diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan program yang mempunyai dampak besar. Program yang dapat membuat masyarakat menghasilkan pendapatan sebaiknya juga diperkuat.

Peneliti : Apakah bantuan sosial masih diperlukan?

Informan : Iya, terutama untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tetapi bantuan sosial sebaiknya tidak membuat masyarakat bergantung.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat koordinasi antarinstansi?

Informan : Menurut saya masih perlu diperkuat. Masyarakat kadang tidak mengetahui bahwa beberapa program sebenarnya berasal dari instansi yang berbeda.

Peneliti : Apakah persyaratan program pemerintah terkadang menyulitkan masyarakat?

- Informan : Bagi sebagian masyarakat iya, terutama yang kurang memahami administrasi.
- Peneliti : Apa yang sebaiknya dilakukan?
- Informan : Persyaratan harus dibuat sederhana dan dijelaskan dengan baik. Petugas juga harus membantu masyarakat yang kesulitan.
- Peneliti : Apakah aturan tetap diperlukan?
- Informan : Tetap diperlukan. Tetapi aturan harus melindungi program agar tepat sasaran dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang memang berhak.
- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu pentingnya kerja sama pemerintah dengan Baitul Mal?
- Informan : Sangat penting. Pemerintah mempunyai program pembangunan, sedangkan Baitul Mal mempunyai sumber dana zakat yang dapat membantu masyarakat sesuai ketentuan syariah. Kalau keduanya bekerja sama dengan baik, manfaatnya bisa lebih besar.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah cukup cepat merespons masalah masyarakat?
- Informan : Menurut saya ada yang cepat dan ada yang membutuhkan waktu. Prosedur pemerintah memang membutuhkan proses, tetapi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, pelayanan sebaiknya tidak terlalu lama.
- Peneliti : Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat keputusan?
- Informan : Koordinasi antarinstansi diperbaiki dan proses administrasi dibuat lebih sederhana.
- Peneliti : Apa yang harus diprioritaskan dalam keputusan?
- Informan : Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan kelompok yang paling rentan.
- Peneliti : Bagaimana masyarakat dapat mengawasi program pemerintah?
- Informan : Kalau informasi tersedia, masyarakat bisa ikut mengawasi. Masyarakat juga bisa menyampaikan

keluhan melalui pemerintah gampong atau saluran pengaduan.

Peneliti : Mengapa partisipasi masyarakat penting?

Informan : Karena masyarakat yang menerima program mengetahui secara langsung apakah program tersebut bermanfaat atau tidak.

Peneliti : Apa yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?

Informan : Program harus transparan, penerimanya tepat, dan hasilnya dapat dilihat. Kalau masyarakat melihat program benar-benar membantu orang yang membutuhkan, kepercayaan akan meningkat.

Peneliti : Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Harapan saya pemerintah lebih fokus pada program yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Bantuan sosial tetap penting, terutama bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Tetapi bagi masyarakat yang masih produktif, pemerintah harus memberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Pelatihan kerja juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jangan hanya memberikan pelatihan tanpa memikirkan apakah keterampilan tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk UMKM, pemerintah juga perlu membantu pemasaran. Kalau dikaitkan dengan *maqasid syariah*, menurut saya keberhasilan program bukan hanya ketika angka kemiskinan turun. Keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika masyarakat dapat hidup lebih layak, memperoleh penghasilan halal, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, mendapatkan pendidikan dan kesehatan, serta mempunyai kehidupan yang bermartabat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW10 (Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu melihat upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya pemerintah sudah berusaha menangani masalah tersebut. Kita bisa melihat ada bantuan kepada masyarakat, kegiatan pelatihan, bantuan usaha, dan beberapa program lainnya. Tetapi dari sisi masyarakat, masalahnya masih terasa. Masih ada masyarakat yang penghasilannya tidak tetap. Ada yang bekerja sebagai petani, buruh, pedagang kecil, atau pekerjaan harian.

Peneliti : Apa persoalan yang paling sering dialami masyarakat dalam memperoleh bantuan atau program pemerintah?

Informan : Informasi dan administrasi. Kadang masyarakat mengetahui ada bantuan setelah proses pendaftarannya sudah berjalan. Ada juga masyarakat yang tidak memahami dokumen apa yang harus disiapkan. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan urusan administrasi, hal itu bisa menjadi kendala.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, program apa yang paling dibutuhkan masyarakat miskin?

Informan : Kalau masyarakat yang benar-benar tidak mampu, bantuan kebutuhan dasar memang diperlukan. Tetapi untuk masyarakat yang masih mampu bekerja,

menurut saya lebih bagus diberikan bantuan yang menghasilkan pendapatan. Misalnya alat kerja, modal usaha, bibit untuk pertanian, pelatihan keterampilan, atau bantuan lainnya sesuai kebutuhan.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah evaluasi tersebut penting?

Informan : Sangat penting. Misalnya seseorang diberikan bantuan usaha, pemerintah perlu melihat apakah usahanya berjalan. Kalau usaha tidak berjalan, pemerintah harus mengetahui masalahnya. Bisa jadi bukan karena orangnya tidak mau berusaha, tetapi karena tidak mempunyai pasar atau tidak tahu bagaimana mengelola usaha.

Peneliti : Apa tindak lanjut yang menurut Bapak/Ibu diperlukan?

Informan : Pendampingan, pelatihan lanjutan, bantuan pemasaran, dan evaluasi.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, seperti apa pemimpin daerah yang baik dalam menangani kemiskinan?

Informan : Pemimpin harus melihat kondisi masyarakat secara langsung dan tidak hanya menerima laporan. Menurut saya pemimpin harus mempunyai program jangka panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memberikan bantuan tahun ini, tetapi bagaimana masyarakat lima atau sepuluh tahun ke depan bisa lebih mandiri.

Peneliti : Apa yang membuat masyarakat percaya kepada pemimpin?

Informan : Kalau pemimpin terbuka, mau mendengarkan masyarakat, programnya jelas, dan hasilnya bisa dirasakan.

Peneliti : Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat?

Informan : Menurut saya cukup melalui pemerintah gampong. Sekarang media sosial juga membantu. Tetapi menurut saya jangan mengandalkan media sosial saja karena masih ada masyarakat yang tidak aktif menggunakan internet.

Peneliti : Apa yang harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan?

Informan : Kondisi masyarakat, data, kebutuhan, dan manfaat program. Jangan hanya melihat program dari sisi anggaran terserap atau kegiatan terlaksana. Harus dilihat manfaatnya.

Peneliti : Apakah masyarakat sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai program pemerintah?

Informan : Menurut saya belum sepenuhnya. Ada program yang diketahui masyarakat, tetapi ada juga yang tidak.

Peneliti : Informasi apa yang menurut Bapak/Ibu paling penting?

Informan : Masyarakat perlu tahu siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkan program, kapan pelaksanaannya, apa bentuk bantuannya, dan apa hasilnya.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan?

Informan : Tujuan akhirnya adalah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mempunyai penghasilan. Jadi bukan sekadar memberikan bantuan. Kalau masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, itu lebih baik.

Peneliti : Bagaimana dengan pengangguran?

Informan : Pengangguran harus ditangani dengan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Anak muda terutama perlu mendapatkan

perhatian karena kalau mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka akan sulit berkembang.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar perencanaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Informan : Pemerintah harus menggunakan data dan mendengarkan masyarakat. Perencanaan juga harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah.

Peneliti : Apa ukuran keberhasilan program pemerintah menurut Bapak/Ibu?

Informan : Kalau masyarakat mengalami perubahan. Misalnya sebelumnya tidak mempunyai penghasilan kemudian mempunyai pekerjaan, atau sebelumnya mempunyai usaha kecil kemudian usahanya berkembang.

D. UPAYA PENCAPAIAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah program pemerintah sudah cukup banyak?

Informan : Programnya cukup banyak. Tetapi masyarakat tidak semuanya mengetahui atau bisa mengakses.

Peneliti : Program seperti apa yang menurut Bapak/Ibu perlu ditambah?

Informan : Program yang menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Misalnya pelatihan yang langsung terhubung dengan lapangan kerja, bantuan usaha, dan pengembangan UMKM.

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu melihat masyarakat yang kehidupannya berubah setelah mendapatkan program pemerintah?

Informan : Ada. Ada masyarakat yang terbantu membeli alat usaha atau mengembangkan usaha kecil. Tetapi memang tidak semua bantuan langsung membuat kehidupan berubah. Ada yang berhasil dan ada yang tidak.

Peneliti : Apa yang perlu dilakukan pemerintah?

Informan : Menurut saya pemerintah perlu melihat kebutuhan setiap penerima. Jangan semua diberikan bantuan yang sama.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

Peneliti : Apakah semua masyarakat mempunyai akses ekonomi yang sama?

Informan : Tidak. Ada masyarakat yang mempunyai modal, kendaraan, jaringan, dan akses pasar. Ada juga masyarakat yang tidak mempunyai modal sama sekali.

Peneliti : Apakah keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam menangani kemiskinan?

Informan : Menurut saya pasti menjadi hambatan karena kebutuhan masyarakat banyak.

Peneliti : Bagaimana anggaran sebaiknya diprioritaskan?

Informan : Untuk program yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan dampak besar. Masyarakat yang sangat miskin harus dibantu, tetapi program yang membuat masyarakat produktif juga harus mendapat perhatian.

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang bantuan sosial?

Informan : Bantuan sosial penting untuk masyarakat yang tidak mampu. Tetapi untuk masyarakat yang masih produktif, sebaiknya ada program yang membuat mereka mendapatkan pendapatan sendiri.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu koordinasi antarinstansi pemerintah?

- Informan : Menurut saya masih perlu diperkuat. Kalau koordinasinya kurang, mungkin ada program yang sama dilakukan oleh beberapa pihak.
- Peneliti : Apakah persyaratan program terkadang menyulitkan masyarakat?
- Informan : Ada. Terutama bagi masyarakat yang tidak memahami administrasi.
- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu kecepatan pemerintah dalam merespons masalah masyarakat?
- Informan : Untuk beberapa masalah cukup cepat, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu karena proses administrasi.
- Peneliti : Bagaimana masyarakat dapat mengawasi program pemerintah?
- Informan : Masyarakat bisa ikut dalam musyawarah, melihat pelaksanaan program, dan menyampaikan keluhan jika ada masalah.
- Peneliti : Apa yang membuat masyarakat mau mengawasi?
- Informan : Kalau masyarakat mendapatkan informasi yang cukup. Kalau tidak tahu programnya, tentu sulit untuk mengawasi.
- Peneliti : Apa yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat?
- Informan : Ketepatan sasaran dan keterbukaan. Kalau masyarakat melihat bantuan diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, masyarakat akan lebih percaya.
- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*?
- Informan : Menurut saya sangat berkaitan karena Islam mengajarkan pentingnya kemaslahatan. Kalau pemerintah membantu orang miskin mendapatkan makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, itu sudah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kemudian dari sisi agama,

masyarakat juga harus diarahkan untuk mendapatkan penghasilan yang halal.

Peneliti : Apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Saya berharap pemerintah lebih banyak membuat program yang membantu masyarakat mempunyai penghasilan. Bantuan tetap diperlukan, tetapi jangan sampai masyarakat hanya menerima bantuan. Kalau masih mampu bekerja, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk bekerja atau berusaha. Pemerintah juga harus memperbaiki pendataan. Data yang akurat sangat penting supaya bantuan tidak salah sasaran.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: IW11 (Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)

FOKUS I

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Dalam Menanggulangi Pengangguran Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Maqasid Syariah

A. PERENCANAAN

Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran?

Informan : Menurut saya pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Kita bisa melihat ada bantuan sosial, bantuan kepada masyarakat yang mempunyai usaha, pelatihan kerja, dan berbagai kegiatan lainnya. Tetapi kalau melihat kondisi masyarakat sehari-hari, masih ada yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Banyak yang bekerja berdasarkan pekerjaan yang tersedia. Kalau ada pekerjaan, ada penghasilan. Kalau tidak ada pekerjaan, penghasilan juga tidak ada.

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu program pemerintah sudah mencerminkan prinsip keadilan?

Informan : Secara tujuan saya kira sudah. Pemerintah tentu ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang masih ada masyarakat yang merasa belum mendapatkan perhatian yang sama. Menurut saya bukan berarti pemerintah tidak peduli, tetapi mungkin karena jumlah masyarakat yang membutuhkan cukup banyak sedangkan kemampuan pemerintah terbatas.

Peneliti : Apa masalah yang sering dihadapi masyarakat ketika mengakses program pemerintah?

Informan : Salah satunya informasi. Tidak semua masyarakat mengetahui program yang tersedia. Kemudian ada masalah administrasi. Ada masyarakat yang tidak tahu

bagaimana mengurus dokumen atau persyaratan tertentu.

Peneliti : Bagaimana sebaiknya pemerintah mengatasi masalah tersebut?

Informan : Pemerintah dapat memperkuat peran aparatur gampong. Kalau ada program, informasinya disampaikan secara jelas sampai ke masyarakat. Selain itu, masyarakat yang mengalami kesulitan administrasi sebaiknya dibantu, bukan hanya diberitahu persyaratannya.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa program yang paling penting untuk mengurangi kemiskinan?

Informan : Menurut saya pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan kebutuhan dasar memang penting, terutama bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu. Tetapi kalau masyarakat masih sehat dan mampu bekerja, pemerintah sebaiknya membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah setiap program pemerintah perlu mempunyai tindak lanjut?

Informan : Menurut saya perlu. Jangan sampai program selesai setelah bantuan diberikan. Misalnya ada masyarakat diberikan bantuan usaha, harus dilihat apakah usaha tersebut berjalan.

B. KEPEMIMPINAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, seperti apa pemimpin daerah yang ideal?

Informan : Pemimpin yang mau melihat kondisi masyarakat dan mendengar keluhan masyarakat. Pemimpin juga harus mempunyai rencana jangka panjang. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Peneliti : Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan?

- Informan : Sangat perlu. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Kalau masyarakat dilibatkan, pemerintah bisa mengetahui masalah yang mungkin tidak terlihat dari laporan administrasi.
- Peneliti : Apakah Bapak/Ibu melihat pemerintah mempunyai komitmen untuk mengatasi kemiskinan?
- Informan : Ada. Program bantuan dan kegiatan pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah tersebut menjadi perhatian. Tetapi menurut saya komitmen harus terus dijaga. Program yang bagus perlu dilanjutkan dan diperbaiki.
- Peneliti : Apa yang dapat menyebabkan program tidak berkelanjutan?
- Informan : Kalau program hanya berdasarkan kegiatan tahunan tanpa melihat kebutuhan jangka panjang. Selain itu kalau evaluasinya kurang, pemerintah mungkin tidak mengetahui apakah program tersebut berhasil.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat?
- Informan : Menurut saya pemerintah cukup sering menyampaikan informasi melalui gampong. Sekarang juga ada media sosial. Tetapi masyarakat tidak semuanya menggunakan media sosial. Jadi informasi tetap harus disampaikan melalui jalur langsung.
- Peneliti : Apa yang menjadi kendala komunikasi?
- Informan : Kadang masyarakat hanya mengetahui bahwa ada program, tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana cara mengikutinya.
- Peneliti : Apa solusi yang dapat dilakukan?
- Informan : Informasi harus lebih sederhana dan jelas. Kalau ada persyaratan, disampaikan satu per satu.
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil keputusan?
- Informan : Kebutuhan masyarakat dan data yang benar. Jangan hanya berdasarkan laporan. Pemerintah juga perlu

mengetahui kondisi di lapangan melalui aparaturnya dan masyarakat.

Peneliti : Apakah masyarakat perlu ikut memberikan masukan?

Informan : Iya. Masyarakat bisa memberikan masukan melalui musyawarah atau forum lainnya.

Peneliti : Bagaimana agar keputusan pemerintah tidak menimbulkan kecemburuan?

Informan : Kriterianya harus jelas dan transparan. Masyarakat harus mengetahui alasan mengapa seseorang mendapatkan bantuan dan yang lain tidak.

Peneliti : Apakah masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran pemerintah?

Informan : Menurut saya perlu. Karena anggaran tersebut berasal dari uang negara. Masyarakat tidak harus mengetahui semua hal yang sangat teknis, tetapi informasi mengenai program, penerima manfaat, dan hasilnya perlu diketahui.

Peneliti : Apa manfaat transparansi?

Informan : Bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kalau semuanya terbuka, masyarakat juga lebih mudah memahami keputusan pemerintah.

C. FOKUS/TUJUAN

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama program pengentasan kemiskinan?

Informan : Tujuannya harus membuat masyarakat mampu hidup lebih baik dan mandiri. Kalau hanya menerima bantuan, kehidupan masyarakat mungkin terbantu untuk sementara. Tetapi kalau mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, manfaatnya lebih panjang.

Peneliti : Apakah Bapak/Ibu mengetahui dokumen perencanaan pembangunan daerah?

Informan : Tidak secara rinci. Sebagai masyarakat, saya lebih mengetahui program yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.

- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus dilakukan agar program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- Informan : Perencanaan harus berdasarkan data dan aspirasi masyarakat. Jangan membuat program hanya karena program tersebut bagus di atas kertas. Harus dilihat apakah masyarakat benar-benar membutuhkan.
- Peneliti : Apa ukuran keberhasilan program pemerintah menurut Bapak/Ibu?
- Informan : Masyarakat mengalami perubahan. Misalnya orang yang sebelumnya menganggur menjadi bekerja, orang yang mempunyai usaha kecil bisa meningkatkan pendapatannya, atau keluarga yang sebelumnya sangat kesulitan menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan.

D. UPAYA PENCAPAIAN

- Peneliti : Bagaimana menurut Bapak/Ibu jumlah program pemerintah saat ini?
- Informan : Menurut saya cukup banyak. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah program tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Peneliti : Apa program yang menurut Bapak/Ibu perlu diperkuat?
- Informan : Program yang berkaitan dengan pekerjaan dan usaha masyarakat. Misalnya pelatihan kerja, bantuan alat kerja, pengembangan usaha kecil, dan pemasaran produk.
- Peneliti : Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara detail realisasi anggaran program pemerintah?
- Informan : Tidak. Masyarakat biasanya hanya melihat kegiatan yang dilakukan.
- Peneliti : Apakah informasi tersebut perlu dibuka?
- Informan : Perlu supaya masyarakat dapat mengetahui bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan.

- Peneliti : Apa yang harus ditampilkan kepada masyarakat?
- Informan : Minimal jenis program, jumlah penerima, tujuan program, dan hasil yang dicapai.
- Peneliti : Apakah Bapak/Ibu mengetahui masyarakat yang berhasil setelah mendapatkan program pemerintah?
- Informan : Ada beberapa yang berhasil. Misalnya ada yang mendapatkan bantuan untuk usaha kemudian usahanya berjalan. Tetapi hasilnya tidak sama pada semua orang.
- Peneliti : Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?
- Informan : Kemampuan masing-masing orang berbeda. Ada yang mempunyai pengalaman usaha, ada yang baru mulai. Selain itu kondisi pasar juga sangat menentukan.
- Peneliti : Apa yang harus dilakukan pemerintah?
- Informan : Bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pendampingan juga penting.
- Peneliti : Bagaimana evaluasi program menurut Bapak/Ibu seharusnya dilakukan?
- Informan : Pemerintah harus melihat langsung keadaan penerima manfaat. Jangan hanya melihat laporan administrasi.
- Peneliti : Apa yang perlu ditanyakan kepada penerima program?
- Informan : Apakah bantuan bermanfaat, apa kendalanya, apakah usaha berjalan, dan apa yang mereka butuhkan selanjutnya.
- Peneliti : Apa perbaikan yang paling penting?
- Informan : Menurut saya ketepatan sasaran dan pendampingan.

FOKUS II

Hambatan Struktural dan Institusional yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Peran Ekonomi Syariah untuk Menanggulangi Pengangguran dan Kemiskinan Ditinjau dari *Maqasid Syariah*

A. HAMBATAN STRUKTURAL

- Peneliti : Apakah masyarakat mempunyai akses ekonomi yang sama?
- Informan : Belum. Ada masyarakat yang mempunyai modal dan jaringan lebih baik. Ada juga yang memulai dari nol.
- Peneliti : Apa dampaknya bagi masyarakat miskin?
- Informan : Mereka lebih sulit mengembangkan usaha. Bahkan untuk mendapatkan modal saja kadang sulit.
- Peneliti : Apa yang dapat dilakukan pemerintah?
- Informan : Membantu membuka akses modal dan pasar. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan peralatan sesuai jenis usaha.
- Peneliti : Apa masalah kualitas SDM yang menurut Bapak/Ibu perlu diperhatikan?
- Informan : Keterampilan kerja dan kemampuan mengelola usaha. Ada orang yang mau bekerja tetapi tidak mempunyai keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia.
- Peneliti : Bagaimana solusinya?
- Informan : Pelatihan harus dibuat berdasarkan kebutuhan pasar.
- Peneliti : Apa yang harus dilakukan setelah pelatihan?
- Informan : Harus ada penyaluran kerja atau pendampingan usaha.
- Peneliti : Apakah infrastruktur memengaruhi kesempatan ekonomi masyarakat?
- Informan : Sangat memengaruhi. Kalau akses jalan bagus, masyarakat lebih mudah membawa barang dan hasil pertanian ke pasar. Kalau akses internet tersedia, masyarakat juga bisa mencari informasi pekerjaan atau memasarkan produk.
- Peneliti : Apakah masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi digital untuk ekonomi?
- Informan : Belum semuanya. Ada yang sudah mampu, tetapi sebagian masih kesulitan.
- Peneliti : Apakah keterbatasan anggaran menjadi hambatan?

- Informan : Pasti menjadi salah satu hambatan. Kebutuhan masyarakat banyak, sedangkan anggaran pemerintah terbatas.
- Peneliti : Bagaimana pemerintah harus menentukan prioritas?
- Informan : Prioritas diberikan kepada kebutuhan yang paling mendesak dan program yang manfaatnya paling besar.
- Peneliti : Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap bantuan sosial?
- Informan : Bantuan sosial tetap diperlukan. Tetapi jangan semua program hanya berbentuk bantuan konsumtif. Masyarakat yang masih produktif perlu dibantu agar mempunyai penghasilan sendiri.

B. HAMBATAN INSTITUSIONAL

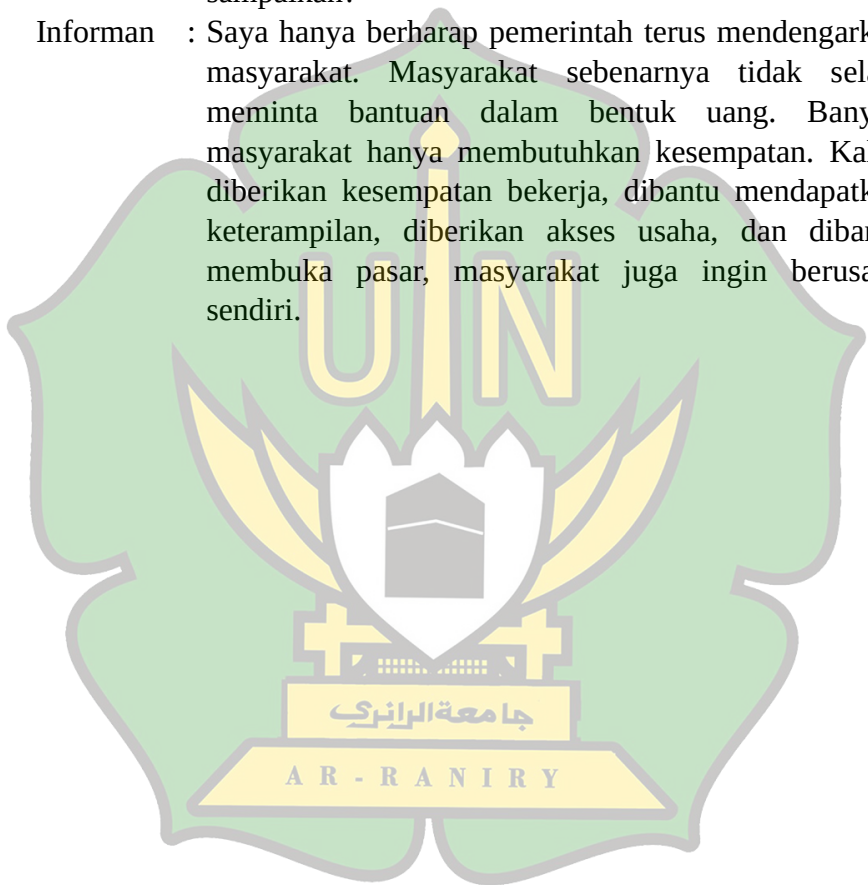
- Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi antarinstansi sudah baik?
- Informan : Saya tidak mengetahui proses internal pemerintah secara langsung. Tetapi dari sisi masyarakat, kadang terlihat program pemerintah seperti berjalan sendiri-sendiri.
- Peneliti : Apakah prosedur pemerintah terkadang sulit bagi masyarakat?
- Informan : Bagi masyarakat tertentu iya, terutama orang tua dan masyarakat yang kurang memahami administrasi.
- Peneliti : Bagaimana bentuk kerja sama yang dapat dilakukan?
- Informan : Misalnya masyarakat yang mendapatkan zakat produktif dapat diberikan pelatihan usaha oleh pemerintah. Pemerintah dapat membantu dari sisi keterampilan, pemasaran, dan pembinaan.
- Peneliti : Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi program pemerintah?
- Informan : Masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui gampong, mengikuti musyawarah, dan menyampaikan keluhan apabila ada masalah.

- Peneliti : Apa yang dibutuhkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan?
- Informan : Informasi yang terbuka. Kalau masyarakat tidak mengetahui programnya, tentu sulit untuk melakukan pengawasan.
- Peneliti : Bagaimana Bapak/Ibu melihat upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan pengangguran jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*?
- Informan : Menurut saya sangat berkaitan. Tujuan pembangunan pada akhirnya adalah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Kalau masyarakat mempunyai pekerjaan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal. Mereka bisa memberikan nafkah kepada keluarga dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Kemudian pendidikan juga penting. Anak dari keluarga miskin jangan sampai tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Kesehatan juga demikian.
- Peneliti : Apakah Bapak/Ibu merasa masyarakat sudah cukup dilibatkan dalam program pemerintah?
- Informan : Menurut saya sudah ada beberapa bentuk keterlibatan, terutama melalui gampong. Tetapi masyarakat mungkin masih bisa lebih banyak dilibatkan. Masyarakat jangan hanya menjadi penerima program. Mereka juga harus dilibatkan dalam menentukan kebutuhan dan mengevaluasi hasil program.
- Peneliti : Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani kemiskinan dan pengangguran?
- Informan : Harapan saya pemerintah terus memperbaiki program pengentasan kemiskinan dan tidak hanya fokus pada bantuan. Masyarakat yang benar-benar tidak mampu tentu harus mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi masyarakat yang masih produktif harus diberikan kesempatan untuk bekerja

dan berusaha. Saya juga berharap pelatihan kerja lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jangan sampai masyarakat mengikuti pelatihan tetapi setelah selesai tidak tahu harus bekerja di mana.

Peneliti : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan?

Informan : Saya hanya berharap pemerintah terus mendengarkan masyarakat. Masyarakat sebenarnya tidak selalu meminta bantuan dalam bentuk uang. Banyak masyarakat hanya membutuhkan kesempatan. Kalau diberikan kesempatan bekerja, dibantu mendapatkan keterampilan, diberikan akses usaha, dan dibantu membuka pasar, masyarakat juga ingin berusaha sendiri.



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar

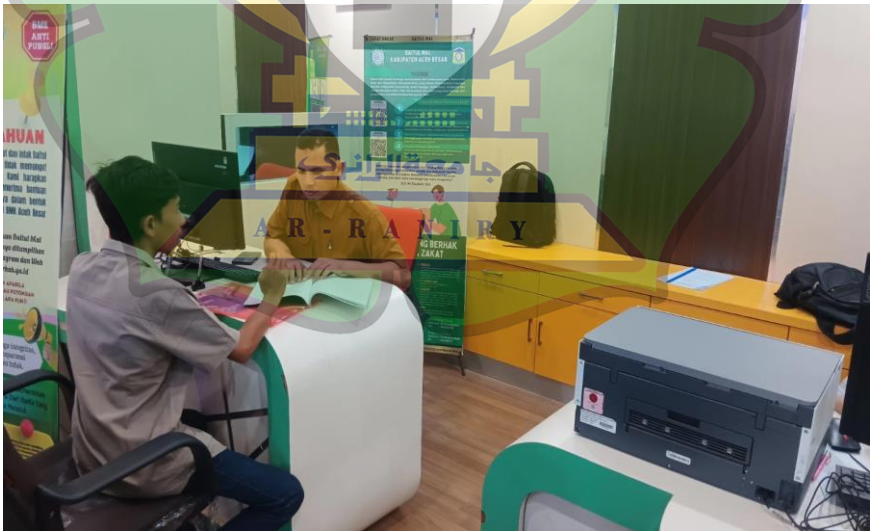


Wawancara dengan Staff Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar



Wawancara dengan Pengelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Akademisi Ekonomi Syariah



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar





Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar

